

Edisi
kedua

PENDIDIKAN TERBUKA DAN JARAK JAUH

Didedikasikan Kepada
Dr. Setijadi MA.

Editor
Durri Andriani, dkk



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TERBUKA

PENDIDIKAN TERBUKA DAN JARAK JAUH

Didedikasikan Kepada
Dr. Setijadi MA.

Editor
Durri Andriani, dkk



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TERBUKA

Hak Cipta © pada Penulis dan dilindungi Undang-undang
Hak Penerbitan pada Penerbit Universitas Terbuka
Departemen Pendidikan Nasional
Kotak Pos 6666 -- Jakarta 10001
Indonesia


Dilarang mengutip sebagian ataupun seluruh buku ini
dalam bentuk apa pun, tanpa izin dari penerbit

Edisi Kedua
Cetakan pertama, Maret, 2009

Editor : Durri Andriani

Desain & Ilustrator Cover : Budi Susila

Lay-outer : Budi Susila

378.175 PEN	<p>PENDIDIKAN terbuka dan jarak jauh/ BNBB/ editor Durri Andriani. -- Cet.1; Ed.2 --. Universitas Terbuka,2009. 200 hal.: 21 cm. ISBN: 978-979-011-425-8</p> <p><i>1. pendidikan tinggi jarak jauh .</i> I. Andriani, Durri [ed.]</p> 
----------------	---

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Pendahuluan Edisi Pertama	vi
Pendahuluan Edisi Revisi	ix
Perkembangan Pemikiran tentang Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh	
Tian Belawati	1
Model Kelembagaan Pendidikan Jarak Jauh: Perkembangan Historis dan Kecenderungan ke Depan	
Aminudin Zuhairi, Sunu Dwi Antoro, & Lidwina Sri Ardiasih	16
Media dalam Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh	
Dewi Padmo & Benny A. Pribadi	36
Lahirnya Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh di Indonesia: Suatu <i>Flashback</i>	
H.A.R. Tilaar	57
Peningkatan Kualifikasi Guru dan Program Penyetaraan	
I G.A.K. Wardani	69
SLTP Terbuka: Alternatif Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	
Machdum Almunawar	90
Siaran Radio Pendidikan (SRP): Embrio Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh di Indonesia	
Zamris Habib	107
Diklat Guru Sekolah Dasar melalui Siaran Radio Pendidikan	
Hardjito	125
Pemanfaatan Siaran TV Pendidikan	
Benny A. Pribadi & Bambang Sutjiatmo	140
Pendidikan Tinggi (Modus Tunggal, Ganda, dan Konsorsium)	

Siti Julaeha & Atwi Suparman	149
Layanan Bantuan Belajar dan Pemanfaatan Sumber Belajar dalam Sistem Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh	
Durri Andriani, Nurmala, & Afriani	170

KATA PENGANTAR

Pada tahun 1999, di lustrumnya yang ke 3, Universitas Terbuka (UT) menerbitkan buku "Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh".

Artikel dalam buku tersebut berisi pokok pikiran, potensi, persoalan, dan penerapan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Termasuk pengalaman UT dalam menerapkan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Pada waktu itu, belum banyak tulisan tentang sistem pendidikan jarak jauh di Indonesia sehingga buku tersebut kemudian menjadi salah satu buku yang banyak dirujuk.

Dalam 10 tahun terakhir, terjadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mempengaruhi praktek pendidikan terbuka dan jarak jauh. Di samping itu, UT juga mengalami perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan layanan pendidikan yang diberikan. Situasi ini mendorong UT untuk menerbitkan buku yang dapat dimanfaatkan untuk menyebar-luaskan pemikiran mutakhir tentang pendidikan terbuka dan jarak jauh serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di pendidikan terbuka dan jarak jauh.

Serangkaian buku telah diterbitkan. Buku "Pendidikan Tinggi Jarak Jauh" (2004) berisi artikel yang mengupas pendidikan jarak jauh di tingkat pendidikan tinggi. Di tahun yang sama, UT menerbitkan buku "Pendidikan Jarak Jauh: Teori dan Praktek" yang mengupas wacana dan praktek pendidikan jarak jauh di seluruh dunia.

Disamping itu, buku ini juga membahas inovasi penting yang telah dilakukan di UT. Sementara itu, buku "Perkembangan Universitas Terbuka: Perjalanan Mencari Jati Diri Menuju PTJJ Unggulan" (2007) secara khusus menceritakan apa dan bagaimana UT menjalankan fungsinya sebagai institusi pendidikan tinggi yang menerapkan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh dalam periode 1984-2005 tahun. Pada tahun 2007, UT menerbitkan empat buku yang berisi metaevaluasi terhadap penelitian yang telah dilakukan di lingkungan UT.

UT tidak hanya menerbitkan buku baru tetapi melakukan revisi terhadap buku yang pernah diterbitkan. Salah satunya adalah merevisi buku "Pendidikan Terbuka dan jarak Jauh". Kemutakhiran artikel dalam buku tersebut perlu dijaga mengingat buku tersebut merupakan salah satu buku yang paling sering dirujuk dalam PTJJ di Indonesia.

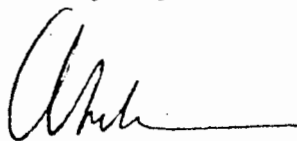
Memperhatikan topik buku-buku yang diterbitkan serta perkembangan pemikiran dan praktek PTJJ dalam 10 tahun terakhir, tidak semua artikel dalam "Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh" direvisi untuk diterbitkan. Untuk memperluas cakupan pembaca, buku ini diterbitkan dalam dua versi bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Jika buku "Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh" diterbitkan untuk menghargai salah satu pendiri UT, Dr. Setijadi, MA, bersamaan dengan ulang tahun beliau yang ke 70 tahun maka penerbitan buku

"Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh - Revisi" ini adalah juga penghargaan UT terhadap Dr. Setijadi, MA yang tahun ini berusia 80 tahun. Komitmen beliau untuk terus berkontribusi terhadap dunia pendidikan umumnya dan kepada UT khususnya mencerminkan bahwa belajar sepanjang hidup tidak hanya sekadar slogan. Melakukan revisi, melakukan penyempurnaan, adalah tindakan yang perlu secara terus-menerus kita lakukan. Tindakan yang patut diteladani dari Dr. Setijadi, MA.

Saya mengucapkan terima kasih kepada penulis atas partisipasi Bapak/Ibu dalam mengisi buku ini. Terima kasih saya sampaikan pula kepada tim penyunting yaitu Saudari Durri Andriani, Tian Belawati, dan Paulina Pannen. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ake Wihadanto dan Adrian Sutawijaya yang telah membantu menerjemahkan artikel dalam buku ini. Kepada Saudara Bambang Budi yang telah mengawal proses penerbitan serta Saudara Budi Susila Shobariadi yang telah menata letak buku ini, saya juga mengucapkan terima kasih.

Saya mengharap buku ini dapat menjadi bagian dari upaya pengembangan pendidikan terbuka dan jarak jauh.



M. Arwi Suparman
Rektor Universitas Terbuka
Jakarta, April 2009

PENDAHULUAN PADA EDISI PERTAMA

Latar Belakang

Datangnya milinium ketiga ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat.

Perkembangan tersebut melahirkan suatu paradigma baru dalam dunia pendidikan. Proses pembelajaran yang selama ini diidentikkan dengan proses dalam ruang tertutup disertai kehadiran guru/dosen mulai menemukan modus lain. Munculnya berbagai media sebagai konsekuensi pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan proses pembelajaran dilakukan dengan sistem terbuka dan jarak jauh. Sesuai dengan namanya, sistem ini memberi kemudahan yang memungkinkan teratasinya berbagai kendala, terutama kendala ruang dan waktu. Oleh karena itu tidak mengherankan jika sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) banyak diterapkan di berbagai negara.

Di Indonesia, sistem pendidikan jarak jauh telah diterapkan sejak tahun 1950an. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, perkembangan pendidikan jarak jauh di Indonesia pun semakin pesat. Perkembangan sistem PTJJ ini juga dipacu oleh perkembangan kebutuhan akan pendidikan melalui metode alternatif. Sistem pendidikan konvensional dirasa tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan pendidikan dan sumberdaya manusia terdidik. Oleh karena itu metode pendidikan jarak jauh yang

mampu mereduksi kendala yang bersifat geografis (seperti jarak), demografi (seperti usia), dan ekonomi (seperti biaya) menjadi pilihan yang tak terelakkan.

Salah satu tolok ukur perkembangan sistem PTJJ di Indonesia adalah didirikannya suatu perguruan tinggi yang secara khusus dirancang untuk menggunakan sistem belajar jarak jauh, yaitu Universitas Terbuka (UT) pada tahun 1984. Pendirian ini jelas merupakan suatu tonggak sejarah perkembangan paradigma pendidikan di Indonesia karena hal ini menunjukkan kepercayaan Bangsa Indonesia pada sistem belajar yang nonkonvensional.

Saat ini, UT telah berusia 15 tahun dan telah berkembang menjadi suatu universitas mega dengan jumlah mahasiswa lebih dari 400.000 orang. Perkembangan UT dan kontribusi yang telah diberikan oleh UT terhadap upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia tidak dapat dipungkiri. Seiring dengan perkembangan UT, pemahaman dan pengadopsian sistem belajar jarak jauh oleh masyarakat pun menjadi semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya institusi pendidikan yang menawarkan program pendidikannya melalui sistem belajar jarak jauh. Demikian pula, animo dan kepercayaan masyarakat pada sistem belajar ini terlihat dari semakin banyaknya orang yang mendaftar pada program-program pendidikan yang menggunakan sistem belajar jarak jauh.

Perkembangan UT sebagai suatu institusi PTJJ, serta timbulnya pemahaman masyarakat pada paradigma PTJJ tidak terlepas dari peran dan upaya yang gigih dari salah satu pendiri UT, yaitu Dr. Setijadi, MA. Buku ini disusun sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih UT terhadap Dr. Setijadi, MA.

Tujuan Penulisan Buku

Tujuan utama penyusunan buku ini adalah untuk mendokumentasikan segala sesuatu yang pernah dilakukan di Indonesia dalam hubungannya dengan sistem PTJJ. Dengan adanya buku ini diharapkan sistem PTJJ dapat lebih dipahami dan dikembangkan lagi, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat serta kebutuhan Indonesia. Dengan demikian, upaya gigih Dr. Setijadi, MA akan terus dikembangkan oleh penerus penentu kebijakan, pengelola atau praktisi, pengguna lulusan, serta peserta pendidikan itu sendiri.

PENDAHULUAN PADA EDISI REVISI

Buku "Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh" (Edisi Pertama) diterbitkan dengan tujuan agar sistem PTJJ dapat lebih dipahami dan dikembangkan lagi, baik oleh penentu kebijakan, pengelola atau praktisi, pengguna lulusan, maupun peserta pendidikan itu sendiri. Tujuan tersebut dapat dikatakan telah dicapai karena artikel dalam buku tersebut banyak dirujuk dalam pengembangan peraturan, makalah seminar, artikel jurnal, maupun diskusi yang terkait dengan PTJJ. Kondisi ini mendorong UT untuk melakukan revisi terhadap buku tersebut. Mengingat dalam kurun waktu 10 tahun (1999-2009) UT telah menerbitkan beberapa buku yang terkait dengan PTJJ maka untuk menghindari tumpang tindih, tidak semua artikel dalam buku "Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh" edisi Pertama direvisi dan diterbitkan. Edisi Revisi difokuskan pada perkembangan pemikiran tentang PTJJ, model kelembagaan PJJ, media dan bantuan belajar dalam PTJJ, serta penerapan PTJJ dalam beberapa jenjang pendidikan. Edisi revisi ini memuat 11 artikel yang terkait dengan topik tersebut.

Perkembangan dan pengalaman serta pelajaran selama 10 tahun terakhir diakomodasi dalam artikel yang ada dalam buku Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh" Edisi revisi. Di samping itu, untuk memperluas cakupan pembaca, edisi revisi buku "Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh" diterbitkan dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Semoga buku ini bermanfaat bagi mereka yang memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan, khususnya mereka yang memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan terbuka dan jarak jauh.

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN TENTANG PENDIDIKAN TERBUKA DAN JARAK JAUH

Tian Belawati

Sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) merupakan sistem yang menggabungkan konsep pendidikan terbuka dengan metode pendidikan secara jarak jauh. Konsep pendidikan terbuka (*open education* atau *open learning*) pada dasarnya merupakan suatu tujuan atau cita-cita kebijakan mengenai sistem pendidikan. Konsep ini menekankan pentingnya keluwesan sistem, terutama dalam meniadakan kendala tempat, waktu, dan aspek yang disebabkan oleh karakteristik mahasiswa seperti misalnya keadaan ekonomi (Bates, 1995). Sedangkan pendidikan jarak jauh (PJJ) (*distance education* atau *distance learning*) lebih merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk mencapai sistem pendidikan yang terbuka.

Dengan kata lain, sistem pendidikan terbuka atau *open learning* adalah suatu keadaan dimana setiap individu dapat belajar tanpa restriksi apapun (Bates, 1995). Keadaan ini merupakan sesuatu yang ideal, yang dalam prakteknya tidak selalu dapat dilaksanakan. Salah satu metode pendidikan yang sejauh ini dianggap lebih mampu dari sistem pendidikan tatap muka (konvensional) dalam mencapai keadaan ideal itu adalah metode PJJ atau *distance education*.

Artikel ini akan membahas perkembangan pemikiran tentang PJJ sebagai alternatif metode pendidikan, perkembangan ideologi mengenai pentingnya interaksi dalam PJJ untuk menjamin kualitas pendidikan yang tinggi, serta pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat yang memungkinkan tercapainya suatu sistem pendidikan tanpa restriksi dan oleh karenanya menjadi lebih terbuka.

PARADIGMA AKSES VS. KUALITAS

Pada awalnya, pemikiran mengenai sistem PJJ didominasi oleh pengertian sebagai suatu bentuk pendidikan yang didasarkan pada penggunaan bahan ajar standar yang diproduksi secara masal untuk mencapai keuntungan ekonomis (*economies of scale*). Pemikiran ini mencerminkan paradigma yang menekankan pada isu aksesibilitas sebagai fokus penyelenggaraan pendidikan. Keinginan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan telah menjadi pemicu utama di banyak negara untuk menyelenggarakan PJJ (Garrison, 1993). Paradigma ini paralel dengan filosofi mengenai otonomi dan kemandirian mahasiswa yang banyak dipelajari oleh Moore (1993). Selama bahan ajar telah dikembangkan, maka mahasiswa mempunyai otonomi dan kemandirian utuh untuk melakukan kegiatan belajarnya. Berdasarkan fenomena penyelenggaraan PJJ dengan paradigma akses ini, PJJ dianggap sebagai suatu bentuk industrialisasi pada bidang pendidikan (Peters, 1867 dalam Keegan, 1993).

Menurut Peters (1867, dalam Keegan, 1993), PJJ merupakan produk masyarakat era industri dan sebagai suatu sistem, PJJ mempunyai banyak persamaan dengan suatu proses produksi industri (pabrik). Keduanya mempunyai kesamaan karakteristik dalam hal adanya pembagian tugas yang jelas antara pekerja (*division of labour*), mekanisasi, produksi massa, standarisasi output, dan sentralisasi sistem. Karena kesesuaian sistem PJJ dengan situasi masyarakat industri inilah maka sistem ini dapat diterima oleh masyarakat dan berhasil digunakan untuk meningkatkan jumlah sumber daya manusia terdidik. Oleh karena itu, menurut Peters, seiring dengan perubahan tatanan masyarakat dari era industrialisasi ke era pasca industrialisasi (*post-industrial society*), maka sistem PJJ pun harus mengalami perubahan (Peters, 1993 dalam Keegan, 1993). Pada era industri, proses PJJ dilakukan dengan memproduksi bahan ajar cetak yang bersifat masal serta dilakukan melalui surat menyurat (*correspondence study*). Tetapi seiring dengan perkembangan dan penemuan teknologi informasi dan komunikasi, sistem PJJ dapat dirancang menjadi lebih individualistik

(*individualized*) dan desentralistik sesuai dengan tuntutan masyarakat baru.

Kebutuhan akan pendidikan bagi masyarakat era pasca industrialisasi, baik dari segi jenis maupun metode, telah berubah. Hal ini karena kompetensi yang dituntut oleh dunia kerja juga berubah dengan sangat pesat, seperti yang diungkapkan oleh Bardmann & Franzpotter (1990 dalam Peters, 1999) bahwa "*Today's production methods, communication technologies, perceptions of problems and problem solving strategies can be overdue and obsolete tomorrow*".

Oleh karena itu, substansi pendidikan menjadi harus ditekankan pada pelatihan keterampilan untuk belajar mandiri, untuk berkomunikasi, untuk bekerjasama dalam suatu tim, untuk memahami gejala sensitivitas sosial, untuk mengemban tanggung jawab sosial, untuk menjadi individu yang luwes/fleksibel, dan untuk memupuk pengalaman dalam bertindak fleksibel (Peters, 1999). Ini semua mencerminkan individualisasi dari substansi pendidikan. Dengan demikian, program pendidikan harus dirancang menjadi interaksi satu (rancangan program/kurikulum) lawan satu (peserta didik) dan bukan bersifat masal seperti pada awal praktik *correspondence study*.

Seiring dengan perubahan fenomena tersebut, paradigma akses ini kemudian mengalami pergeseran. Para pendidik yang berkecimpung dalam dunia PJJ kemudian mulai menekankan pentingnya interaksi dalam proses belajar jarak jauh untuk mempertahankan kualitas (Garrison, 1993). Pemikiran mengenai kualitas yang menjadi ciri paradigma kedua ini didasarkan pada asumsi bahwa pendidikan pada dasarnya merupakan suatu komunikasi dua arah, baik antara mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, maupun antara mahasiswa dengan pengelola; dan kualitas pendidikan dicerminkan oleh adanya serta tinggi rendahnya frekuensi interaksi/komunikasi tersebut. Diantara tokoh PJJ yang sejak awal menekankan pentingnya interaksi ini adalah Holmberg (1983, 1986) dan Sewart (1984).

Holmberg (1986:2) memandang PJJ sebagai:

“... various forms of study at all levels which are not under the continuous, immediate supervision of tutors present with their students in lecture rooms or on the same premises, but which, nevertheless, benefit from the planning, guidance and tuition of a tutorial organization”.

Kutipan tersebut jelas menyebutkan bahwa sistem PJJ terdiri dari komunikasi satu arah (presentasi materi ajar), baik dalam bentuk tercetak, terekam, maupun tersiar, dan komunikasi dua arah antara mahasiswa dan institusi penyelenggara program. Interaksi antara mahasiswa dan institusi ini (termasuk dengan tutor/dosen) sangat penting dalam proses belajar mahasiswa. Hal ini karena, menurut Holmberg, walaupun PJJ dirancang untuk belajar mandiri tetapi tidak berarti mahasiswa ditinggalkan tanpa layanan bantuan belajar.

Berdasarkan penelitiannya pada tahun 1983, Holmberg menyimpulkan bahwa walaupun interaksi dalam bentuk percakapan riil (*real conversation*) sangat sulit dilakukan pada PJJ, tidak berarti bahwa atmosfir percakapan/konversasi tersebut tidak dapat dihadirkan kepada mahasiswa. Ia kemudian mengembangkan konsep yang dikenal sebagai *guided didactic conversation* (Holmberg, 1983), yang pada dasarnya adalah konversasi (percakapan) dua arah dalam bentuk tertulis atau melalui telepon. Semangat menghadirkan atmosfir ini harus diterapkan baik dalam mendesain bahan ajar, tugas-tugas, maupun bantuan belajar. Dengan demikian, mahasiswa memperoleh ‘suasana’ seolah-olah bercakap-cakap dengan dosen pengembang bahan ajar, dan ini akan membantu proses internalisasi materi dalam proses belajar mahasiswa.

Guided didactic conversation diantaranya menekankan pentingnya: enam hal berikut ini.

1. Presentasi materi ajar yang jelas, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan tidak terlalu padat.
2. Petunjuk secara eksplisit tentang apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan, serta apa yang harus diperhatikan dan alasan-alasannya.

3. Desain yang mengundang mahasiswa untuk bertukar pikiran, bertanya, dan membuat pertimbangan-pertimbangan tentang materi apa yang harus difokuskan.
4. Upaya untuk memotivasi mahasiswa untuk mempunyai ketertarikan terhadap materi yang diajarkan.
5. Gaya penulisan materi yang *personalized*, seperti penggunaan bahasa orang pertama.
6. Batasan yang jelas pada pergantian tema/topik materi, seperti dengan menuliskan pergantian topik secara eksplisit, atau jika dalam bentuk terrekam (kaset), dengan pengisi suara yang berbeda.

Sejalan dengan Holmberg, Sewart (1984) menyoroti pentingnya interaksi antara mahasiswa dengan 'dosen' dalam PJJ. Menurut Sewart, bahan ajar yang diproduksi sebelum proses belajar mengajar (*pre-produced learning materials*) tidak mungkin dapat menggantikan fungsi dan peran dosen konvensional secara seratus persen. Lebih lanjut Sewart mengatakan bahwa ketiadaan umpan balik yang segera kepada mahasiswa jarak jauh dapat menjadi bumerang bagi hasil belajar mereka. Mahasiswa mempunyai kebutuhan yang berbeda yang kadang kala tidak secara langsung berhubungan dengan materi ajar, dan ini tidak mungkin diakomodasi oleh bahan ajar yang diproduksi secara masal. Oleh karena itu, Sewart menekankan pentingnya pelayanan bantuan belajar bagi mahasiswa.

Salah satu bentuk bantuan belajar tersebut adalah dengan penunjukan tutor-konselor, yang selain menjadi tutor mata kuliah juga mempunyai tanggung jawab untuk membimbing mahasiswa (baik secara akademik maupun non-akademik) dalam masa-masa awal studi mereka. Sewart percaya bahwa dengan adanya bantuan tutor-konselor yang akan berfungsi sebagai dosen dan pembimbing seperti dalam pendidikan konvensional, kualitas proses belajar pada PJJ dapat ditingkatkan.

Secara umum, dengan perkembangan dua paradigma tersebut, praktik PJJ selalu berusaha menyeimbangkan aspek akses dan kualitas (dalam arti intensifikasi interaksi). Peningkatan interaksi

untuk menjaga kualitas tidak berarti seratus persen melupakan aspek akses. Seperti telah diutarakan oleh Peters (1993), perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan diseimbangkannya aspek akses dan kualitas ini. Interaksi dua arah antara mahasiswa dengan institusi dan instruktur/tutor sekarang dengan “mudah” dan relatif cepat dapat dilakukan melalui media elektronik seperti *audio/video conferencing* dan *computer conferencing*. Dengan demikian, keterpisahan antara kegiatan mengajar (*teaching act*) dengan kegiatan belajar (*learning act*) yang menimbulkan suatu jarak psikologis dan komunikasi (*transactional distance*) dalam proses pembelajaran (Moore, 1993), dapat diminimalkan (Peters, 1993).

DARI PENDIDIKAN JARAK JAUH MENUJU PENDIDIKAN TERBUKA

Beragam kemudahan yang diberikan oleh teknologi juga telah memicu pemikiran yang lebih luas tentang PJJ. Konsep keterpisahan fisik antara kegiatan mengajar dengan kegiatan belajar pada metode PJJ telah membuka kemungkinan pemanfaatan sarana pendidikan secara lebih luas. Dengan tidak dilakukannya kegiatan mengajar dan belajar dalam waktu yang bersamaan, maka: (1) rasio ideal dosen-mahasiswa yang biasanya membatasi *daya serap* suatu program pendidikan dan (2) dinding kelas yang biasanya membatasi *daya tampung* program pendidikan dapat diabaikan. Kedua hal ini secara drastis mengubah fenomena pendidikan yang sifatnya tertutup menjadi lebih terbuka dalam arti fisik dan identifikasi pendidikan dengan ruang kelas menjadi mengabur.

Fenomena sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat dalam empat dekade terakhir juga telah menyebabkan pergeseran dalam pola kebutuhan akan pendidikan. Bila pada era masyarakat industri, sistem ini hanya merupakan jalan untuk memecahkan masalah pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil, maka pada era pasca industrialisasi (*post-industrial society*) ini telah jauh berkembang kearah peningkatan kualitas hidup manusia.

Pada era pasca industri, tujuan pendidikan masyarakat secara umum lebih berorientasi pada *self-realization* (pencarian diri) dan pemenuhan kebutuhan personal seperti untuk meningkatkan kebahagiaan dan kenikmatan hidup (Peters, 1993). Kebutuhan akan pendidikan tidak lagi hanya pada saat usia tertentu, tetapi menjadi kebutuhan yang berkelanjutan. Pendidikan kemudian tidak dipandang sebagai sesuatu yang terbatas pada individu usia 'sekolah'. Hal ini ditunjukkan dengan semakin populernya program-program pendidikan lanjutan non-formal maupun informal yang pada umumnya menawarkan program-program studi yang bersifat *leisure* dan tidak berakreditasi. Disamping itu, pesatnya perkembangan teknologi dan industri jasa juga mengakibatkan perubahan jenis dan bentuk keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja (Peters, 1999). Hal ini mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan pendidikan profesional yang berkelanjutan (*professional continuing education*). Dengan demikian, konsep PJJ sebagai sekedar *distance training* telah berubah menjadi *continuing education*.

Sistem PJJ kemudian menjadi tampak sebagai suatu metode yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai tujuan pendidikan, seperti tujuan peningkatan keterampilan profesi, pengembangan hobi, maupun pencarian identitas diri. Di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia dan Cina, dimana masyarakatnya banyak yang hidup dalam ekonomi terbatas dan di daerah pedesaan yang terisolasi, sistem PJJ juga merupakan metode pendidikan yang dianggap mampu untuk memberikan kesempatan kedua (*second chance*) bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan dengan sistem tatap muka. Fenomena ini telah menyuburkan perluasan sudut pandang mengenai sistem PJJ, dari sekedar suatu alternatif metode pembelajaran menjadi suatu sistem yang dapat meningkatkan keterbukaan pendidikan, suatu sistem yang dapat meminimalkan restriksi waktu, tempat, dan kendala ekonomi maupun demografi (seperti usia) seseorang untuk memperoleh pendidikan.

Pemasyarakatan dan pengakuan konsep pendidikan terbuka secara eksplisit dilakukan oleh UNESCO. Dalam deklarasinya, UNESCO (1996) mengemukakan bahwa “*Education is a basic human right and a universal human value and should be made available over the entire lifetime of each individual*”.

Konsep pendidikan sepanjang hayat (*life-long learning*) dan pendidikan untuk semua (*education of all*) yang dicetuskan dan dideklarasikan oleh UNESCO ini merupakan suatu ideologi yang menekankan pada keterbukaan pendidikan. Kedua konsep ini secara mendasar mengatakan bahwa setiap orang harus memperoleh kesempatan untuk belajar dan mendapatkan pendidikan sepanjang hayatnya.

MENINGKATKAN KETERBUKAAN: PERANCANGAN SISTEM DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI

Namun demikian, walaupun konsep pendidikan terbuka telah didengungkan dan dimasyarakatkan, belum ada penyelenggaraan PJJ yang seratus persen terbuka. Pada prakteknya, kebanyakan institusi yang menawarkan program PJJ masih tetap memberlakukan aturan yang mengurangi keterbukaan, terutama apabila institusi tersebut memberikan akreditasi bagi lulusannya.

Sistem PJJ ini dapat ditingkatkan keterbukaannya dengan merancang sistem pembelajaran secara lebih fleksibel (Belawati, 1999), seperti misalnya melalui: tiga cara berikut ini.

- *Open entry – open exit system*: artinya setiap individu boleh memulai dan menyelesaikan proses pendidikannya kapan saja sesuai dengan kondisi masing-masing.
- *No selection criteria*: artinya setiap orang yang mendaftar akan diterima sepanjang mempunyai kualifikasi dasar minimal yang dapat menunjang proses pendidikan yang diikutinya. Misalnya, tidak ada batas usia, tidak ada batas tahun ijazah terakhir.
- *Open Registration System*: artinya setiap individu boleh melakukan registrasi secara terbuka, apakah untuk suatu program penuh (seperti program sertifikat, diploma, ataupun sarjana) atau untuk mata kuliah tertentu saja. Sistem registrasi

terbuka ini juga harus memungkinkan mahasiswa menabung kredit matakuliahnya sehingga jika mau suatu waktu dapat diakumulasikan untuk suatu program utuh.

Dengan kata lain, perancangan sistem penyelenggaraan yang memperhatikan ketiga butir di atas akan meningkatkan keterbukaan program PJJ yang ditawarkan. Perancangan sistem yang terbuka seperti contoh di atas telah banyak dilakukan oleh institusi-institusi PJJ di luar negeri, terutama oleh institusi yang menawarkan programnya melalui jaringan internet (*web-based courses*). Semakin meningkatnya *trend* penawaran program PJJ melalui internet ini menunjukkan bahwa permintaan masyarakat (yang mencerminkan kebutuhan masyarakat) akan pendidikan sangatlah tinggi.

Dalam sejarah penggunaan teknologi untuk kepentingan pendidikan, PJJ selalu yang terdepan dan saat ini telah memasuki generasi kelima, yaitu generasi yang mengeksplorasi kemampuan teknologi internet dan jaringan (Taylor, 2000). Taylor (2000) menggambarkan kronologis pemanfaatan teknologi dalam dunia PTJJ secara sistematis. Tabel 1 menunjukkan matriks karakteristik teknologi yang digunakan dengan generasi PTJJ.

Tabel 1. Matriks Karakteristik Teknologi dalam Generasi PTJJ*

Model Pendidikan Jarak Jauh dalam Kaitannya dengan Teknologi yang Digunakan	Karakteristik Teknologi			
	Fleksibilitas			Interaktivitas dalam Penyampaian Materi
	Waktu	Tempat	Kecepatan	
Generasi 1 - Model Korespondensi				
• Cetak	Ya	Ya	Ya	Tidak
Generasi 2 - Model Multi Media				
• Cetak	Ya	Ya	Ya	Tidak
• Kaset Audio	Ya	Ya	Ya	Tidak
• Kaset Video	Ya	Ya	Ya	Tidak
• <i>Computer-based learning (eg CML/CAL)</i>	Ya	Ya	Ya	Ya
• Video Interaktif (<i>disk</i> dan kaset)	Ya	Ya	Ya	Ya
Generasi 3 - Model <i>Telelearning</i>				
• Konferensi Audio Jarak Jauh	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
• Konferensi Video Jarak Jauh	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
• Audio Grafis	Tidak	Tidak	Tidak	Ya

Model Pendidikan Jarak Jauh dalam Kaitannya dengan Teknologi yang Digunakan	Karakteristik Teknologi			
	Fleksibilitas			Interaktivitas dalam Penyampaian Materi
	Waktu	Tempat	Kecepatan	
<ul style="list-style-type: none"> • Siaran TV/Radio dan Konferensi Audio Jarak Jauh 	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Generasi 4 - Model Pembelajaran Fleksibel				
<ul style="list-style-type: none"> • Multimedia interaktif 	Ya	Ya	Ya	Ya
<ul style="list-style-type: none"> • Berbasis Internet dan sumber belajar pada <i>the world wide web</i> (WWW) 	Ya	Ya	Ya	Ya
<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi melalui komputer (<i>Computer mediated communication</i>) 	Ya	Ya	Ya	Ya
Generasi 5 - Model Pembelajaran Fleksibel Cerdas				
<ul style="list-style-type: none"> • Multimedia interaktif 	Ya	Ya	Ya	Ya
<ul style="list-style-type: none"> • Berbasis Internet dan sumber belajar pada <i>the world wide web</i> (WWW) 	Ya	Ya	Ya	Ya
<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi melalui komputer (<i>Computer mediated communication</i>) via sistem respon otomatis (<i>automated response system</i>) 	Ya	Ya	Ya	Ya

* Tabel diterjemahkan dan diadaptasi dari Taylor (2000)

Seperti terlihat dalam Tabel 1, generasi pertama adalah generasi pendidikan korespondensi yang merupakan sistem pendidikan belajar mandiri oleh mahasiswa dengan media utama bahan ajar cetak, khususnya Panduan Belajar dan tugas-tugas yang dikirimkan oleh instruktur melalui pos. Oleh karena itu, program-program pendidikan pada generasi ini biasa disebut sebagai *correspondence study*. Generasi kedua merupakan generasi PTJJ yang dicirikan dengan pemanfaatan teknologi audio dan video, serta teknologi yang lebih interaktif seperti *computer-based learning* dan video interaktif. Pada generasi inilah lahir Universitas Terbuka (*Open University*) di Inggris pada tahun 1969. The United Kingdom Open University (UKOU) yang juga merupakan model universitas terbuka pertama di dunia melahirkan generasi ketiga yang dicirikan dengan digunakannya teknologi siaran dan rekaman (terutama dengan media penyebaran melalui televisi, radio, dan kaset

audio/video), telekonferensi audio dan video (*audio/video teleconferencing*), serta komunikasi audio-grafik (Taylor, 2000). Sedangkan generasi keempat yang dimulai sejak awal tahun 1990-an, dicirikan dengan penggunaan jaringan Internet dan Intranet yang sangat ekstensif, terutama untuk kepentingan interaksi melalui apa yang disebut *computer-mediated communication* (Taylor, 2000). Generasi keempat yang dikenal sebagai generasi pembelajaran fleksibel (*Flexible Learning Model*) ini terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, dan telah melahirkan generasi berikutnya yang mengintegrasikan semua kemampuan teknologi sebelumnya, sehingga melahirkan suatu *automated response system*. Generasi kelima yang kemudian disebut sebagai model pembelajaran fleksibel yang lebih cerdas (*The Intelligent Flexible Learning Model*) oleh Taylor (2000) ini juga dicirikan dengan pengembangan portal institusi penyelenggara PTJJ untuk meningkatkan akses peserta didiknya terhadap sumber dan layanan bantuan belajar. Pada generasi PTJJ keempat dan kelima inilah lahir jargon yang sangat populer di masyarakat seperti *e-learning* dan *mobile, learning* yang lebih memasyarakatkan lagi fenomena PTJJ ke kalangan yang sebelumnya tidak pernah memandang sebelah mata pada sistem PTJJ. Hal ini karena integrasi pemanfaatan satu bentuk teknologi informasi dan komunikasi dengan bentuk teknologi informasi dan komunikasi lainnya memungkinkan sistem pembelajaran pada PTJJ dirancang menjadi interaktif, *personalized*, namun tetap memiliki daya jangkauan yang luas. Tabel 1 juga memperlihatkan bahwa teknologi pada generasi keempat dan kelima.

Walaupun demikian, penggunaan teknologi canggih yang semakin meningkat tidak meninggalkan penggunaan bahan ajar cetak (*printed materials*) secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa penggunaan bahan ajar cetak masih tetap mendominasi metode penyampaian materi ajar utama di banyak institusi PJJ

(Brigham, 1999)¹. Teknologi tinggi lainnya pada umumnya digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan komunikasi dan pemberian pelayanan bantuan belajar kepada mahasiswa, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih interaktif.

Perpaduan antara perancangan sistem dan pemanfaatan teknologi tinggi tidak dapat dipungkiri telah mampu meningkatkan keterbukaan sistem pendidikan. Namun demikian, perpaduan ini tetap belum dapat sepenuhnya menghilangkan isu tarik menarik antara aspek akses dan aspek kualitas yang melandasi dua paradigma PJJ. Tarik menarik antara dua aspek ini pada akhirnya bermuara pada pemilihan media atau teknologi yang dapat menjembatani keduanya. Karena, walaupun saat ini terdapat banyak teknologi canggih yang mampu memfasilitasi interaksi, namun di banyak negara seperti Indonesia, akses masyarakat luas terhadap teknologi tingkat tinggi tersebut masih terbatas.

Setiap teknologi/media mempunyai kemampuan yang berbeda dalam hal mengakomodasi kepentingan akses dan interaksi ini. Buku teks dan televisi misalnya, memiliki daya jangkauan yang luas namun kurang mampu memfasilitasi interaksi 'dosen' dan mahasiswa. Sebaliknya, audio/video/computer conferencing memiliki kemampuan tinggi untuk memfasilitasi komunikasi dua arah untuk 'dosen' dan mahasiswa, tetapi daya jangkauannya relatif terbatas mengingat peralatan yang diperlukannya (Bates, 1995). Oleh karena itu, salah satu kegiatan penting dalam perencanaan PJJ adalah pengambilan keputusan dalam hal pemanfaatan jenis teknologi/media, yaitu mencari media yang dapat meningkatkan intensitas serta kualitas interaksi tetapi tidak terlalu mengorbankan kepentingan untuk meningkatkan daya jangkauan program pendidikan.

¹ Survey menunjukkan bahwa 66% dari 9472 *courses* yang ditawarkan secara jarak jauh di Amerika Serikat masih menggunakan bahan ajar utama dalam bentuk tercetak (*printed materials*).

PENUTUP

Pendidikan terbuka dan jarak jauh sebagai suatu konsep merupakan hasil perkembangan konsep dan praktek PJJ yang berakar pada *correspondence study* di era masyarakat industri. Sistem PJJ, baik yang dilandasi paradigma akses maupun kualitas (interaksi), mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan masyarakat pada era pasca-industri. Pada era ini, kebutuhan masyarakat pendidikan lebih berorientasi pada *self-realization* dan pemenuhan kebutuhan personal. Disamping itu, pesatnya perkembangan teknologi juga meningkatkan kebutuhan akan pendidikan profesional yang berkelanjutan. Perubahan orientasi pendidikan pada pendidikan yang berkelanjutan ini melahirkan konsep pendidikan yang lebih terbuka yang dapat mengakomodasi proses belajar sepanjang hayat dan bagi semua. Teknologi informasi dan komunikasi yang kian berkembang merupakan salah satu prasarana yang dapat meningkatkan intensitas interaksi dalam proses belajar jarak jauh. Namun demikian, di banyak negara, peningkatan intensitas interaksi melalui pemanfaatan teknologi canggih juga dapat menurunkan akses masyarakat terhadap program pendidikan tersebut. Oleh karena itu, pemilihan teknologi tepat guna, disamping perancangan sistem pembelajaran, merupakan hal terpenting yang akan mempengaruhi tingkat keterbukaan suatu program PJJ. Secara konseptual, sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh merupakan suatu sistem pendidikan yang dirancang dan dimaksudkan untuk mengatasi kendala jarak (baik dalam pengertian waktu maupun tempat), ekonomi, maupun karakteristik demografi, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada semua orang untuk belajar sepanjang hayat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bates, A.W. 1995. *Technology, open learning, and distance education*. New York: Routledge.
- Belawati, T. 1999. Sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh: Suatu reformasi pola pikir. *Technical paper presented at the*

*Seminar Pendidikan Jarak Jauh Dalam Reformasi Pendidikan
(Seminar on Distance Education in Educational Reform),
Graduation I-1999 Universitas Terbuka.*

- Brigham, D. E. 1999. U.S. distance courses: what's out there? what's hot? what's not?. *Proceeding of the 19th World Conference on Open Learning and Distance Education*, Vienna, June 20-24.
- Daniel, J. S. 1997. *Mega-universities and knowledge media. Technology strategies for higher education*. Great Britain: Kogan Page.
- Garrison, D. R. 1993. Quality and access in distance education: Theoretical considerations. Dalam D. Keegan (Ed.), *Theoretical principles of distance education*, pp. 9-21. New York: Routledge.
- Holmberg, B. 1983. Guided didactic conversation in distance education. Dalam D. Stewart, D. Keegan, dan B. Holmberg (Eds.), *Distance education: International perspectives*, pp. 114-210. New York: Croom Helm.
- Holmberg, B. 1986. *Growth and structure of distance education*. New Hampshire: Croom Helm.
- Moore, M. G. 1993. Theory of transactional distance. Dalam D. Keegan, *Theoretical principles of distance education*, pp. 22-38. New York: Routledge.
- Moore, M. G. and Kearsley, G. 1996. *Distance education. A system View*. Toronto: Wadsworth Publishing.
- Peters, O. 1867. Distance education and industrial production: A comparative interpretation in outline. Dalam D. Keegan (Ed.), 1993, *Otto Peters on distance education. The industrialization of teaching and learning*, pp. 107-127. New York: Routledge.
- Peters, O. 1993. Distance education in post-industrial society. Dalam D. Keegan (Ed.), 1993, *Otto Peters on distance education. The industrialization of teaching and learning*, pp. 220-240. New York: Routledge.
- Peters, O. 1999. The university of the future - pedagogical perspectives. *Proceeding of the 19th World Conference on Open Learning and Distance Education*, Vienna, June 20-24.

- Sewart, D. 1984. Individualizing support services. Dalam J.S. Danel, M. A. Stroudh, & J. R. Thompson, John R. (Eds.), *Learning at a distance: A world perspective*, pp. 27-29. Edmonton, Alberta: Athabasca University.
- Taylor, J. C. 2000. *New millennium distance education*. Available at URL,
<http://www.google.com/search?q=Distance+education+generation&hl=en&lr=&rls=GGLR,GGLR:2006-22,GGLR:en&start=0&sa=N>
- UNESCO. 1996. *Re-engineering education for change: Educational innovation for development. Report of the Second UNESCO-ACEID International Conference, Bangkok, 9-12 December, 1996*. Bangkok: UNESCO Regional office for Asia and the Pacific.

MODEL KELEMBAGAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH: PERKEMBANGAN HISTORIS DAN KECENDERUNGAN KE DEPAN

**Aminudin Zuhairi
Sunu Dwi Antor
Lidwina Sri Ardiasih**

Pendidikan jarak jauh (PJJ) merupakan bidang kajian kependidikan yang berkembang pesat dan perwujudannya beragam dalam beberapa model. Model-model PJJ berkembang karena beragam faktor yang terkait dengan sejarah, filosofi, politik dan kebijakan pemerintah, geografi dan demografi, ekonomi, serta landasan teknologi (Zuhairi, 1998). Sekalipun secara rinci ada banyak ragam model, dalam garis besar PJJ dapat dikelompokkan menjadi tiga model, yaitu *single mode*, *dual mode*, dan konsorsium (Perry & Rumble, 1987; Holmberg, 1995; Curran, 1992). Istilah *single mode* dan *dual mode* boleh diIndonesiakan menjadi 'model modus tunggal' dan 'model modus ganda', namun dalam tulisan ini istilah asli dalam bahasa Inggris tetap dipergunakan untuk memudahkan konsepsi dan asosiasi kita. Artikel ini membahas ketiga model tersebut dan melihat tantangan, peluang serta prospeknya sekarang dan di masa depan.

MODEL *SINGLE MODE*

Model *single mode* dipelopori oleh kisah sukses *The United Kingdom Open University* (UKOU), yang mulai beroperasi pada tahun 1971. Model ini kemudian dianut banyak negara, termasuk negara berkembang dengan jumlah penduduk besar seperti Indonesia yang mendirikan Universitas Terbuka (UT) pada tahun 1984. Model *single mode* memadukan pemanfaatan bahan cetak dan media siaran dalam pembelajaran jarak jauh. Model ini dikembangkan atas dasar pemikiran bahwa pendekatan universitas konvensional dalam menerapkan PJJ tidak memadai. Kebutuhan dan syarat yang

dikehendaki siswa jarak jauh akan dapat dilayani secara lebih baik jikalau suatu lembaga dikembangkan hanya untuk menampung dan memberikan pelayanan kepada siswa jarak jauh saja (Rumble, 1986). Model ini telah berhasil diterapkan di berbagai sektor pendidikan dengan didirikannya lembaga seperti politeknik terbuka, sekolah menengah pertama terbuka, lembaga pendidikan swasta komersial terbuka, dan universitas terbuka.

Model *single mode* memiliki karakteristik umum sebagai berikut. Kurikulum dirancang berdasarkan sistem satuan kredit semester dan bahan ajar modular. Pengembangan dan produksi bahan ajar dilakukan secara tersentralisasi. Bahan ajar dirancang sesuai dengan kebutuhan orang dewasa yang sudah bekerja dan belajar mandiri secara jarak jauh. Pertemuan tatap muka dipergunakan untuk membantu penguasaan bahan ajar. Studi Guiton (1992) lebih lanjut menunjukkan bahwa model ini umumnya memiliki keterbatasan dalam ekonomi skala dan profil akademik. Pendekatan *course-team* dipergunakan dalam pengembangan bahan ajar, dan multimedia dimanfaatkan secara terpadu dalam penyampaian bahan ajar. Model ini memiliki ketergantungan pada lembaga lain untuk penyediaan pusat sumber belajar, siswa, dan mempekerjakan tutor paruh waktu. Bagi siswa ada keterikatan untuk menjadi siswa jarak jauh saja tanpa ada kluwes untuk memilih metode belajar lain.

Pada model *single mode*, pembelajaran, pengujian dan akreditasi merupakan fungsi terpadu. Lembaga melayani siswa jarak jauh saja sehingga staf akademik tidak mengalami konflik loyalitas terhadap siswa tatap muka dan jarak jauh. Iklim semacam ini menciptakan motivasi yang kuat di antara staf untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas metode PJJ, bebas dari hambatan pembelajaran konvensional. Lembaga lebih leluasa dalam merancang program untuk kelompok target tertentu, dan melakukan eksplorasi terhadap potensi maksimum metode PJJ. Ada lebih banyak keleluasaan bagi lembaga dalam memilih metode pembelajaran, media, kurikulum, struktur program, prosedur ujian dan kebijakan akreditasi (Kaye, 1981).

Namun demikian tetap ada keterbatasan dalam keleluasaan yang dimiliki model *single mode*. Lembaga semacam ini masih mempunyai masalah kredibilitas dan akseptabilitas di kalangan masyarakat karena penyimpangannya dari sistem pendidikan tradisional. Misalnya, masyarakat masih cenderung memandang remeh lulusan universitas terbuka, dibandingkan lulusan universitas konvensional atau *the Ivy League* yang sudah mapan. Di Indonesia, mahasiswa Universitas Terbuka (UT) yang baru lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) adalah mereka yang tidak diterima di perguruan tinggi negeri bergengsi atau tidak mampu menjangkau perguruan tinggi swasta yang mahal. Masyarakat umumnya cenderung mengira bahwa secara akademik mahasiswa UT adalah mahasiswa kelas dua.

Namun demikian, contoh dari beberapa praktik yang telah dilakukan telah menumbuhkan kesan, kepercayaan, dan kredibilitas dari masyarakat terhadap sistem PJJ yang menerapkan *single mode*. Sebagai contohnya, *Open University of United Kingdom (UKOU)* telah masuk ke jajaran tertinggi pada pelayanan belajar mengajar bagi mahasiswa. Pelaksanaan sistem jaminan kualitas dan usaha peningkatan yang dilakukan secara berkesinambungan telah meningkatkan kualitas dan pelaksanaan pendidikan dengan sistem jarak jauh dan meningkatkan kepercayaan diri masyarakat terhadap sistem tersebut.

Kritikan pun dilontarkan terhadap gagasan 'keterbukaan', yang mengandung paradoks dan kontradiksi dalam lembaga PJJ model ini. Gagasan 'keterbukaan' sebagaimana diterapkan pada sistem universitas terbuka berlaku sekaligus 'keterbukaan dan tertutupan' (*openness and closure*), artinya keterbukaan dalam satu aspek mengandung kontradiksi tertutupan pada aspek lainnya (Harris, 1987). Dampak prosedur PJJ pada sebuah universitas 'terbuka' mengandung kecenderungan 'tertutup'. Sekalipun siswa PJJ terbuka untuk mendaftarkan diri pada waktu kapan saja, kesempatan mereka masih relatif 'tertutup', misalnya ia harus mengikuti ujian, mendengarkan siaran radio, menonton siaran program televisi pendidikan, mengikuti jadwal ujian sesuai jadwal pada waktu yang

telah ditentukan oleh lembaga yang bersangkutan. Lebih jauh lagi, seseorang yang telah mendapatkan gelar dari suatu universitas terbuka membuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan menutup peluang tersebut bagi yang tidak memiliki gelar.

Model *single mode* relatif mahal untuk dikembangkan dan menghendaki jumlah siswa besar agar secara ekonomis layak. Model ini memerlukan nilai investasi awal yang besar untuk prasarana dan pengembangan bahan ajar. Namun biaya ini dapat dirata-rata selama beberapa tahun sehingga biaya tiap siswa lebih murah dibandingkan pada universitas konvensional, asalkan jumlah siswa cukup besar. Pada dasarnya program PJJ lebih murah daripada program pendidikan konvensional. Namun model *single mode* memiliki tantangan ekonomi dan manajemen pada lembaga dengan jumlah siswa kecil sehingga diperlukan sistem manajemen dan administrasi yang ketat.

Sebagai lembaga yang menerapkan model *single mode*, UT memiliki karakteristik khas sesuai konteks dan kebutuhan Indonesia. Sistem UT ditandai dengan dominasi budaya industri yang kuat dan birokrasi yang terpusat. Budaya manajemen sangat menonjol sehingga UT perlu mengambil nilai pokok dalam manajemen bisnis. Budaya perusahaan UT adalah sebagai 'universitas pengelola' (*management university*) yang memanfaatkan sumber daya yang ada pada lembaga dan universitas lain. Pemanfaatan teknologi baru masih sangat terbatas, karena daya jangkau siswa maupun kemampuan lembaga yang terbatas. Mahasiswa UT belajar dari bahan cetak yang menjadi sumber utama, dan sesekali mengikuti siaran televisi, radio, serta tutorial atau kelompok belajar atas inisiatif sendiri. Mahasiswa Program Penyetaraan Guru lebih beruntung karena mereka memperoleh kesempatan tutorial yang jauh lebih banyak, karena partisipasi dalam tutorial merupakan prasyarat Program tersebut. Jumlah mahasiswa yang besar, melebihi 400.000, memungkinkan biaya rata-rata per mahasiswa menjadi sangat kecil, sehingga UT mampu bersaing sebagai universitas dengan iuran sumbangan pendidikan (SPP) yang murah. Oleh karena itu, UT dapat menjalankan fungsinya secara efektif untuk

memperluas kesempatan, meningkatkan akses, dan meningkatkan partisipasi dalam pendidikan universitas bagi masyarakat Indonesia.

MODEL *DUAL MODE*

Banyak program PJJ dikembangkan di universitas yang menerapkan model *dual mod*, dengan mendirikan suatu unit atau divisi khusus yang menangani siswa jarak jauh. Dalam model ini ada dua kelompok siswa, yaitu mereka yang belajar secara tatap muka di kelas, dan mereka yang belajar secara jarak jauh tanpa atau dengan syarat tatap muka yang sangat minimum. Dua kelompok siswa ini secara teoritis mendapatkan pelayanan yang sebanding dari lembaga, sekalipun kenyataannya mahasiswa tatap muka memiliki lebih banyak kemudahan dalam hal akses ke berbagai sumber belajar di kampus. Secara historis, model *dual mode* dipergunakan untuk menangkal kecurigaan terhadap PJJ sebagai menurunkan standar pendidikan. Kesamaan penghargaan antara pembelajaran tatap muka dan jarak jauh dapat dicapai dengan menugaskan staf akademik yang sama mengajar dan menguji dua kelompok siswa yang berbeda. Keduanya mendapatkan gelar yang sama, sekalipun metode pembelajaran mereka berbeda. Negara seperti Australia dan New Zcland adalah pelopor penerapan model *dual mode* untuk pendidikan tinggi.

Pada universitas *dual mode*, dua kelompok mahasiswa memiliki karakteristik yang sangat berbeda dalam banyak hal. Mahasiswa tatap muka umumnya lebih muda dan mengikuti pendidikan universitas langsung setelah menamatkan sekolah menengah. Mahasiswa jarak jauh umumnya lebih tua, lebih kaya dalam pengalaman hidup maupun pekerjaan, memiliki keluarga, serta komitmen lainnya. Banyak di antara mereka bahkan tidak menamatkan sekolah menengah atas dan mereka masuk universitas melalui skema 'matang usia', yang dimungkinkan terjadi di negara maju. Banyak orang beranggapan bahwa mahasiswa jarak jauh merupakan mahasiswa 'kelas dua', sebagaimana banyak orang beranggapan bahwa PJJ adalah upaya menyediakan pendidikan 'peluang kedua'. Sebelum diperkenalkannya sistem universitas

terbuka, cara yang dapat diterima untuk memberikan kesempatan kepada orang dewasa yang sudah bekerja untuk belajar di perguruan tinggi adalah melalui program jarak jauh yang diselenggarakan oleh lembaga konvensional.

Model ini memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki model *single mode*. Model *dual mode* memiliki landasan dan keterpautan yang kuat karena staf akademik bertanggung jawab penuh dalam proses belajar dan pembelajaran, penulisan bahan ajar, menggunakan kombinasi bahan belajar mandiri dan pertemuan tatap muka dan evaluasi siswa. Penyampaian bahan, sistem pembelajaran dan layanan yang diberikan berbeda sesuai dengan syarat khusus yang dikehendaki masing-masing sistem pembelajaran atau kelompok siswa. Model ini memungkinkan terjaganya kesamaan penghargaan dan gelar terhadap siswa tatap muka dan jarak jauh. Dalam model ini ada integrasi pembelajaran tatap muka dan jarak jauh sehingga menjamin standar pendidikan, legitimasi, dan kredibilitas. Sistem *dual mode* memungkinkan penawaran program atau matapelajaran yang bervariasi dan memungkinkan staf akademik untuk bekerja dalam lingkungan yang berorientasi pada penelitian, disamping pendidikan dan pengabdian pada masyarakat. Model ini memberikan penekanan pada interaksi dan komunikasi, baik secara tatap muka maupun melalui media.

Beberapa kritikan dilontarkan terhadap model *dual mode*. Keterbatasan waktu untuk pengembangan bahan ajar menjadi masalah utama, karena staf akademik bertanggung jawab mengajar tatap muka pula. Banyak diantara staf tidak melewati pendidikan dan pelatihan formal dalam bidang pengembangan bahan ajar jarak jauh. Ada keterbatasan pemanfaatan sumber daya untuk perbaikan kualitas bahan ajar dan pengembangan dalam skala besar variasi media dan teknologi untuk siswa jarak jauh karena secara bersamaan lembaga harus memanfaatkan sumber dayanya yang terbatas untuk pembelajaran tatap muka. Sekalipun demikian banyak lembaga *dual mode* telah berupaya dan berhasil meningkatkan investasi dan pemanfaatan media dan teknologi, serta menerapkan metode yang lebih sistematis dalam pengembangan bahan ajar. Penerapan

kebijakan kendali mutu bagi seluruh program PJJ merupakan dilema bagi model *dual mode*, karena program PJJ pada lembaga konvensional sering dianggap sebagai produk sampingan. Selain itu ada faktor pembatas untuk mempertahankan dua sistem pembelajaran tatap muka dan jarak jauh berlaku efektif (Zuhairi, 1998).

Bagi kalangan pendidikan di Indonesia, model *dual mode* masih belum banyak dikenal, dan masih perlu diamati dan diteliti lebih lanjut perkembangannya. Secara peraturan dimungkinkan suatu lembaga pendidikan tinggi konvensional di Indonesia menyelenggarakan program tatap muka dan jarak jauh. Namun sampai saat ini belum banyak lembaga konvensional yang mencoba menerapkan PJJ. Banyak lembaga di Indonesia memilih membuka kelas jauh dengan sistem tatap muka. Ini menandakan bahwa sebenarnya PJJ belum begitu dikenal oleh kalangan akademik di kampus konvensional, yang mestinya diharapkan lebih dapat bersikap dan bertindak inovatif, terbuka terhadap gagasan dan penemuan baru dalam pemanfaatan teknologi atau metode baru, termasuk metode PJJ.

Didukung adanya kemajuan penggunaan ICT pendidikan tinggi dan kebutuhan pengampu kepentingan, kemajuan terkini dalam pendidikan tinggi jarak jauh telah diterapkan di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, seperti: Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gajah Mada (UGM), dan Universitas Pajajaran (UNPAD) (Panen, 2006). Perkembangan terkini dalam penggunaan sistem PJJ dipendidikan tinggi Indonesia telah dilaporkan oleh Pannen (2006) sebagai berikut. Dalam berkolaborasi dengan universitas publik yang berlokasi di tempat terpencil, UI telah mengembangkan sistem pendidikan berbasis e-mail, bertujuan mengembangkan pelayanan pendidikannya terhadap mahasiswa berpotensi yang tersebar di berbagai lokasi geografis, sebagai bagian dalam memperluas akses pendidikan tinggi, dan membuat tersedianya pendidikan yang berkualitas dan relevan bagi masyarakat Indonesia. ITB telah berinisiatif membentuk sekolah berbasis internet di ASIA (SOI

Asia), sebuah proyek yang didanai oleh pemerintah Jepang yang memfokuskan pada pendidikan bersama di Asia, memfokuskan pada universitas sebagai kesatuan untuk membentuk suatu kolaborasi berdasarkan pada timbulnya tuntutan yang tinggi pada kerjasama pendidikan tinggi, pengembangan internet, dan nilai kebersamaan di bidang pendidikan yang cukup tinggi diantara berbagai negara multi kultural di Asia. UGM telah mengembangkan program belajar inovatif dan cerdas di UGM (SMILE@UGM), menggunakan sebuah pendekatan belajar baru untuk memperbaiki kualitas pendidikan, berdasarkan pada spirit pendidikan berkualitas untuk semua. UNPAD telah mengembangkan *e-learning* berbasis jaringan pengetahuan untuk meningkatkan fleksibilitas dalam belajar mengajar, meningkatkan kesempatan berkomunikasi, dan menyediakan akses yang luas kepada siswa sumber belajar yang kaya dan bervariasi. Meskipun belum begitu jauh pembelajaran jarak jauh di universitas, ilustrasi ini menunjukkan beberapa bukti yang konstruktif dalam kesadaran akan masyarakat akademik dan pertumbuhan daya tarik masyarakat untuk menggunakan system PJJ di universitas di Indonesia. Akan tetapi, tetap dilihat bagaimana inisiatif-inisiatif dalam PJJ dapat bertahan dan berkembang lebih maju melalui perguruan tinggi tersebut, dan bagaimana orang lain dapat mengikutinya.

Institusi pendidikan tinggi Indonesia pada umumnya tidak memiliki pengalaman praktik PJJ, dan mereka seharusnya belajar dengan cepat dan intensif dari UT, dari berbagai pelaksanaan praktik PJJ di berbagai Negara lain. Mungkin, pemerintah tidak hanya memfasilitasi tetapi memberikan peraturan dan dana yang diperlukan untuk mengembangkan kualitas pendidikan tinggi sistem jarak jauh dapat diakses oleh pengampu kepentingan. Hal ini bersinerji dengan kebijakan pendidikan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan daya saing bangsa dan membawa Indonesia ke dalam masyarakat modern berbasis pengetahuan.

MODEL KONSORSIUM

Berbagai tekanan dan tuntutan untuk penyelenggaraan program jarak jauh yang efisien menjadikan beberapa lembaga PJJ bekerja sama melalui konsorsium. Tujuan pembentukan konsorsium pada umumnya adalah untuk mencapai efisiensi dan ekonomi skala. Beberapa lembaga pendidikan memandang perlu untuk membentuk konsorsium di tingkat regional, nasional, atau wilayah tertentu agar distribusi bahan ajar lebih efisien, dan tercapai konsistensi dalam pemberian kredit. Lembaga berskala kecil mendapati bahwa mengembangkan program PJJ sangat mahal, dan bahkan lebih mahal lagi untuk memproduksi dan mendistribusikan program.

Konsorsium dapat pula terbentuk bilamana ada kerjasama beberapa lembaga pendidikan, penerbitan, dan siaran yang setuju untuk bergabung dan menawarkan program PJJ. Konsorsium merupakan gagasan yang sangat bagus, sayangnya seringkali sulit diterapkan. Birokrasi lembaga dan ragam iklim organisasi sering menjadi hambatan kerjasama. Selain itu perbedaan filosofi pendidikan, hambatan teknis, serta tekanan keuangan menjadikan kerjasama sulit terwujud. Beberapa lembaga pendidikan seperti universitas dapat saja bekerja sama membentuk konsorsium sebagaimana dilakukan di Irlandia, Perancis dan Italia (Curran, 1992). Kekuatan suatu konsorsium terletak pada komitmen untuk melaksanakan pekerjaan tertentu bagi lembaga anggota yang memiliki kesulitan dalam melaksanakan tugas secara mandiri.

Sekalipun terdapat indikasi yang jelas tercapainya peningkatan efisiensi dan keuntungan ekonomi, pada mulanya tidak begitu banyak konsorsium dapat terbentuk. Namun saat ini ada kecenderungan bahwa bentuk ini merupakan suatu alternatif rasional. Beberapa contoh konsorsium adalah *Open Learning Agency* (OLA) di British Columbia, Canada, yang melibatkan sejumlah lembaga untuk menawarkan program PJJ di kawasan propinsi tersebut. Contoh lain adalah *Open Learning Agency of Australia* yang bekerja sama dengan sejumlah lembaga perguruan tinggi di seluruh Australia dan menawarkan program PJJ di negara tersebut. Badan ini berperan pula dalam mempermudah proses alih

kredit.

Perkembangan berikutnya dalam model PJJ ini adalah terbentuknya *network*, yaitu suatu jaringan kerjasama yang berperan mengkoordinasikan dan melengkapi program PJJ lembaga lain (Holmberg, 1995). Jaringan tersebut dapat berfungsi mengembangkan bahan ajar, menyediakan layanan penelitian atau dokumentasi PJJ untuk organisasi lain. Pada dasarnya penyelenggaraan PJJ tidak dapat lepas dari pembentukan jaringan kerjasama.

Menyimak kecenderungan yang terjadi, barangkali pemerintah Indonesia saat ini perlu mempertimbangkan pendirian sebuah badan jaringan kerjasama nasional. Badan PJJ nasional ini memiliki wewenang khusus membantu pengelolaan dan penyediaan PJJ serta mempermudah proses alih kredit antar lembaga di berbagai sektor pendidikan dan pelatihan. Badan ini bertugas pula menjalin jaringan kerjasama antara lembaga penyedia PJJ secara nasional serta regional, sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif. Penyelenggaraan program PJJ menjadi terorganisasi dan terkoordinasi dengan baik sehingga tidak terjadi duplikasi penawaran program yang sama oleh beberapa lembaga.

Jaringan bahkan perlu dikembangkan lebih lanjut secara nyata di tingkat regional. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah berupaya membangun jaringan kerja sama di bidang PJJ melalui pendirian Pusat PJJ (SEAMOLEC). Untuk bidang pendidikan tinggi, sebelumnya telah ada upaya mendirikan *ASEAN University* (De Jesus, Hok & Taroepratjeka, 1992), dan gagasan ini kemudian diperbaharui melalui *ASEAN University Network* (1995). Namun sampai saat ini bentuk pelaksanaannya masih perlu diperjelas dan ditingkatkan. Pendidikan tinggi di kawasan ASEAN menghadapi masalah akses, ekspansi dan pemerataan kesempatan yang kurang lebih serupa. PJJ berpeluang besar mampu menjawab tantangan tersebut dan mewujudkan terciptanya jaringan kerja sama antar universitas di kawasan ASEAN dalam kerangka yang saling menguntungkan, saling melengkapi, saling membantu serta efisien, sejalan dengan prinsip kebersamaan dan keceratan budaya bangsa-

bangsa Asia Tenggara.

Perkembangan terbaru penggunaan mode. Pada tahun 2001 Universitas Terbuka Malaysia (OUM) diluncurkan oleh pemerintah Malaysia sebagai universitas swasta ketujuh, dimiliki oleh konsorsium dari 11 universitas negeri di Negara tersebut. OUM dimulai dengan sejumlah 700 orang mahasiswa pada tahun 2001, dan pada tahun 2007 telah melampaui 38.000 orang mahasiswa di 41 program akademik (OUM, 2007). Baru-baru ini pada awal 2007 sebagai bagian dari upaya percepatan penyetaraan kualitas guru, pemerintah Indonesia telah memfasilitasi terbentuknya konsorsium PJJ yang terdiri dari 10 perguruan tinggi (Kompas, 2007). Kemudian baru-baru ini pemerintah Indonesia juga mendirikan konsorsium yang terdiri dari 23 institusi sebagai bagian dari upaya mempercepat penyetaraan kualifikasi guru-guru Sekolah Dasar dalam jabatan. Dalam upaya ini tetap dapat dilihat bagaimana konsorsium bagi pelatihan guru dengan sistem jarak jauh tersebut akan beroperasi dan bagaimana mempertahankan penyediaan kualitas program pendidikan tinggi di Indonesia.

TANTANGAN, PELUANG DAN PROSPEK

Abad ke-20 ditandai dengan ekspansi dan demokratisasi pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Belajar terbuka menjadi salah satu perwujudan demokratisasi pendidikan. 'Keterbukaan' dalam belajar ini meliputi pemberian kesempatan luas kepada individu untuk melanjutkan pendidikan tanpa pembatasan syarat masuk, waktu, kendala keuangan, jarak geografis, serta hambatan sosial budaya (Paul, 1993). Memasuki abad ke-21, pendidikan tinggi akan banyak dipenuhi dengan orang dewasa yang ingin melanjutkan pendidikan, padahal lembaga konvensional memiliki daya tampung terbatas. Pada sektor pendidikan menengah, sistem PJJ diperlukan guna mengatasi persoalan ekspansi dan putus sekolah. PJJ merupakan salah satu produk inovasi pendidikan yang bermanfaat dan memiliki prospek masa depan yang cerah.

Ragam model PJJ (*single mode*, *dual mode*, maupun

konsorsium) akan tetap berkembang menyesuaikan zaman dan kebutuhan masyarakat (Croft, 1992). Pada sektor pendidikan tinggi, model *single mode* diwujudkan dalam universitas terbuka. Keterbukaan lembaga ini mesti teruji dalam beberapa dimensi, meliputi daya jangkau, fleksibilitas, keleluasaan siswa dalam memilih isi maupun struktur pelajaran, pilihan dalam sistem pembelajaran, dan akreditasi. Lembaga universitas terbuka telah mampu membantu mengatasi berbagai hambatan siswa dalam belajar. Namun masih ada tantangan bagi praktisi PJJ untuk mengubah pola pikir dan meningkatkan pemahaman tentang teori maupun praktek belajar terbuka.

Teknologi menjadikan universitas terbuka sebagai *new temples of learning* (Reddy, 1993), semacam 'pesantren' gaya baru yang mencrapkan PJJ dalam upaya demokratisasi pendidikan tinggi. Beberapa lembaga *single mode* telah berkembang menjadi mega-universitas, termasuk UT, yang menerapkan teknologi pembelajaran jarak jauh mempromosikan belajar terbuka, serta menampung jumlah yang besar melebihi 100.000 mahasiswa. Radio Central China dan Televisi Universitas (CCRTVU) memiliki lebih dari dua juta mahasiswa, sedangkan Indira Gandhi Open University (IGNOU) di India dan UT di Indonesia memiliki lebih dari 300.000 mahasiswa.

Model *single mode* telah diterapkan di banyak negara, sekalipun di negara berkembang ada beberapa kendala yang dihadapi berkaitan dengan kualitas dan pemanfaatan teknologi. Tanpa ada upaya yang sungguh-sungguh dalam bentuk bantuan dan kerjasama antarbangsa dan antarlembaga, upaya demokratisasi pendidikan tinggi ini akan mengalami banyak hambatan di negara berkembang.

Model *dual mode* terbukti memiliki daya tahan yang lama dan telah diterapkan jauh lebih dahulu dibandingkan model *single mode*. Model *dual mode* memiliki nilai inovatif serta fleksibilitas yang khas. Lembaga pendidikan tinggi konvensional berskala kecil tetap dapat beroperasi menggunakan sistem *dual mode*, guna memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna jasa di wilayah sekitarnya. Staf

akademik tetap mengajar, melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta menambah pengalaman baru dan wawasan dalam desain dan pengembangan bahan ajar serta pembelajaran jarak jauh.

Berbeda dengan model *single mode* yang banyak menjadi subjek penelitian, model *dual mode* seperti sebuah 'spesies' yang agak terlupakan dalam PJJ, karena skala operasi yang kecil. Bagi negara seperti Indonesia, model *dual mode* ini dapat menjadi alternatif guna memacu pengembangan dan peningkatan fungsi pendidikan dan pengabdian pada masyarakat universitas regional bagi masyarakat di sekitarnya. Beberapa lembaga tinggi tertua Indonesia telah berupaya untuk mengembangkan program PJJ untuk dapat menjangkau lebih banyak mahasiswa yang memerlukan berbagai layanan pendidikan. Untuk sektor pendidikan tinggi, model *dual mode* ini berpeluang untuk mengembangkan program-program yang banyak diminati masyarakat seperti bisnis dan program sains dan teknologi untuk menunjang pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah yang tegas dalam hal ini akan sangat menentukan arah dan perkembangan model *dual mode* di Indonesia.

Konsorsium melibatkan adanya jaringan kerjasama dalam pengembangan dan penyajian program PJJ. Pada dasarnya PJJ terselenggara berkat adanya jaringan kerja sama, sekalipun tidak selalu mudah untuk membangun kerjasama di semua fungsi PJJ. Di Indonesia, UT merupakan *a network of participating institutions* yang bekerja sama dengan banyak lembaga mulai dari perguruan tinggi negeri, Kantor Pos, Bank, surat kabar, jaringan radio dan televisi lokal maupun nasional (Setijadi, 1988). Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) bekerja sama dengan sekolah konvensional serta lembaga lain guna menunjang program pembelajaran jarak jauh. Di Inggris, UKOU bekerja sama dengan stasiun televisi *British Broadcasting Corporation* (BBC).

Jaringan kerjasama antar lembaga telah berkembang menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi penyelenggara PJJ. Di Indonesia, berbagai prasarana komunikasi telah berkembang dan

siap untuk dimanfaatkan untuk penyelenggaraan PJJ sehingga suatu pola kerjasama antara berbagai lembaga yang saling menunjang dan menguntungkan dapat dikembangkan lebih lanjut. Kelemahan yang ada pada suatu lembaga dapat dilengkapi dengan kekuatan yang dimiliki lembaga lain. Peran pemerintah sangat penting untuk membangun iklim kerjasama yang kondusif. Inisiatif pemerintah diperlukan dalam bentuk kebijaksanaan, regulasi serta keterbukaan dalam pembentukan pola kerjasama yang dikehendaki.

Model mana yang dipilih? Terlepas dari model apapun yang dianut, karakteristik dasar PJJ tetap berlaku dan bermuara sama pada tercapainya tujuan masyarakat belajar. Masing-masing model memberikan kontribusi yang berarti bagi pemerataan dan perluasan kesempatan pendidikan. Skala dan efektivitas biaya dapat menjadi salah satu faktor yang menentukan keputusan tentang model yang diterapkan. Tujuan PJJ yang sama dapat dicapai dengan menerapkan model yang berbeda, dan tidak ada model yang paling benar dalam menyelenggarakan PJJ. Jawaban terhadap pertanyaan di atas adalah bahwa model yang dipilih akan ditentukan oleh kebutuhan masyarakat pengguna jasa pendidikan, kebijakan pemerintah, kemampuan dan sumberdaya yang ada pada masyarakat dan masing-masing lembaga.

Perkembangan mutakhir dalam bidang teknologi informasi memberikan tantangan bagi PJJ, terlepas dari model apapun yang dianut. Teknologi dimanfaatkan karena alasan dan pertimbangan untuk meningkatkan akses, memperbaiki kualitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan efektivitas pendidikan dan pelatihan (Bates, 1997). Bagi siswa, pemanfaatan teknologi berdampak positif pada keluwesan dalam memilih metode belajar karena makin kaburnya perbedaan antara PJJ dan pendidikan konvensional. Proses belajar berbasis teknologi menghendaki dan sekaligus membantu siswa mengenal dan memanfaatkan teknologi yang tersedia.

Metode belajar jarak jauh dan teknologi informasi bertemu dengan strategi belajar kelas sehingga menciptakan suatu lingkungan baru yang disebut dengan program belajar fleksibel

(*flexible learning*) (Moran, 1997). Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat belajar, universitas berupaya melembagakan program belajar fleksibel sebagai suatu strategi pendidikan utama yang berorientasi pada kebutuhan pengguna, bukan sekedar sebagai eksperimen sambilan. Bagi banyak universitas konvensional di Indonesia, program belajar fleksibel ini perlu lebih dicermati karena hal ini merupakan tantangan yang harus segera diwujudkan guna mengantisipasi masa depan.

Bagi lembaga PJJ maupun konvensional, menerapkan teknologi bukan persoalan sederhana sebagaimana menanam sebatang pohon pisang pada lahan yang tersedia. Lembaga dituntut untuk mereformasi diri, mengubah struktur organisasi, mengarahkan kembali visi dan misi agar sanggup memanfaatkan teknologi baru secara bijaksana. Lembaga PJJ model apapun serta lembaga konvensional akan saling berkompetisi dalam pemanfaatan teknologi untuk membantu proses belajar siswa. Dalam persaingan ini, pemenangnya adalah lembaga berbentuk apa pun yang mampu memberikan pelayanan terbaik, dengan kualitas terbaik, pada harga yang paling kompetitif.

Bahan ajar dan informasi kini menjadi barang miiik publik yang mudah didapatkan masyarakat. Kualitasnya tergantung pada isi, desain, produksi media, penyampaian, serta dukungan, dan layanan yang diberikan (Bates, 1997). Tantangan bagi praktisi PJJ dan pendidikan pada umumnya adalah cepat tanggap dan menyesuaikan diri, siap menerima, belajar dan bereksperimen dengan teknologi baru, serta mau meningkatkan keterampilan. Pada saat yang sama lembaga pendidikan dan pemerintah ditantang untuk memiliki komitmen menyediakan sumber daya yang diperlukan. Tanpa kemauan dan komitmen yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak. Upaya kita dalam memanfaatkan teknologi hanya akan berjalan di tempat saja, dan kita kehilangan momentum membantu menciptakan masyarakat belajar di Indonesia.

Bukanlah hal yang sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi sehubungan dengan metode penyampaian materi jarak jauh di Indonesia. Prasarana dan sistem pendidikan tinggi yang sudah

ada seperti model tatap muka/konvensional, tidak dapat mengakomodasi pertumbuhan populasi usia sekolah dan pendaftarannya. Tantangan yang akan dihadapi oleh sistem pendidikan termasuk penerimaan mahasiswa terletak pada model pembelajaran, pengaturan staf, kebijakan yang efektif berikut pelaksanaannya, dan manajemen sistem itu sendiri. Pelaksanaan sistem PJJ yang efisien menjadi hal penting untuk menghadapi tantangan tersebut. Hal ini didukung oleh Compore (2007) yang menyatakan bahwa ada model komponen sembilan-tahap (*nine-step component model*) yang telah dikembangkan untuk kebutuhan administrasi di sebagian besar program PJJ yaitu, penilaian (*Assessment*), anggaran (*Budget*), koordinasi (*Coordination*), metode penyampaian (*Delivery Method*), evaluasi (*Evaluation*), keterlibatan fakultas dan pelatihan (*Faculty Involvement and Training*), membangkitkan misi (*Generate a Mission Statement*), sistem pengakuan hirarki (*Hierarchical Approval System*), dan pelaksanaan sistem bantuan (*Implementation of Support Systems*).

Profil dan kebutuhan pebelajar di pendidikan tinggi telah berubah total. Sistem pendidikan tinggi saat ini memberlakukan sistem pembelajaran *online*, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dan lebih melibatkan orang dewasa. Lembaga pendidikan tinggi, termasuk PJJ semakin ditantang untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan akan peningkatan akuntabilitas akademik, lulusan yang lebih kompeten, pengadaan sumber luar, standarisasi isi, dan adaptasi terhadap permintaan konsumen, dalam hal ini pebelajar. Dalam rangka menghadapi kecenderungan tersebut dan menjadi lembaga yang lebih kompetitif, lembaga pendidikan tinggi telah memperluas penawaran pada pendidikan kejuruan dan program sertifikasi profesi seperti pada program PJJ.

Kerjasama antara lembaga pendidikan dan pihak terkait juga menjadi kecenderungan baru untuk meningkatkan pelayanan terhadap klien. Hal tersebut semakin meningkatkan minat kerjasama antara dunia bisnis-lembaga pendidikan tinggi yang tercermin dari banyaknya pendirian perusahaan yang melayani pendidikan tinggi dan sejenisnya (Conway, 2007). Sebagai contoh,

UT telah bekerja sama dengan bank, kantor pos, dan penyedia jasa internet dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap mahasiswa.

Howel (2007) juga menyatakan bahwa anggota fakultas yang terlibat dalam PJJ berkembang lebih baik pada sikap mereka terhadap PJJ dan teknologi. Instruksi lebih mengacu pembelajaran yang terpusat pada pembelajar (*learner-centered*), tidak bersifat linear (*nonlinear*), dan bersifat mandiri (*self-directed*). Menurut Moore (2003), pembelajar mandiri merupakan pembelajar yang secara otonomi memiliki inisiatif, kerelaan dan kesiapan untuk belajar sendiri maupun kelompok tanpa dihadiri oleh pembelajar secara langsung. Hal ini berdampak pada bagaimana sistem instruksional direncanakan dan dirancang untuk pembelajar mandiri jarak jauh.

Satu kecenderungan yang sangat berpengaruh pada perkembangan dunia PJJ adalah pemanfaatan teknologi. Prasarana untuk teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang dengan pesat di mana kecepatan komputer semakin meningkat dan harga yang semakin terjangkau ditambah dengan koneksi jaringan yang semakin luas. Komputer, mesin fax, telepon bergambar, fotocopy, dan fungsi lain dapat digabung dan tersedia dengan harga yang lebih murah, serta pemanfaatan internet yang berkembang dengan sangat pesat (Howel, 2007). Lebih jauh, Howel (2007) juga menambahkan bahwa internet dan peralatan teknologi informasi yang lain semakin tersebar luas ke seluruh penjuru dunia sementara kelancaran teknologi itu sendiri menjadi harapan masyarakat. Tantangan pendanaan juga meningkat dengan sumber yang semakin sedikit untuk mengatasi permintaan belajar seumur hidup.

KESIMPULAN

Sebagai sistem PJJ, model *single mode*, *dual mode*, maupun konsorsium memiliki ciri khas masing-masing. Keberadaan siswa dan guru terpisah satu sama lain dengan berbagai alasan, dan instruksi disampaikan dengan berbagai macam media. Konsep belajar mandiri dan otonomi, interaksi dan komunikasi, dan penerapan teori manajemen industri terdapat dalam tiga model PJJ tersebut. Pada saat suatu sistem PJJ menggunakan model *single*

mode, *dual mode*, maupun konsorsium, model-model tersebut memfasilitasi dan berperan penting untuk mengembangkan suatu masyarakat berbasis pengetahuan.

Model *single mode*, *dual mode*, maupun konsorsium merupakan bentuk lembaga maupun universitas yang berperan penting yang berkontribusi dalam memperluas akses, meningkatkan kesempatan, mendorong fleksibilitas, dan meningkatkan angka partisipasi dalam pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan pada umumnya dapat dicapai dan dirancang dengan berbagai macam model yang merefleksikan perbedaan filosofi, kultur, politik, dan teknologi seperti halnya perbedaan besarnya populasi dan cakupan geografisnya. (Rumble, 1986). Ketiga model tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan merupakan cara yang tepat dalam mewujudkan sistem PJJ.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN. 1995. *ASEAN University Network*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Bates, A. W. 1997. The impact of technological change on open and distance learning. *Distance Education*, 18(1), pp. 93-109.
- Compore, D. P. (2007). *Current Trends in Distance Education: An Administrative Model*. Downloaded from <http://www.westga.edu/~distance/ojdla/summer62/compore62.html>, on 8 May 2007.
- Conway, G. P. 2007. *Higher Education Trends in the 21st Century*. Downloaded from http://www.degreeinfo.com/article11_1.html, on 8 May 2007.
- Croft, M. 1992. Single or dual mode: Challenges and choices for the future of education. Dalam I. Mugridge (Ed.), *Perspectives on distance education: Distance education in single and dual mode universities*, pp. 49-62. Vancouver: Commonwealth of Learning.
- Curran, C. 1992. Institutional models of distance education a national cooperative programme. *Higher Education Management*, 4(1), pp. 54-70.

- Daniel, J. S. 1996. *Mega-universities and knowledge media: Technology strategies for higher education*. London: Kogan Page.
- De Jesus, E., Hok, L. K. & Taroepratjeka, H. 1992. *Establishing an ASEAN University*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Guiton, P. 1992. Single mode and dual mode structures for distance education. Unpublished paper.
- Harris, D. 1987. *Openness and closure in distance education*. London: The Falmer Press.
- Holmberg, B. 1995. *Theory and Practice of Distance Education*. London: Routledge.
- Howell, S. L. 2007. *Thirty-two Trends Affecting Distance Education: An Informed Foundation for Strategic Planning*. Downloaded from <http://www.westga.edu/~distance/ojdla/fall63/howell63.html>, on 8 May 2007.
- Kaye, A. 1981. Origins and structures. Dalam A. Kaye & G. Rumble (eds.). *Distance education for higher and adult education*, pp. 15-31. London: Croom Helm.
- Kompas. 2007. *Pendidikan jarak jauh untuk guru Sekolah Dasar*. Kompas, 6 January 2007.
- Moore, M. G., et.al. (Eds.). 2003. *Handbook of distance education*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Moran, L. 1997. Flexible Learning as university policy. In S. Brown (ed.), *Open and distance learning: Case studies from industry and education*, pp. 171-182. London: Kogan Page.
- of Learning.
- OUM. 2007. *Open University Malaysia (OUM) Profile*. Downloaded from <http://www.oum.edu.my/portal/index.php?op=view&m=3&page=1>, on 15 February 2007.
- Pannen, P. 2006. Widening access to higher education: open and distance learning in higher education setting in Indonesia. *Open Praxis (The Electronic Journal of the International Council for Open and Distance Education)*, 2(1).

- Paul, R. H. 1993. Open universities the test of all models. Dalam K. Harry, M. John & D. Keegan (eds.), *Distance education: New perspectives*, pp. 111-113. London: Routledge.
- Perry, W. & Rumble, G. 1987. *A short guide to distance education*. Cambridge: International Extension College.
- Reddy, G. R. 1993. Open universities: the new temples of learning. In K. Harry, M. John & D. Keegan (eds.), *Distance education: new perspectives*, pp. 236-249. London: Routledge.
- Rumble, G. 1986. *The planning and management of distance education*. London: Croom Helm.

MEDIA DALAM PENDIDIKAN TERBUKA DAN JARAK JAUH

Dewi Padmo & Benny Pribadi

Penyelenggaraan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ) sangat lekat dengan penggunaan media. Sesuai dengan karakteristik PTJJ, dapat dikatakan bahwa sebagian besar bahan ajar disampaikan melalui beraneka ragam media; baik media cetak (misalnya buku), maupun noncetak (misalnya audio-visual, komputer). Para ahli, umumnya sependapat bahwa PTJJ memiliki sedikitnya dua karakteristik (Keegan, 1991). Karakteristik pertama adalah adanya keterpisahan antara pengajar dengan peserta didik, baik ditinjau dari sisi jarak, ruang maupun waktu. Karakteristik kedua adalah adanya penggunaan media. Dari pendapat tersebut, keterpisahan antara pengajar dan peserta didik terlihat sebagai elemen utama yang menjadi karakteristik dasar pendidikan jarak jauh (PJJ). Sementara elemen kedua, penggunaan media, merupakan dampak dari adanya keterpisahan ini. Untuk menjembatani keterpisahan ini dibutuhkan kehadiran media komunikasi. Kehadiran media ini menjadi salah satu ciri kesamaan antara institusi penyelenggara PTJJ.

Sementara salah satu faktor yang dapat membedakan institusi penyelenggara PTJJ adalah jenis media yang digunakan. Variasi penggunaan media antar institusi penyelenggara PTJJ sangat beragam mengingat banyaknya jenis media yang dapat dimanfaatkan, mulai dari media yang paling sederhana sampai pada yang paling canggih. Smaldino (2003) mengemukakan bahwa peran media dalam Sistem PJJ adalah sebagai fasilitas untuk menyampaikan materi pembelajaran yang telah dikembangkan secara terstruktur sedemikian rupa dengan asumsi bahwa penggunaannya mempelajari materi tersebut di luar ruang kelas, dan belajar secara individual.

Dalam menentukan media yang digunakan, selain situasi dan kondisi institusi, ada dua hal yang harus diperhatikan dan dijadikan

sebagai acuan bagi pengelola dan pengambil keputusan PTJJ, yaitu ragam media yang tersedia dan pemilihan media yang tepat guna dan tepat sasaran.

RAGAM MEDIA DALAM PTJJ

Media yang digunakan dalam PTJJ pada hakikatnya sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Dalam era kemajuan teknologi yang luar biasa, media yang dapat dipilih dan digunakan semakin luas. Banyak institusi penyelenggara PTJJ berlomba memanfaatkan media pembelajaran yang canggih, modern dan mahal. Mereka berasumsi bahwa semakin canggih media yang digunakan maka semakin tinggi pula nilai kontribusi terhadap proses pembelajaran. Asumsi ini tidak selamanya benar, sebab media yang sederhana sekalipun, apabila digunakan sesuai dengan karakteristik dan kemampuannya akan memberikan nilai pembelajaran yang signifikan. Untuk daerah terpencil dan terisolasi serta daerah yang belum memiliki tenaga listrik, penggunaan media yang sederhana tentunya akan lebih efektif. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah: Bagaimana para perancang dan pengelola PTJJ dapat mengetahui media apa yang paling tepat diterapkan? Untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan sebuah pemahaman yang baik mengenai seluk beluk media.

1. Pengertian, Jenis dan Karakteristik Media

Media telah lama dimengerti sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi. Apabila media ini dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran, maka dapat diartikan bahwa media adalah alat komunikasi yang digunakan untuk membawa informasi yang dimaksudkan untuk pembelajaran (Heinich, et.al, 1996). Mengingat banyaknya ragam media yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran, maka untuk memudahkan mempelajari media-media tersebut pada umumnya dilakukan pengelompokan.

Salah satu penggolongan media yang dikenal adalah menurut Brezt (1972), yang mengidentifikasi media dalam tiga unsur pokok

yaitu: suara, visual dan gerak. Berdasarkan ketiga unsur tersebut Brezt mengklasifikasi media ke dalam delapan klasifikasi yaitu:

- media audio visual gerak
- media audio visual diam
- media audio semi-gerak
- media visual gerak
- media visual diam
- media semi-gerak
- media audio
- media cetak

Rowntree (1994) memberikan pengelompokan media dalam PTJJ berdasarkan bentuk fisik yang yang terlihat, dan membaginya dalam empat klasifikasi yaitu media cetak, media audio-visual, media praktikum dan media interaktif. Secara lengkap, pengelompokan media yang dapat dimanfaatkan dalam PTJJ dapat terlihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Pengelompokan Media menurut Rowntree (1994)

CETAK	AUDIO-VISUAL	PRAKTIKUM	INTERAKTIF
<ul style="list-style-type: none"> • Buku yang sudah diterbitkan • Buku yang di rancang khusus • Buku kerja • Pedoman belajar • Poster, pamflet, peta, <i>chart</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Audio kaset • Audio disc • Siaran radio • Slide/film strip • Film/film loops • Video kaset • Videodisc • Siaran televisi • Komputer (CBT) • Interaktif video 	<ul style="list-style-type: none"> • Praktikum kit • Praktek lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> Jarakjauh • Telepon • Teleconferencing (Audio,video, computer) • Computer/Video Interaktif • Televisi interaktif Tatapmuka • Kelompok belajar • Temporer seminar, tutorial

Adaptasi dari Rowntree (1994), hal. 97.

Daniel (1997) melihat bahwa perkembangan pemanfaatan media PTJJ sangat dipengaruhi oleh teknologi. Menurut Daniel

ada empat kelompok teknologi yang mempengaruhi penggunaan media dalam PTJJ, yaitu:

- Media cetak
- Media massa/siar/tayang
- Media personal
- Media telekomunikasi

Dari sudut waktu dan tempat pemanfaatan media, Jonassen (1996) membedakan media dalam empat kategori waktu dan tempat pemanfaatannya sebagai berikut.

- Waktu tertentu-tempat tertentu. Media yang masuk dalam kategori ini seperti *overhead projector*, *a flip chart*, *electronic blackboard*, *display* komputer melalui *LCD projector*.
- Waktu bersamaan-tempat berbeda. Jenis media yang masuk kategori ini antara lain radio, televisi, serta telekonferensi audio maupun video.
- Waktu berbeda-tempat sama. Media yang dapat digunakan dalam kategori waktu dan tempat seperti ini adalah jenis media seperti micocomputer dan media yang biasanya digunakan di perpustakaan seperti buku, kaset.
- Waktu berbeda-tempat berbeda. Media ini pada umumnya digunakan pada kategori waktu dan tempat seperti ini adalah media yang mampu menyajikan proses interaksi antara peserta didik dengan tutor atau instruktur atau antar peserta didik atau antar kelompok peserta didik. Contoh medianya *computer mediated instruction (CMC)*, dan *computer assisted instruction (CAI)*

2. Jenis Media dan Pemanfaatannya dalam PTJJ

a. Media Cetak

Media cetak digolongkan sebagai teknologi generasi pertama dalam sistem PJJ (Garrison, 1990). Hampir semua institusi PJJ di dunia memanfaatkan media cetak sebagai media utama untuk menyampaikan materi ajar. Kenyataan yang demikian menempatkan media cetak dalam posisi "primadona" dalam PTJJ. Kondisi tersebut tentu saja tidak hanya didasarkan

pada masalah biaya pengembangan dan pengadaan yang dapat dikategorikan lebih murah dibanding dengan media lain. Fleksibilitas sebagai keunggulan media cetak yang tidak dimiliki oleh media lain ternyata juga menjadi faktor pendorong atau faktor yang menentukan pemanfaatan media cetak pada PTJJ. Fleksibilitas media cetak mencakup fleksibilitas tempat (dapat digunakan di mana saja), waktu (kapan saja), wujud (buku materi pokok, buku kerja, panduan belajar, pamflet, brosur, peta, *chart*), jenis cetakan (tulisan, gambar, foto, grafik, tabel), serta kemampuannya untuk dipadukan dengan media lain.

Pada kondisi ini, umumnya media cetak dimanfaatkan sebagai media utama yang berisikan materi-materi utama, sementara media lain berfungsi sebagai media yang menyampaikan materi penjelasan. Kombinasi antara media cetak dengan media video/televisi merupakan contoh pemanfaatan media secara terpadu. Media cetak dipergunakan sebagai bahan utama yang digunakan untuk mempelajari informasi yang terdapat dalam media televisi/video. Media video dalam hal ini, digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep dalam materi ajar yang tidak dapat diajarkan secara efektif melalui media cetak. Di samping itu, fleksibilitas lain dari media cetak yang sangat menonjol dalam pemanfaatannya dalam PTJJ adalah kemampuannya untuk disajikan dalam format moduler. Pemanfaatan sistem moduler mempunyai makna bahwa materi ajar dapat dipelajari bagian per bagian secara runtut dan berkesinambungan. Dengan cara ini pengguna diharapkan akan mampu memahami materi ajar secara menyeluruh. Institusi PTJJ yang berbasis pada media cetak (*print based*), umumnya memanfaatkan sistem moduler dalam menyampaikan bahan ajar. Menurut Mager (1995), dalam sistem moduler, bahan ajar cetak selain berisi materi ajar juga menyajikan latihan untuk menerapkan keterampilan atau kompetensi yang sedang dipelajari dan umpan balik yang menjadi indikator tentang kualitas latihan yang telah dilakukan

oleh siswa. Secara lebih rinci Mager (1995) mengungkapkan beberapa komponen penting dalam bahan ajar yang menggunakan sistem moduler. Komponen tersebut antara lain:

- Deskripsi materi ajar secara menyeluruh (*program picture*)
- Tujuan pembelajaran yang akan dicapai (*objective*)
- Manfaat dan relevansi materi ajar (*relevance*)
- Contoh kompetensi yang akan dimiliki setelah mempelajari modul (*demo*)
- Materi ajar (*instruction*)
- Latihan (*practice*)
- Umpan balik (*feedback*)
- Cara untuk menguji keterampilan yang telah dipelajari

Dengan kemampuan berpenampilan demikian, maka wajarlah media cetak mampu berperan sebagai media yang paling banyak digunakan serta mampu mempertahankan peranannya dalam PTJJ. Selain itu, apabila ditinjau dari cakupan materi yang akan disampaikan, maka terlihat fleksibilitas media cetakpun cukup tinggi. Hal ini diungkapkan oleh Sewart, dkk (1988) sebagai berikut.

"Print material is more useful for providing content where a good deal of ground needs to be covered or where certain skills (analytical, mathematical, conceptual) need to be developed" (hal.239).

b. Radio

Radio telah dikenal sebagai media yang sangat memasyarakat. Di negara-negara maju, misalnya, hampir semua orang memiliki radio (UNESCO, 1986). Sementara pada negara-negara berkembang radio dikategorikan sebagai barang yang cukup terjangkau harganya dan mudah didapat (Verduin,1991). Hal ini menunjukkan bahwa radio merupakan sebuah media yang memiliki aksesibilitas tinggi. Dalam PTJJ media radio juga dikenal sebagai media yang cukup banyak digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan materi ajar. Kenyataan ini tidak hanya disebabkan oleh biaya produksi yang

relatif lebih murah dibandingkan dengan media lain, tetapi juga karena kemampuannya untuk menjangkau daerah lebih luas dan terpencil. Hal ini yang diungkapkan pula oleh Bansal & Chaudary (1999) bahwa:

"Radio has a great potential to support learning at a distance ... Radio broadcasting has its inherent strength and sphere of influence. It has outreach among the masses and is a more affordable medium. It can transcend literacy and geographical barriers and reach out to remote areas and hilly terrains with relatively low cost technology" (hal. 1).

Walaupun media radio memiliki beberapa keunggulan untuk dimanfaatkan dalam PTJJ, kelemahan media ini perlu pula dicermati. Penelitian di *The United Kingdom Open University di Inggris* tentang pemanfaatan media radio menunjukkan bahwa walaupun program radio sangat memotivasi, ternyata peserta didik mengalami kesulitan belajar melalui radio. Pada umumnya peserta didik mengalami kesulitan berkonsentrasi mendengarkan program yang berdurasi 20 menit. Bahkan berdasarkan hasil penelitian, durasi sebaiknya tidak lebih dari 15 menit atau bahkan 10 menit (Bates, 1986). Hal ini merupakan suatu fakta yang tidak dapat dielakkan mengingat media radio bersifat *transistory*, artinya materi ajar yang disiarkan melalui radio cepat berlalu dan mudah dilupakan. Sebagai dampak karakteristik ini, media radio lebih tepat digunakan untuk menyampaikan materi ajar yang bersifat umum, auditif, konkrit, sehingga lebih mudah diterima. Selain itu faktor penggunaan bahasa yang sederhana dan kosa kata yang sudah dikenal, pemberian contoh-contoh, baik melalui dramatisasi maupun kasus-kasus juga sangat berpengaruh pada keberhasilan penggunaan media radio. Keterbatasan lain dari media ini adalah sebagai sarana komunikasi satu arah. Untuk mengatasi keterbatasan ini penggunaan siaran radio harus disertai dengan fasilitas yang memungkinkan siswa dapat melakukan interaksi dua arah, misalnya dengan penggunaan

bahan ajar pendukung akan membantu mahasiswa mengantisipasi materi yang diajarkan. Selain itu dengan kemajuan teknologi, interaksi dua arah antara peserta didik dan tutor dapat dilakukan melalui telepon.

Dengan mempertimbangkan keunggulan yang dimiliki oleh media radio ini, sejumlah institusi PTJJ baik di negara maju maupun negara berkembang memanfaatkan siaran radio sebagai penyampai materi ajarnya seperti: *United Kingdom Open University* (UKOU, Inggris), *Allama Iqbal Open University* (Pakistan), *Sukhothai Thammathirat Open University* (STOU, Thailand), *Indira Gandhi Open University* (IGNOU, India), *University of The Air* (Jepang), dan Universitas Terbuka (UT, Indonesia).

c. Televisi

Televisi dikenal sebagai media yang sangat kaya yang mampu menyajikan beragam informasi dalam bentuk suara dan gambar secara bersamaan. Dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, sistem pemancaran dan penerimaan tayangan televisi dapat dilakukan dengan berbagai macam sistem, antara lain: *broadcast transmission*, *closed-circuit television (CCTV)*, *TV-cable*, *satellite transmission* (Bates, 1995; Heinich, et. al. 1996). Walaupun sistem pemancaran dan penerimaan siaran televisi tidak berpengaruh kepada informasi ataupun program yang disiarkan, masing-masing sistem memiliki cara kerja yang berlainan.

Pemanfaatan siaran televisi dalam PTJJ tidak hanya didasarkan pada kemampuannya menyajikan beragam informasi dalam bentuk audio-visual secara bersamaan, tetapi juga karena kemampuannya menjangkau sejumlah besar pemirsa dalam jangkauan wilayah geografis yang relatif luas. Lebih jauh Sewart (1988) mengemukakan:

"... Broadcast television or radio is still the easiest way of reaching adult learners or potential learners at a distance. It reaches every home and it can be

entertaining and attractive. " (hal.239).

Sebagai media yang sarat dengan informasi audio dan visual yang secara simultan disajikan, televisi pendidikan dikenal mampu memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep abstrak (Bates, 1988) dan menawarkan fleksibilitas yang utuh serta memungkinkan seorang perancang instruksional mengkombinasikan gambar dan suara untuk mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan (Lewis,1977). Meskipun demikian, masih ada keraguan mengenai efektivitas televisi sebagai media pembelajaran yang didasari pada ketidakberhasilan media ini dalam proses belajar mengajar. Tetapi dalam sebuah kajian mengenai keberadaan medium televisi sebagai media pembelajaran yang dilakukan pada tahun 1987, disimpulkan bahwa medium ini mempunyai potensi yang bernilai sebagai alat pengajaran apabila diberikan dukungan dan perhatian yang cukup (Zugner,1987).

Dukungan dan perhatian yang diperlukan antara lain mencakup kemasan yang menarik yang memerlukan kreativitas produser untuk menciptakan format tayangan program yang mampu mendidik dan sekaligus menghibur. Konsep ini dikenal dengan istilah *edutainment*. Kemampuan untuk menerobos kekakuan siaran televisi pendidikan yang seringkali terjebak dalam bentuk tayangan monoton yang bersifat naratif seperti *talking head*, merupakan sebuah tantangan. Keterbatasan lain dari pemanfaatan media TV dalam PTJJ terlihat dalam sebuah studi yang menunjukkan bahwa produksi dan penyiaran program TV memerlukan biaya yang relatif mahal.

Pemanfaatan media televisi pada lembaga PTJJ di beberapa negara ternyata tidak saja mempertimbangkan keunggulan yang dimiliki oleh media tersebut tetapi juga faktor aksesibilitas media ini. Di sejumlah institusi PTJJ di negara maju, siaran televisi telah dimanfaatkan secara maksimal, karena institusi tersebut tidak mengalami kendala yang berarti. Sebaliknya di negara-negara yang sedang berkembang, siaran televisi untuk PJJ masih digunakan secara terbatas. Hal ini disebabkan oleh

beberapa faktor yaitu: ketersediaan pesawat TV penerima, kemampuan siaran pendidikan bersaing dengan siaran komersial dan budaya masyarakat setempat (Sewart, 1988).

Dari begitu banyak institusi PTJJ, sejumlah institusi yang telah memanfaatkan siaran televisi untuk menyampaikan materi ajar antara lain: *The United Kingdom Open University* (Inggris), *National Radio and Television University for Teachers* (Polandia), *College of the Air* (Mauritius), dan *University of the Air* (Japan).

d. Media Berbantuan Komputer

Salah satu kelemahan penyelenggaraan sistem PTJJ adalah minimnya umpan balik yang dapat diperoleh peserta didik tentang proses dan hasil belajar yang telah mereka tempuh. Hal ini disebabkan interaksi langsung antara pengajar dan peserta didik relatif rendah. Peserta didik tidak dapat mengetahui hasil belajar yang telah mereka tempuh, kesalahan yang mereka lakukan, dan perbaikan yang perlu mereka lakukan dalam proses belajar. Kondisi ini akan berakibat terhadap kurangnya aspek penguatan (*reinforcement*) terhadap keberhasilan belajar mahasiswa, yang pada akhirnya akan berakibat terhadap rendahnya motivasi mereka untuk belajar.

Kendala kurangnya interaksi antara institusi PTJJ dengan peserta didik tersebut dapat dijumpai dengan pemanfaatan media interaktif yang memungkinkan adanya komunikasi dua arah. Sifat interaktif media yang ideal terletak pada kemungkinan siswa dapat memberi respon terhadap informasi yang disampaikan serta memperoleh umpan balik terhadap respon tersebut dalam waktu yang relatif cepat. Menurut Hannafin dan Peck (1998), umpan balik dalam media interaktif dapat berbentuk: "...providing information to learner about their performance or providing corrective information about unsuccessful performance" (hal. 121). Potensi media komputer yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran pada sistem PTJJ antara lain:

- memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta didik dan materi pembelajaran.
- proses belajar dapat berlangsung secara individual sesuai dengan kemampuan belajar peserta didik.
- mampu menampilkan unsur audio visual untuk meningkatkan minat belajar (multi media)
- dapat memberikan umpan balik terhadap respon peserta didik dengan segera.
- mampu menciptakan proses belajar secara berkesinambungan

Robert Heinich dkk (1986) mengemukakan enam bentuk interaksi yang dapat diaplikasikan dalam merancang sebuah media pembelajaran untuk sistem PTJJ, berupa:

- praktek dan latihan (*drill and practice*)
- tutorial
- permainan (*games*)
- simulasi (*simulation*)
- penemuan (*discovery*)
- pemecahan masalah (*problem solving*)

Program yang berbentuk *drill and practice* umumnya digunakan apabila peserta didik diasumsikan telah mempelajari konsep, prinsip dan prosedur sebagai materi pembelajaran. Tujuan dari bentuk program ini adalah melatih kecakapan dan keterampilan dan biasanya menyajikan sejumlah soal atau kasus yang memerlukan respon peserta didik dengan disertai umpan balik, baik yang bersifat positif maupun negatif. Selain memberikan umpan balik, program ini umumnya juga menyajikan pengukuhan terhadap jawaban yang tepat.

Bentuk lain dari penyajian program komputer adalah program *tutorial*. Program ini menyajikan informasi dan pengetahuan dalam topik tertentu diikuti dengan latihan pemecahan soal dan kasus. Keunggulan lain dari program tutorial adalah kemampuannya untuk menyajikan informasi dalam bentuk bercabang (*branches*). Bentuk ini memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk mempelajari materi ajar

yang lebih disukai terlebih dahulu.

Permainan (*game*) selalu menarik dan menyenangkan untuk diikuti, demikian pula halnya dengan program komputer yang mengemas informasi dalam bentuk permainan. Program yang berisi permainan dapat memberi motivasi bagi siswa untuk mempelajari informasi yang ada di dalamnya. Hal ini sangat berkaitan erat dengan essensi bentuk permainan yang selalu menampilkan masalah menantang yang perlu dicari solusinya oleh pemakai.

Program *simulasi* berupaya melibatkan siswa dalam persoalan yang mirip dengan situasi yang sebenarnya namun tanpa resiko yang nyata. Melalui program simulasi peserta didik diajak untuk membuat keputusan yang tepat dari beberapa alternatif solusi yang ada. Setiap keputusan yang diambil akan memberi dampak tertentu.

Dalam program berbentuk penemuan (*discovery*), program komputer mampu menayangkan masalah yang harus dipecahkan oleh peserta didik dengan cara *trial and error*. Peserta didik harus terus mencoba sampai berhasil menemukan solusi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Dengan cara ini mereka diharapkan dapat lebih memahami prosedur yang ditempuh untuk memecahkan suatu masalah dan mampu mengingatnya lebih lama.

Bentuk lain dari tayangan komputer interaktif adalah *problem solving* atau pemecahan masalah. Program seperti ini dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan cara yang ditempuh siswa dalam memberikan respon. Pada cara yang pertama siswa merumuskan sendiri solusi masalah yang ditampilkan lewat komputer dan memasukkan program ke dalamnya. Sedangkan pada cara yang kedua, komputer menyediakan jawaban yang mewakili respon siswa terhadap masalah yang ditayangkan oleh komputer.

e. Internet

Dengan teknologi yang berkembang pesat dewasa ini,

pemanfaatan komputer dalam sistim PTJJ tidak hanya dapat digunakan secara *stand alone* tetapi dapat pula dimanfaatkan dalam suatu jaringan. Jaringan komputer atau *computer network* telah memungkinkan proses belajar menjadi lebih luas, lebih interaktif dan lebih fleksibel. Peserta didik dapat melakukan proses belajar tanpa dibatasi oleh faktor ruang dan waktu, artinya, jika ada fasilitas jaringan, peserta didik dapat melakukan proses belajar di mana saja dan kapan saja.

Kelebihan lain dari jaringan komputer sebagai media pendidikan adalah adanya kemungkinan siswa untuk melakukan interaksi dengan sesama peserta didik, dan dengan tutor. Kemampuan interaktif ini mampu membuat proses belajar menjadi lebih efektif yang memberi kemungkinan kepada tutor atau instruktur untuk memberikan umpan balik (*feedback*) terhadap proses dan hasil belajar peserta didik. Jaringan komputer yang paling umum digunakan adalah internet. Saat ini teknologi internet telah memungkinkan setiap orang memperoleh akses yang lebih besar terhadap beragam informasi yang tersedia. Teknologi ini telah dimanfaatkan secara luas mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pada jenjang yang lebih tinggi. MeIsaac & Barnard (1995) mengemukakan bahwa:

"... The internet is, in fact, a collection of independent academic, scientific, government, and commercial network providing electronic mail and access to file server with free software and millions of pages of text and graphic data that even thousands of elementary and secondary students are now using" (hal.418).

Dengan kemajuan teknologi jaringan internet, belajar melalui dunia maya pun mulai dikenal baik. Penyampaian materi dalam pembelajaran maya, baik sebagian maupun secara utuh, dikemas dan disampaikan melalui komputer secara *online*. Hoyer (1999) mengemukakan bahwa pada institusi penyelenggara PJJ yang menerapkan belajar maya ini, penyampaian seluruh proses pembelajarannya dilakukan secara

online, mulai dari data matakuliah yang ditawarkan, materi ajar yang umumnya berbentuk modul multimedia yang interaktif, pendukung belajar seperti akses terhadap perpustakaan serta informasi-informasi terkini, bantuan dan bimbingan belajar, bahkan sampai pada kegiatan administrasi. Demikian pula halnya dari sisi peserta didik, peserta didik melakukan segala aktivitas belajar, serta berkomunikasi dengan pengelola melalui jaringan. Peters (2003) mengemukakan enam keunggulan utama dari pemanfaatan belajar maya sebagai berikut.

- Materi ajar dapat disajikan dalam berbagai bentuk presentasi melalui dengan multimedia
- Akses terhadap informasi sangat luas dan mudah
- Memiliki kemampuan berkomunikasi baik secara bersamaan atau tertunda;
- Memiliki kemampuan untuk meningkatkan aktivitas dan interaktivitas dengan menggunakan program belajar adaptif
- Secara teknis mampu menyimpan dan menyampaikan;
- Memiliki kesempatan untuk mengembangkan pembelajaran mandiri.

Keunggulan tersebut telah mengubah proses pembelajaran mulai dari pengorganisasian, materi, metode, dan kontak sosial menjadi lebih fleksibel.

3. Indikator Media Efektif

Hal terpenting dalam pemanfaatan media dalam PTJJ yang harus selalu dikedepankan adalah kemampuan media yang digunakan dalam memberi nilai tambah (*added value*) terhadap aktivitas pembelajaran mahasiswa. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, media dalam PJJ merupakan alat atau kendaraan utama untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Untuk itu penilaian terhadap keberhasilan pemanfaatan media dalam Sistem Pendidikan Jarak Jauh (SPJJ) perlu secara terus menerus dilakukan. Mager (1995: 5) mengemukakan beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan untuk menilai keberhasilan pemanfaatan media dalam SPJJ yaitu:

- Menciptakan motivasi belajar
- Meningkatkan hasil belajar
- Membuat peserta didik mengingat pengetahuan lebih lama
- Memungkinkan peserta didik mampu menerapkan pengetahuan yang dipelajari

Tingkat efektivitas penggunaan media juga ditentukan dengan diperhatikannya karakteristik media yang berkualitas dalam PJJ. Kearsley & Moore (1996: 122-123) mengemukakan beberapa karakteristik penting tentang kualitas media yang digunakan dalam PTJJ. Secara umum media pembelajaran yang digunakan dalam PTJJ perlu memiliki karakteristik sebagai berikut.

- Memiliki tujuan pembelajaran yang jelas
- Dirancang dalam unit-unit kecil
- Melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran
- Lengkap
- Mengandung adanya pengulangan
- Memungkinkan siswa melakukan sintesis
- Memberikan dorongan belajar
- Bervariasi
- *Open-ended*
- Memberi umpan balik
- Melakukan evaluasi secara kontinyu

Apabila dalam pengembangan materi yang disampaikan melalui media telah memperhatikan karakteristik media yang berkualitas tersebut, maka efektivitas pemanfaatan media tersebut dapat lebih terjamin.

PEMILIHAN MEDIA DALAM PTJJ

Pemilihan media untuk PTJJ berbeda dengan pemilihan media bagi pendidikan yang menggunakan sistem belajar tatap muka, walaupun keduanya tetap mengacu kepada karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing media. Perbedaan ini pada dasarnya terletak pada bagaimana memanfaatkan karakteristik tiap-tiap media untuk dapat diterapkan dalam PTJJ yang bercirikan adanya

keterbatasan jarak, ruang dan waktu. Bagaimana sebuah institusi yang akan menerapkan PTJJ dapat menentukan pilihan media yang akan digunakan dalam menyampaikan bahan ajarnya? Banyak faktor yang mempengaruhi dan perlu dipertimbangkan dalam memilih media yang akan diterapkan dalam penyelenggaraan sebuah institusi penyelenggara PTJJ. Rowntree (1994) mengemukakan sejumlah kriteria yang perlu dipertimbangkan oleh pengambil keputusan dalam pemilihan media dalam PTJJ yang antara lain berkaitan dengan tujuan belajar yang akan dicapai, kondisi peserta didik yang meliputi aksesibilitas terhadap media, kenyamanan menggunakan media, mampu memotivasi, serta kemampuan organisasi dalam pengembangan dan pengadaan media. Sementara Bates (1995) mengembangkan sebuah kerangka pemilihan media yang sistematis dengan memperhatikan tujuh faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu: *access* (aksesibilitas), *costs* (biaya), *teaching and learning* (proses pengajaran dan pembelajaran), *interactivity* (interaktifitas), *organisational issues* (permasalahan organisasi), *novelty* (kemuktahiran), dan *speed* (kecepatan). Ketujuh faktor disingkat dalam akronim yang mudah dikenali yaitu ACTIONS.

Pada dasarnya Rowntree maupun Bates sependapat bahwa pemilihan media dalam PTJJ perlu memperhatikan beberapa faktor seperti: akses terhadap media baik bagi peserta didik maupun institusi penyelenggara, biaya, peranan media dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan bagi mereka yang berminat dalam PTJJ atau bahkan bagi mereka yang telah terjun dalam dunia PTJJ.

1. Akses terhadap media

Pengertian akses terhadap media adalah adanya ketersediaan dan kemudahan memperoleh atau menggunakan media. Akses terhadap media ini harus dilihat dari dua sisi, yaitu sisi institusi penyelenggara PTJJ dan sisi peserta didik/calon peserta didik. Dalam PTJJ, seberapa pun pentingnya bahan ajar yang akan disampaikan dan betapa pun baiknya teknik penyampaian, akan

menjadi sia-sia apabila peserta didik tidak dapat menerimanya, hanya karena mereka tidak memiliki akses terhadap media yang membawa bahan ajar tersebut. Akses terhadap penggunaan media oleh institusi penyelenggara PTJJ juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan media. Pengertian akses disini adalah ketersediaan sarana yang mendukung pengembangan maupun penggunaan media tertentu baik yang berasal dari dalam dan luar institusi penyelenggara PTJJ.

2. Faktor Biaya

Dalam menentukan pilihan mengenai media apa yang akan digunakan dalam PTJJ, faktor biaya merupakan faktor yang tidak dapat dihindarkan. Banyak orang berpikir bahwa PJJ berarti penyelenggaraan pendidikan dengan biaya murah. Hal ini bisa saja benar tetapi bisa juga tidak karena murah tidaknya penyelenggaraan suatu PJJ tergantung pada media apa yang digunakan dan berapa banyak jumlah peserta didiknya. Misalnya, sebuah institusi jarak jauh memilih menggunakan media video interaktif. Penggunaan media ini akan terhitung mahal apabila hanya digunakan untuk peserta didik yang berjumlah sedikit tetapi sebaliknya dapat terhitung murah apabila peserta didiknya banyak. Begitu pula bila institusi PTJJ memilih menggunakan media cetak. Dengan jumlah peserta didik yang banyak maka biaya penyelenggaraan pendidikan ini akan dirasakan sangat murah. Walaupun faktor biaya ini sangat penting untuk dipertimbangkan dalam menentukan pilihan media yang akan digunakan, Bates (1995) mengingatkan bahwa akan sangat berbahaya apabila para perancang PTJJ hanya memperhatikan masalah biaya yang dikeluarkan tanpa melihat keuntungan dari penggunaan media yang dipilih.

3. Fungsi pembelajaran

Secara selintas pemilihan media yang digunakan sebagai alat transfer materi ajar kepada peserta didik dalam PTJJ sangat tergantung pada faktor biaya yang harus dikeluarkan, baik oleh

institusi penyelenggara PTJJ maupun oleh peserta didik dan ketersediaan media bagi peserta didik.

Walaupun pemikiran ini sangat masuk akal, pemilihan media ternyata sangat berkaitan erat dengan fungsi pembelajaran.

Berkaitan dengan hal ini Gagne et.al. (1988) melihat tiga faktor yang perlu diperhatikan, yaitu:

- karakteristik fisik media
- tujuan belajar
- kemampuan peserta didik

Ketiga faktor ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam pemilihan media yang tepat dalam PTJJ.

a. Karakteristik fisik media

Karakteristik fisik media merupakan satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media. Pertimbangan ini berkaitan dengan kemampuan media untuk menyajikan informasi verbal, baik dalam bentuk teks maupun audio. Kemampuan audio umumnya merupakan kemampuan tambahan dari beberapa media, misalnya media komputer dengan kemajuan teknologi dapat menyajikan suara, media televisi dan lain-lain. Kemampuan media dalam menyajikan informasi visual dan gerakan merupakan salah satu karakter fisik yang dapat mendasari pemilihan media.

b. Tujuan belajar

Secara umum dapat dikatakan bahwa hampir semua jenis media digunakan untuk menyampaikan sebagian besar tujuan belajar, tetapi tidak pula disangkal bahwa media tertentu akan lebih efektif apabila digunakan untuk pencapaian tujuan belajar tertentu pula. Misalnya, untuk mengajarkan bahasa asing, media cetak tidak cukup memadai untuk menyampaikan materi ajarnya. Kemampuan berbahasa asing tidak akan dapat dikuasai oleh peserta didik hanya melalui media cetak saja. Dalam hal ini penggunaan media tambahan seperti kaset audio dan video akan menyempurnakan pemahaman ataupun penguasaan

bahasa asing tersebut.

c. Kemampuan peserta didik dalam penggunaan media

Dalam pemilihan media untuk PTJJ, Rowntree (1994) mengemukakan perlu memperhatikan kemampuan peserta didik dalam menggunakan media serta kecenderungan mereka untuk menyukai media tertentu. Walaupun masih merupakan asumsi apabila kondisi ini diperhatikan akan sangat berpengaruh terhadap proses belajar pada PTJJ.

PENUTUP

Dalam sebuah penyelenggaraan sistem PTJJ, media merupakan sebuah prasyarat yang diperlukan untuk menjembatani keterpisahan antara pengajar dan peserta didik, yang menjadi ciri atau karakteristik sistem PJJ. Media memberikan kemungkinan terjadinya proses belajar mengajar dalam suatu sistem PTJJ. Dari sisi pengelolaan institusi pendidikan jarak jauh, peran pengelola dalam pemanfaatan media adalah menentukan media yang tepat guna dan tepat sasaran bagi peserta didik. Walaupun memang tidak dapat dipungkiri bahwa cepat lambatnya proses belajar mengajar yang berlangsung dalam sistem PTJJ selain bergantung pada kemampuan dan karakteristik media yang digunakan juga bergantung pada kemampuan peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bates, T. 1995. *Technology, open learning and distance education*. New York: Routledge.
- Bates, T. 1986. Option for delivery media. In Perraton, *Alternative routes to formal education*. Washington: World Bank.
- Bates, T. 1988. Television, learning dan distance education: *International council for distance education bulletin*, 16(1), 29-38.
- Moore, M. G. & Kearsley, G. 1996. *Distance education: A System view*. Belmont: Wadsworth Publishing company.

- Daniel, J. S. 1997. *Mega universities and knowledge media. Technology strategies for higher education*. Great Britain: Kogan Page.
- Gagne, R., Briggs, L., & Wagner, W. 1988. *Principle of instructional design*. Holt: Rinehart and Winston.
- Hannafin, M. J., Peck, K. L. 1998. *The design, development and evaluation of instructional software*. New York: McMillan Publ., Co.
- Harrison, N. 1995. *Practical instructional design for open learning materials*. Great Britain: McGraw-Hill.
- Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. & Smaldino, S. 1996. *Instructional media and technologies for learning*. New Jersey: Prentice Hall.
- Hoyer, H. 1999. Lernraum Virtuelle Universität: Challenge and opportunity for the Fern Universität. Dalam G.E. Ortner & F. Nickolmann (eds.) *Socio-economics of Virtual Universities*. Pp. 213-222. Weinheim, Germany: Beltz.
- Jonassen, D. H. (Ed.). 1996. *Handbook of research for educational communication and technology*. New York: Macmillan Library References USA.
- Keeagan, D. 1991. *Foundations of distance education*. Great Britain: Biddies Ltd.
- Mager, R. F. 1995. *Making instruction work or skillbloomers*. Kuala Lumpur: Golden Book Center.
- Mason, R. 1994. *Using communications media in open dan flexible learning*. London: Kogan Page.
- Peters, O. 2003. Learning with new media in distance education. Dalam M. G. Moore & W. C. Anderson (Eds.). *Handbook of Distance Education*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Perry, W. & Rumble, G. 1987. *A short guide to distance education*. Cambridge: Internasional Extension College.
- Rowntree, D. 1994. *Exploring open and distance learning*. London: Kogan Page.
- Sewart, D. (Ed.). 1988. *Distance education international*

- perspectives*. New York: Routledge.
- Verduin, J. & Clark, T. 1991. *Distance education: The foundations of effective Practice*. San Francisco: Jossey Bass Publishers.
- Smaldino, S. E., et al. 2003. *Instructional technology and media for learning*. Ohio: Merrill Prentice Hall Inc.

LAHIRNYA PENDIDIKAN TERBUKA DAN JARAK JAUH DI INDONESIA: SUATU *FLASHBACK*

H.A.R. Tilaar

Ketika masyarakat dan Bangsa Indonesia bangun kembali dari kemelut krisis politik dan ekonomi pada bagian kedua dekade tahun 60-an maka dimulailah suatu era baru untuk membangun kembali masyarakat dan Bangsa Indonesia. Di dalam keinginan besar untuk pembangunan kembali, disusunlah rencana pembangunan yang dikenal sebagai Rencana Pembangunan Lima Tahun yang pertama (REPELITA I). Pada April tahun 1969 dimula langkah pertama pembangunan tersebut. Data yang digunakan di dalam rencana pembangunan nasional tersebut masih kurang memadai, bukan hanya karena keterbatasan waktu persiapan juga data pendukung yang kurang lengkap. Termasuk didalamnya rencana pembangunan pendidikan nasional. Sungguhpun disadari bahwa pendidikan nasional pada waktu itu membutuhkan penanganan yang serius namun porsi alokasi pembangunan sektor pendidikan di dalam pembangunan nasional masih sangat kecil. Menyadari betapa pentingnya pembangunan manusia Indonesia pada waktu itu, meskipun rencana pembangunan sudah mulai dilaksanakan pada 1 April 1969, Pemerintah menyadari suatu keharusan memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh dan lebih akurat mengenai keadaan pendidikan nasional.

Dalam kaitan ini dilaksanakan Seminar Nasional mengenai pendidikan yang dikenal sebagai Konperensi Cipayung pada tanggal 28-30 April 1969 ketika 100 orang pakar dari berbagai disiplin mengindentifikasikan beragam masalah pendidikan nasional. Salah satu implikasi dari Konferensi Cipayung ialah lahirnya Proyek Penilaian Nasional Pendidikan (PPNP) I pada 1 Mei 1969. Proyek ini telah menghasilkan suatu gambaran menyeluruh mengenai pendidikan nasional. Salah satu strategi yang perlu dikembangkan adalah bagaimana sistem pendidikan nasional yang ada dapat menampung kebutuhan pendidikan yang semakin lama semakin

meningkat.

Artikel ini menunjukkan beberapa kondisi yang menunjang lahirnya pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) di Indonesia serta berbagai faktor pendukung dalam pengembangannya sampai pada pertengahan dekade 80-an atau akhir PELITA III.

KONDISI YANG MENUNJANG LAHIRNYA PTJJ DI INDONESIA

Sebenarnya PTJJ di Indonesia relatif telah lama dikenal, sejak pada jaman kolonial. Pada masa itu sudah terdapat berbagai kursus tertulis yang diselenggarakan melalui pos seperti kursus pemegang buku (*Boekhoudding*) serta beragam kursus bahasa asing (misalnya Belanda dan Inggris). Kesempatan dan sarana pendidikan yang kurang memadai telah mendorong lahirnya bermacam jenis pendidikan alternatif tersebut di samping adanya kursus tatap muka. Disamping itu terdapat berbagai kondisi yang menunjang perkembangan dari PTJJ di Indonesia. Kondisi tersebut secara keseluruhan telah melahirkan suasana kondusif bagi lahirnya suatu sistem pendidikan jarak jauh sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional di kemudian hari.

1. Amanat UUD 1945

Komitmen terhadap pendidikan untuk pembangunan bangsa Indonesia merupakan suatu amanat yang tertera di dalam Pembukaan UUD 1945. Di dalam Pembukaan Konstitusi tersebut dengan jelas dikatakan bahwa tujuan untuk membangun negara Indonesia ialah antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentunya untuk membangun suatu kehidupan bangsa yang cerdas diperlukan suatu sistem pendidikan pada berbagai jenis dan tingkat agar supaya mutu kehidupan rakyat semakin lama semakin meningkat. Komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dituangkan dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Amanat tersebut menunjukkan betapa pendidikan harus membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara Indonesia. Data mengenai keadaan pendidikan nasional sebagaimana yang dilaporkan di dalam PPNP, menunjukkan betapa amanat tersebut masih jauh dari yang diinginkan. Dalam rencana pembangunan selanjutnya masalah pemerataan pendidikan terus-menerus mendapat perhatian meskipun belum sepenuhnya dituangkan di dalam kebutuhan sumber (*resources*) yang sepadan dan memadai.

2. Keterbatasan Sumber Daya dan Dana

Prioritas utama dalam pembangunan Indonesia yang dimulai sejak PELITA I ialah pembangunan ekonomi sedangkan untuk bidang lainnya tergantung kepada pertumbuhan ekonomi untuk membiayainya. PELITA III memperkenalkan strategi pembangunan nasional yang disebut Trilogi Pembangunan Nasional yaitu pertumbuhan ekonomi yang memadai, stabilitas nasional, dan pemerataan. Dengan kata lain alokasi dana untuk pembangunan pendidikan tergantung kepada pertumbuhan ekonomi dan prioritas pembangunan lainnya yang tetap diletakkan kepada pembangunan sektor ekonomi. Dengan demikian seperti yang tampak pada Tabel 1, alokasi dana pembangunan sektor pendidikan relatif sangat terbatas.

Tabel 1. Alokasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan 1969-1983

Tahun	GNP (Milyar Rp)	% GNP untuk Pendidikan	Milyar Rupiah	% APBN
1969	2.683			
1970	3.290			
1971	3.605			
1972	4.495			
1973	6.507			
1974	10.201	1,31		
1975	12.087	1,90	348,5	
1976	15.035	1,74	398,9	

1977	18.322	2,05	580,5	
1978	21.854	2,05	680,1	
1979	30.541	1,99	9,7	
1980	43.435	2,07	1.339	
1981	56.197	2,01	1.728	
1982	60.496	1,89	1.823	
1983	74.396	2,08	2.361	

Dengan demikian amanat UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa terus terعهcer dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia maupun dunia. Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa sampai akhir PELITA III jumlah siswa SD 23,153 juta, SLTP 4,758 juta, SMTA 2,592 juta, dan pendidikan tinggi 824 ribu. Angka partisipasi pada akhir PELITA III 99,5, untuk SD, 44,4 untuk SMTP, 26,1 untuk SMTA, dan 5,3 untuk pendidikan tinggi. Angka-angka tersebut menunjukkan kondisi yang masih jauh dari keinginan untuk mencerdaskan bangsa kita ini.

Apabila kita cermati, data pada Tabel 1 memperlihatkan peningkatan dana Pemerintah untuk pendidikan, dari 2,683 milyar di tahun 1969 menjadi 74.396 milyar (9,45% dari anggaran pemerintah) di tahun 1983 yang merupakan akhir PELITA III. Angka tersebut baru merupakan 2,08% dari GNP. Selain itu dana yang berasal dari luar negeri (pinjaman maupun hibah) baru dialokasikan pemerintah secara lebih memadai mulai PELITA III oleh karena dana tersebut terutama diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur sektor ekonomi. Demikian pula kebutuhan tenaga yang terbatas untuk melaksanakan pengembangan pendidikan melalui INPRES Pendidikan yang dimulai pada tahun 1973. Kondisi ini menyebabkan kualitas pendidikan menurun. Oleh sebab itu, dilaksanakanlah berbagai cara untuk meningkatkan jumlah dan mutu pendidikan guru secara massal.

Tabel 2. Jumlah Siswa/Mahasiswa dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Jenjang dan Jenis Pendidikan	1969		1984	
	Siswa	APM (%)	Siswa	APM (%)
Sekolah Dasar (SD dan MI)	12.800.000	64,0 (APK)	23.153.000	99,5
SLIP	1.150.000	16,9	4.758.000	44,0
SLTA	482.000	8,6	2.592.000	26,1
Universitas	156.000	1,6	824.400	5,3

Tabel 3. Persentasi Alokasi Dana Inpres Pembangunan SD dari Program INPRES Pemerataan dalam PELITA I, II, III

PELITA	Jumlah Alokasi Dana Seluruh Inpres (Milyar Rp)	Inpres SD (Milyar Rp)	% Inpres SD dari Keseluruhan
I	171,60	17,2	10,0
II	1.229,62	232,7	26,3
III	4.507,00	1.596,8	35,4

3. Akselerasi Pembangunan Nasional

Pada dekade tahun 70-an berhembuslah suatu pandangan baru mengenai pembangunan. Negara-negara berkembang yang pada saat itu sedang giat dalam pembangunan menggunakan pendekatan *basic needs approach* di dalam pembangunannya. Artinya pembangunan bukan hanya difokuskan kepada infrastruktur ekonomi tetapi juga untuk pembangunan manusianya. Tuntutan *human development* mulai berkembang dan perhatian mulai diarahkan kepada kebutuhan dasar manusia, terutama pendidikan dan kesehatan. Pada saat yang bersamaan para pemikir pembangunan di Indonesia saat itu sedang giat-giatnya memasyarakatkan konsep akselerasi pembangunan nasional. Dipacu oleh keinginan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan bangsa maka terdapat keinginan untuk mempercepat pembangunan terutama pembangunan manusianya. Pada masa itu berkembanglah strategi pembangunan nasional yang dikenal

sebagai Trilogi Pembangunan dengan enam jalur pemerataan (*equity*). Salah satu jalur pemerataan itu ialah kesempatan yang sebesar-besarnya untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945. Pada saat bersamaan Indonesia *ketiban* rejeki (*windfall money*) akibat naiknya harga minyak dunia. Pada tahun 1973 harga minyak dunia melonjak dari 2,93 dollar per barrel menjadi 10,80 dollar per barrel sehingga Indonesia memperoleh surplus dana untuk pembangunan. Pada tahun terakhir REPELITA I dilancarkan program INPRES Pembangunan SD. Tujuan program INPRES SD ialah untuk mempercepat pendidikan SD bagi semua anak Indonesia. Tabel 2 dan 4 menunjukkan perkembangan INPRES SD sampai akhir REPELITA III yang telah memacu jumlah siswa SD dengan angka partisipasi dari 64% pada tahun 1969 menjadi 99,5%.

Akselerasi pembangunan fisik tersebut menuntut peningkatan mutu pendidikan. Kunci utama di dalam peningkatan mutu ialah mutu. Oleh sebab itu lahirlah berbagai inovasi untuk meningkatkan mutu guru SD yang kebanyakan belum *qualified*. Lahirlah berbagai inovasi pendidikan melalui teknologi pendidikan serta berbagai usaha lainnya untuk mempercepat atau menyerasikan pertumbuhan kuantitatif dengan peningkatan kualitatif pendidikan.

Tabel 4. Pelaksanaan INPRES Pembangunan SD 1973-1983

Komponen	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Gedung Baru (unit)	6.000	6.000	10.000	10.000	15.000	15.000	10.000	14.000	15.000	22.000	13.140
Ruang Kelas Baru (Unit)						15.000	15.000	20.000	25.000	35.000	15.700
Rehabilitasi Gedung (Unit)			10.000	16.000	15.000	15.000	15.000	20.000	25.300	25.000	21.000
Penempatan Guru (orang)	18.000	18.000	50.000	60.000	60.000	75.000	50.000	50.000	103.350	121.000	91.830

Buku Bacaan (Juta)	6,6	6,9	7,3	8,6	7,3	8,5	12,5	14,0	15,0	30,0	32,0
Rumah Kepala Seko- lah dan Guru (Unit)							5.000	7.500	9500	20.000	50.000
Rumah Penjaga Sekolah (Unit)							10.000	10.000	11.350	12.000	10.840
Jum. Dana (Milyar Rp)	17,2	19,1	49,9	57,3	85,0	112,3	135,5	250,8	374,4	589,2	589,2

4. Pemerataan Pendidikan dan Kemajuan Teknologi Komunikasi

Pada dekade tahun 70-an terjadi kemajuan teknologi komunikasi yang sangat pesat antara lain dengan penggunaan satelit. Indonesia termasuk di antara sedikit negara di dunia yang dengan cepat memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dengan peluncuran satelit Palapa. Satelit Palapa merupakan suatu kebutuhan mendesak dari negara yang mempunyai sebaran geografis yang sangat luas. Indonesia dengan lebih dari 3000 pulau memerlukan sarana komunikasi yang cepat dan murah. Peluncuran satelit Palapa merupakan salah satu titik tolak penting di dalam memacu pembangunan nasional. Komunikasi satelit tersebut telah melahirkan berbagai alternatif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui satelit Palapa bukan saja informasi program pembangunan dapat dijangkau secara lebih luas di seluruh Nusantara tetapi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas dan mempercepat kesempatan untuk memperoleh pendidikan.

Seperti yang telah diuraikan *windfall money* telah melahirkan antara lain pembangunan dengan cepat gedung SD yang tersebar di seluruh Nusantara. Pembangunan gedung SD yang cepat dalam jumlah besar memiliki, paling tidak dua konsekuensi. Pertama adalah tuntutan tenaga kependidikan yang berkualitas. Kedua, lulusan pendidikan dasar meningkat yang dicerminkan dari

peningkatan angka partisipasi. Peningkatan angka partisipasi SD pada gilirannya menuntut sekolah menengah yang semakin banyak pula. Siklus ini terus menggelinding pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Upaya untuk memenuhi tuntutan ini membutuhkan sumber dana dan tenaga dalam jumlah yang besar dan cepat. Di dalam kaitan inilah teknologi komunikasi dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk melaksanakan program tersebut.

Teknologi komunikasi dalam bentuk televisi, radio dan komunikasi tertulis melalui pos telah ikut memperluas kesempatan belajar. Pada tingkat SD, misalnya, kita kenal SD Kecil dan SD Pamong serta Paket A melalui jalur pendidikan nonformal. Pada tingkat sekolah menengah, pada tahun 1979/80 dibuka 5 buah SMP Terbuka Perintisan di Lampung Selatan, Cirebon, Tegal, Jember dan Lombok Barat. Demikian pula terdapat program belajar Paket B yang setara dengan SMP sedangkan Paket C yang direncanakan setara dengan SMTA. Pada akhirnya pada tahun 1984 secara resmi didirikan Universitas Terbuka (UT).

5. Keberhasilan Kuantitas Program INPRES SD

Seperti yang telah diuraikan, pada akhir PELITA I telah dimulai pelaksanaan pembangunan SD melalui program INPRES SD. Tabel 2 menunjukkan perkembangan INPRES SD sampai akhir PELITA III. Keberhasilan program INPRES SD telah menghasilkan antara lain pengakuan UNESCO mengenai Wajib Belajar 6 tahun yang dicapai Indonesia pada tahun 1984. Sungguhpun tidak mungkin tercapai Angka Partisipasi Murni 100% namun usaha yang dilaksanakan Indonesia patut dihargai mengingat keadaan geografis yang sulit. Pengakuan dunia terhadap sukses Indonesia tersebut dinyatakan dengan Bintang Aviciena yang diberikan UNESCO kepada Presiden Republik Indonesia. Keberhasilan kuantitatif program INPRES SD mendesak ke atas yaitu tuntutan untuk menyediakan pendidikan pada tingkat berikutnya. Demikian pula seterusnya sampai kepada pendidikan tinggi.

6. Ketertinggalan Pembangunan Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi di Indonesia memang baru dikenal pada tahun 20-an dengan didirikannya Perguruan Tinggi Teknik Bandung (THS Bandung) yang kemudian diikuti oleh Pendidikan Tinggi Kedokteran, Pendidikan Tinggi Hukum, Pendidikan Tinggi Pertanian dan Pendidikan Tinggi Sastra dan Filsafat. Pada masa kolonial terdapat keterbatasan untuk memperoleh pendidikan tinggi. Angka Partisipasi Mahasiswa relatif sangat tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Menyadari pentingnya pendidikan tinggi bagi peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa maka pada tahun 1984 didirikanlah UT yang kini telah merupakan salah satu *mega university* di dunia.

Demikianlah keenam kondisi yang telah menunjang dan memacu lahirnya PTJJ di Indonesia. Apabila pada waktu lahirnya PTJJ masih bersifat komplementer terhadap pendidikan formal yang dikenal pada masa itu sehingga dengan demikian masih bersifat pendidikan alternatif maka dewasa ini PTJJ telah merupakan bagian yang terintegrasi dari sistem pendidikan nasional.

BEBERAPA FAKTOR PENDUKUNG PENGEMBANGAN PTJJ DI INDONESIA

Di samping kondisi yang kondusif yang telah melahirkan PTJJ di Indonesia, terdapat pula beberapa faktor pendukung pengembangan PTJJ. Berikut ini dibahas lima faktor yang merupakan cikal-bakal tumbuhkembangnya PTJJ.

1. Falsafah Belajar Seumur Hidup

Sungguhpun falsafah pendidikan seumur hidup telah lama dikenal di dalam konsep pendidikan Indonesia dengan adanya pendidikan masyarakat namun belajar seumur hidup sebagai suatu konsep pendidikan relatif belum lama diterima oleh dunia pendidikan di Indonesia. Di dalam konsep ini dikemukakan bahwa manusia harus terus-menerus belajar sepanjang hayatnya. Di dalam era reformasi dewasa ini prinsip tersebut memang benar

adanya. Manusia yang berhenti belajar adalah manusia yang tidak dapat hidup di dalam dunia yang terbuka.

2. Education for All

Dewasa ini dunia melihat pendidikan merupakan hak manusia. Pendidikan harus dijadikan sebagai kebutuhan pokok untuk mempertahankan dan meningkatkan martabat manusia. Hasil Konferensi Dunia di Yomtien tahun 1990 merumuskan gerakan *Education for All* sebagai tuntutan dunia modern. Oleh sebab itu kesempatan yang seluas-luasnya harus diberikan kepada semua warga negara untuk memperoleh pendidikan. Cara konvensional yang selama ini dikenal seakan membatasi kesempatan tersebut oleh karena hambatan-hambatan dana, sumber daya, dan hambatan geografis. Namun dengan kemajuan teknologi komunikasi, bermacam hambatan tersebut dapat diatasi. Di sinilah peranan teknologi komunikasi untuk menjangkau setiap orang dimana pun tempatnya.

3. Teknologi Pendidikan

Teknologi pendidikan sebenarnya telah cukup lama dikenal dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pada tahun 50-an di Bandung didirikanlah *Science Teaching Center* (STC) dalam rangka bantuan Rencana Colombo. Di dalam Pusat tersebut dikembangkan cara mengajarkan *science* dengan lebih tepat dan menarik. Untuk hal tersebut diadakan percobaan untuk memproduksi alat peraga sederhana sebagai alat bantu mengajarkan *science*. STC kemudian menjadi *Teaching Media Center* untuk memproduksi alat bantu mengajar dan cara menggunakan alat elektronik yang pada waktu itu sudah mulai memasuki dunia pendidikan.

Selain STC, di Bandung pada tahun 1955 didirikan Balai Pendidikan Guru Tertulis (BPG Tertulis). BPG Tertulis dimaksudkan untuk meningkatkan mutu guru yang kebanyakan masih berijazah SGB. Kursus tertulis dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan guru tersebut setingkat dengan pemilik

ijazah SPG. Kemudian kegiatan BPG tersebut meningkat dalam menyediakan kursus tertulis untuk ijazah BI seperti Ilmu Mendidik.

Teknologi pendidikan pada awal mulanya berkembang untuk meningkatkan kemampuan mengajar para guru.

4. Program Studi Teknologi Pendidikan

Sejalan dengan berkembang teknologi, khususnya teknologi komunikasi, maka teknologi pendidikan memperoleh isi yang lebih luas. Apabila pada permulaan perkembangannya teknologi pendidikan terutama ditujukan untuk meningkatkan kemampuan mengajar para guru, kini teknologi pendidikan memperoleh isi yang lebih luas yaitu teknologi belajar, baik dalam arti belajar tatap muka maupun belajar mandiri. Program Studi Teknologi Pendidikan lahir di berbagai LPTK seperti di IKIP Jakarta dan Bandung pada tahun 70-an. Bahkan dalam perkembangannya IKIP Jakarta memelopori program studi sampai jenjang S2 dan S3.

5. Inovasi Pendidikan

Meskipun inovasi pendidikan di Indonesia berjalan tersendat-sendat namun didesak oleh kebutuhan dan didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi maka teknologi pendidikan juga memasuki inovasi pendidikan nasional. Sebagai kasus yang dapat diketengahkan pada permulaan 70-an dikembangkan proyek untuk pengembangan SD. Proyek Pengembangan SD di Jawa Tengah menggunakan radio sebagai sarana antara lain untuk meningkatkan kemampuan para guru. Eksperimen Jawa Tengah boleh dikatakan berhasil sehingga oleh Pemerintah didirikanlah balai untuk pengembangan media pendidikan di empat propinsi yaitu di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Balai yang ada di Jakarta kemudian menjelma menjadi Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (PUSTEKKOM).

Demikianlah lima faktor sebagai pendukung pengembangan program PTJJ di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, M. T. 1993. Pendidikan jarak jauh dan penerapannya di Indonesia. *Buletin Studi Indonesia*, 3.
- Asian Development Bank. 1987. Distance education. Volume 1. *Proceeding of the Regional Seminar on Distance Education*. 26 November-3 December 1986. Bangkok, Thailand, Manila.
- Asian Development Bank. 1986. Distance education. Volume II. *Proceeding of the Regional Seminar on Distance Education*, 26 November-3 December 1986. Bangkok, Thailand, Manila.
- Beeby, C.E., 1987. *Pendidikan di Indonesia: Penilaian untuk pedoman perencanaan* (Translation). Jakarta: LP3ES.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1996). *Lima puluh tahun perkembangan pendidikan Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Republik Indonesia. *Rencana pembangunan lima tahun keempat, 1984/85 -1988/89, Buku II*.

PENINGKATAN KUALIFIKASI GURU DAN PROGRAM PENYETARAAN

I G.A.K. Wardani

Mutu pendidikan merupakan salah satu tolok ukur yang menentukan martabat atau kemajuan suatu bangsa. Dengan mencermati mutu pendidikan suatu bangsa/negara, seseorang akan dapat memperkirakan peringkat negara tersebut di antara negara-negara di dunia. Oleh karena itulah, bangsa yang maju akan selalu menaruh perhatian besar terhadap dunia pendidikannya, dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, seperti meningkatkan anggaran pendidikan, menyelenggarakan berbagai lomba dalam berbagai aspek pendidikan, atau mengirimkan para tunas bangsa untuk menimba ilmu di negara lain. Beragam upaya ini dilakukan karena kesadaran akan pentingnya pendidikan, dan keyakinan bahwa bangsa yang mengabaikan pendidikan akan menjadi bangsa yang tertinggal, yang akan kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Di Indonesia, rendahnya mutu pendidikan merupakan salah satu dari empat masalah pokok pendidikan yang telah diidentifikasi sejak tahun 60-an. Perhatian terhadap pendidikan memang cukup besar, namun meskipun sudah banyak usaha yang dilakukan, sampai kini masalah mutu pendidikan tampaknya belum dapat diatasi. Keluhan tentang rendahnya mutu lulusan masih terus bergema. Lulusan SD, SLTP, dan SLTA belum mampu bernalar dan berpikir kritis, serta masih tergantung kepada guru (D. Nielson, dkk, 1996; Nasoetion, 1996). Kemampuan siswa untuk mandiri belum terwujud, sehingga prakarsa siswa untuk memulai sesuatu tidak terlampaui sering ditemukan. Penguasaan siswa lebih terfokus pada pengetahuan faktual karena itulah yang dituntut dalam ujian akhir. Ujian nasional lebih banyak menuntut kemampuan siswa untuk menghafal daripada mempersyaratkan mereka berpikir kritis atau mendemonstrasikan keterampilan. Rendahnya Nilai Ebtanas Murni

(NEM) tahun 1997/1998 dan tahun 1998/1999 yang diberitakan dalam berbagai media massa juga merupakan indikator mutu pendidikan yang belum sesuai dengan harapan. Bahkan pada tahun 2006, ketika NEM berganti baju menjadi ujian nasional atau sering juga disebut ujian akhir nasional (UAN), hasil yang dicapai para siswa sempat mengecewakan karena banyaknya siswa yang tidak lulus dari SMP atau SMA yang diakibatkan oleh rendahnya nilai UAN yang dicapai. Hal ini menjadi lebih memprihatinkan lagi karena rendahnya standar kelulusan untuk matapelajaran yang diujikan secara nasional.

Pangkal penyebab dari semua ini tentu sangat banyak tetapi tuduhan utama banyak ditujukan kepada guru karena gurulah yang merupakan ujung tombak di lapangan yang bertemu dengan siswa secara terprogram (Wardani, 1998). Oleh karena itu, guru dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai oleh siswa. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tentu muncul pada setiap warga negara yang peduli pada masa depan bangsa, dan merupakan tantangan besar bagi Departemen Pendidikan Nasional, khususnya bagi lembaga penghasil guru.

Untuk menjawab tantangan yang ditujukan kepada guru tersebut, berbagai upaya telah dilakukan dalam peningkatan kemampuan guru. Berbagai penataran guru, baik yang dilakukan secara berkala maupun yang dilakukan secara berkesinambungan telah dilakukan. Di samping itu, kesejahteraan guru, yang disadari merupakan tiang penyangga dari kualitas layanan yang diberikan guru, juga sudah mulai diperhatikan, meskipun dalam skala yang sangat kecil. Pemberian insentif bagi guru yang mengajar di daerah terpencil dan pemberian tunjangan fungsional bagi guru telah pernah dilakukan. Selain upaya yang secara khusus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan profesional dan kesejahteraan guru, upaya yang sangat penting adalah upaya untuk meningkatkan kualifikasi guru yang telah dilakukan sepanjang masa.

Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, peningkatan

kualifikasi guru dilakukan secara bertahap. Tahun 50-an, persyaratan bagi guru Sekolah Dasar (SD) adalah berijazah Sekolah Guru B (SGB), yaitu jenjang pendidikan setara SLTP plus (empat tahun setelah SD); sedangkan bagi guru SMP (SLTP) dipersyaratkan berijazah Sekolah Guru A (SPG), yaitu jenjang pendidikan setara SLTA. Tahun 60-an, persyaratan kualifikasi ini meningkat. Guru SD dipersyaratkan berijazah Sekolah Pendidikan Guru (SPG), yang setingkat dengan SLTA; sedangkan guru SMP dipersyaratkan berijazah Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLTP). Tahun 1989, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Mendikbud Nomor 0854/U/1989, persyaratan untuk guru SD ditingkatkan menjadi setara Diploma II. Sementara itu, tuntutan kualifikasi guru SLTP dan guru SLTA juga meningkat, meskipun peraturan resmi tidak ada. Guru SLTP dituntut untuk berijazah minimal setara Diploma III, sedangkan guru SLTA dipersyaratkan berkualifikasi sarjana (S1). Berbagai usaha untuk mewujudkan hal ini juga telah dilakukan.

Para guru yang perlu ditingkatkan kualifikasinya tersebut berada di seluruh wilayah tanah air. Ada yang berdomisili di kota, di pinggiran kota, di desa, bahkan di tempat yang terpencil atau sangat terpencil. Para guru yang berada di kota, terutama di kota yang ada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dapat melanjutkan studi sambil bekerja, meskipun hal ini dianggap agak berat. Namun, para guru yang berada jauh dari LPTK, tentu mustahil meninggalkan tugasnya untuk melanjutkan sekolah. Di samping kendala sosial ekonomi, dari segi kelangsungan pendidikan di sekolah, para guru ini tidak mungkin meninggalkan tugasnya untuk melanjutkan sekolah. Oleh karena itu, dicarilah satu sistem yang memungkinkan para guru melanjutkan studi sambil tetap mengajar.

Universitas Terbuka (UT), yang sampai dengan tahun 2005 merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang menerapkan sistem belajar terbuka dan jarak jauh, menjadi pilihan utama. Pilihan ini menjadi sangat tepat karena para guru dapat melanjutkan studi tanpa harus meninggalkan tugasnya sebagai guru. Di samping itu,

program-program UT dapat menjangkau mahasiswa yang berada di seluruh pelosok tanah air. Oleh karena itu, berbagai penugasan yang berkaitan dengan peningkatan kualifikasi guru diberikan kepada UT.

Berikut ini diuraikan profil Program Penyetaraan DII Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Program Penyetaraan DII PGSD) dan Program Penyetaraan DIII Pendidikan Guru Sekolah Menengah (Program Penyetaraan DIII PGSM) yang dikelola oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UT, sejak mulai dibuka sampai dengan tahun 1999. Profil program ini menjadi penting untuk dideskripsikan karena merupakan profil awal yang kemudian terus berkembang sesuai dengan tuntutan dan perubahan kebijakan. Untuk setiap program akan dipaparkan secara singkat profil masukan, kurikulum, penyelenggaraan, serta jumlah mahasiswa dan lulusan. Profil awal ini kemudian akan dilengkapi dengan perkembangan program penyetaraan sampai dengan awal 2007, baik untuk Program Penyetaraan DII PGSD, maupun untuk Program Penyetaraan DIII PGSM. Sebagai penutup, artikel ini akan diakhiri dengan kesimpulan tentang peran program penyetaraan dan pendidikan jarak jauh (PJJ) dalam peningkatan kualifikasi guru, serta pelajaran yang dapat dipetik dari penyelenggaraan kedua jenis program ini.

PROGRAM PENYETARAAN DII-PGSD: 1990/1991-1998/1999

Dengan dikeluarkannya SK Mendikbud Nomor 0854/U/1989, para guru SD yang umumnya berijazah SPG atau setingkat menjadi tidak memenuhi persyaratan kualifikasi yang dituntut dalam surat keputusan tersebut. Untuk meningkatkan kualifikasi mereka, dikembangkan Program Penyetaraan DII PGSD (untuk guru kelas serta guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan), yang mulai menerima mahasiswa baru pada tahun akademik 1990/1991. Program ini merupakan program kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen). Karena program ini diniatkan untuk para guru yang berada di

seluruh pelosok tanah air, UT sebagai perguruan tinggi yang menerapkan sistem PTJJ, diberi tugas untuk mengelola program ini.

Masukan program ini adalah para guru SD yang berijazah SPG atau sederajat, berstatus sebagai guru SD, dan diutamakan yang sudah menjadi pegawai negeri, berusia 25-45 tahun (khusus bagi kepala sekolah yang berprestasi, usia maksimal 50 tahun), serta memiliki kemampuan dan kemauan untuk meningkatkan kualifikasi. Karena peningkatan kualifikasi guru SD ini dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN maka rekrutmen calon mahasiswa dilakukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) berserta jajarannya di tingkat kabupaten dan kecamatan dengan berpedoman pada kriteria yang telah ditetapkan. Untuk setiap kelompok belajar (pokjar) direkrut 30 orang mahasiswa.

Sementara itu, karena keterbatasan kemampuan APBN yang disalurkan dalam bentuk beasiswa yang disediakan oleh Pemerintah, para guru yang tidak mendapat beasiswa membiayai sendiri studinya (swadana). Calon mahasiswa swadana melakukan pendaftaran sendiri ke Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ)-UT setempat. UPBJJ-UT kemudian menyeleksi calon mahasiswa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Mahasiswa swadana membentuk pokjar sendiri dengan jumlah mahasiswa yang sama dengan pokjar mahasiswa beasiswa (lazim pula disebut mahasiswa proyek), yaitu maksimal 30 orang. Dengan demikian, dalam satu kecamatan dimungkinkan ada dua pokjar yang berbeda.

Meskipun program ini adalah program penyetaraan yang semestinya mengacu kepada program prajabatan, kurikulum dikembangkan bersamaan dengan pengembangan Kurikulum DII PGSD Prajabatan. Hal ini terjadi karena Program DII PGSD Prajabatan juga mulai dibuka pada tahun akademik yang sama (1990/1991). Pengembangan kurikulum dan penulisan bahan ajar dilakukan dengan melibatkan para dosen/pakar dari berbagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), seperti IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, dan IKIP Malang, serta para guru SD yang berpotensi. Beban studi penuh untuk Program

Penyetaraan DII PGSD adalah 82 sks, dengan masa studi enam semester.

Dalam Kurikulum 1990 tersebut, satu hal yang menarik yang perlu dicatat adalah penghargaan terhadap pengalaman mengajar para guru. Pengalaman mengajar tersebut dihargai dengan pembebasan matakuliah, yang bobot sksnya tergantung dari jumlah tahun pengalaman mengajar para guru, yaitu 8 sks untuk guru yang berpengalaman mengajar 5-8 tahun, 10 sks untuk yang berpengalaman mengajar 9-12 tahun, dan 16 sks untuk yang telah mengajar lebih dari 12 tahun. Matakuliah yang dibebaskan adalah matakuliah yang diasumsikan telah dikuasai oleh para guru karena berkaitan erat dengan tugas mengajarnya.

Kurikulum 1990 ini telah disempurnakan pada tahun 1996 (dengan nama Kurikulum 1996) dan diberlakukan mulai tahun akademik 1997/1998. Penyempurnaan mengacu kepada kurikulum DII PGSD Prajabatan 1995, serta berbagai masukan dari lapangan. Dalam Kurikulum 1996, beban studi keseluruhan menjadi 78 sks, masa studi diperpendek menjadi lima semester (tentu saja dengan beban studi per semester makin tinggi), dan pembebasan matakuliah berdasarkan pengalaman mengajar pun direvisi. Pembebasan matakuliah hanya diberikan kepada dua kelompok pengalaman mengajar, yaitu pengalaman mengajar 5-10 tahun dihargai dengan pembebasan 6 sks, dan pengalaman mengajar 11 tahun atau lebih dihargai dengan pembebasan 8 sks. Matakuliah yang dibebaskan hanya terdiri dari Matakuliah Dasar Umum (MKDU). Di samping pembebasan melalui pengalaman mengajar, para mahasiswa yang memenuhi syarat juga diberi kesempatan untuk mengajukan pengajuan kredit berdasarkan Penilaian Hasil Belajar Melalui Pengalaman (IHBP).

Untuk memandu para penyelenggara program, UT telah mengembangkan seperangkat Panduan Penyelenggaraan Program DII PGSD (disingkat PPD). Cakupan Panduan ini meliputi sistem penyelenggaraan, kurikulum dan deskripsi matakuliah, registrasi, bahan ajar, tutorial, praktikum, Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM), ujian, sampai pengelolaan di daerah. PPD ini

disempurnakan secara berkala berdasarkan masukan dari lapangan. Masukan datang dari para tutor, pengelola, mahasiswa, dan pengembang program. Dalam rapat koordinasi, masukan tersebut dibahas dan hasilnya digunakan untuk menyempurnakan PPD. Sejalan dengan penyempurnaan yang dilakukan dan kebutuhan yang muncul, jumlah PPD juga berubah, mulai dari delapan buah (PPD 1 s.d. PPD 8), yaitu mulai dari sistem penyelenggaraan sampai ujian, menjadi 11 PPD (PPD 0 s.d PPD 10) mulai dari Struktur Program dan Deskripsi Matakuliah (PPD 0), Sistem Penyelenggaraan Program (PPD 1) sampai dengan Pengelolaan Administrasi Daerah (PPD 10).

Untuk membantu mahasiswa menguasai kemampuan yang dituntut dalam modul dan menerapkannya dalam pembelajaran di SD, UT menyediakan program tutorial tatap muka yang wajib diikuti oleh mahasiswa. Di samping tutorial, mahasiswa wajib mengikuti praktikum IPA dan Pemanapan Kemampuan Mengajar (PKM), yang disupervisi oleh instruktur praktikum dan supervisor PKM. Karena PKM merupakan muara program, maka tujuan utama yang ingin dicapai adalah agar para mahasiswa mampu menerapkan segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap nilai yang diperolehnya dalam semua matakuliah ke dalam pembelajaran di kelasnya sendiri. Oleh karena itulah, kegiatan latihan penerapan tersebut dilakukan di sekolah mahasiswa sendiri dengan supervisi dari para supervisor PKM. Semua kegiatan akademik ini diselenggarakan oleh kelompok belajar di tingkat kecamatan. Penguasaan mahasiswa dinilai melalui tugas mandiri (TM), ujian akhir semester (UAS), laporan praktikum, ujian praktek, dan ujian PKM.

Para tutor, instruktur praktikum, dan supervisor PKM adalah para pendidik yang berpendidikan minimal Diploma III Kependidikan dengan bidang studi yang relevan dan diutamakan yang mempunyai pengalaman mengajar di SD. Sebelum melaksanakan tugas, mereka mendapat pelatihan dari para tutor inti, baik dalam pendalaman materi, maupun dalam pengelolaan tutorial, praktikum, dan PKM. Para tutor inti dilatih di tingkat pusat, dengan materi pelatihan yang disiapkan dan disajikan oleh FKIP-UT

bersama para penulis modul, sedangkan pelatihan bagi para tutor, instruktur praktikum, dan supervisor PKM berlangsung di daerah, dengan tutor inti sebagai pelatihnya.

Jumlah guru yang mengikuti program penyetaraan bervariasi dari tahun ke tahun. Disamping mahasiswa yang mendapat beasiswa dari APBN (pemerintah pusat) atau APBD (pemerintah daerah), terdapat banyak mahasiswa yang membiayai diri sendiri (swadana). Tabel 1 menggambarkan jumlah mahasiswa dan lulusan dari tahun ke tahun untuk mahasiswa beasiswa (proyek) dan mahasiswa swadana.

Tabel 1. Jumlah Mahasiswa dan Lulusan per Angkatan Program Penyetaraan DII PGSD (sampai dengan Februari 1999)

No	Angkatan Tahun	Mahasiswa Beasiswa*)		Mahasiswa Swadana	
		Jumlah Awal	Sudah lulus	Jumlah Awal	Sudah Lulus
1	1990/1991	21.979	18.681	2.578	2.074
2	1991/1992	30.641	26.424	21.241	17.793
3	1992/1993	19.445	15.628	29.890	24.666
4	1993/1994	58.859	45.448	31.281	24.528
5	1994/1995	36.106	20.182	27.363	16.136
6	1995/1996	6.183	934	33.869	7.486
7	1996/1997	12.683	-	34.307	**-
8	1997/1998	68.699	-	14.827	**-
9	1998/1999	28.032	-	3.271	**-
Jumlah		282.627	127.297	198.627	92.683

*) Termasuk mahasiswa DII Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (DII Pendidikan Guru Penjaskes)

**) Pada waktu data ini dikeluarkan, lulusan untuk masukan tahun 1996/1997 belum ada karena untuk menyelesaikan program, seorang mahasiswa minimal menyelesaikannya dalam enam semester atau tiga tahun, dan untuk masukan mulai tahun 1997/1998 diperlukan minimal 5 semester.

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah mahasiswa yang membiayai diri sendiri cukup banyak, yaitu 41% dari guru yang telah memasuki program (198.627 orang dari 481.254 orang). Hal ini merupakan satu indikator tingginya minat para guru untuk meningkatkan kemampuan dan kualifikasi pendidikan. Jumlah lulusan yang sudah mencapai 219.980 orang menunjukkan peran nyata PTJJ dalam meningkatkan kualifikasi guru.

PROGRAM PENYETARAAN D-III PGSMP: 1992/1993–1997/1998

Program DIII PGSMP ini dibuka pada tahun akademik 1992/1993, dengan Program Studi Pendidikan MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam). Tahun 1994/1995 dibuka program studi Pendidikan Bahasa Inggris, dan tahun 1997/1998 dibuka program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Seperti halnya dengan Program Penyetaraan DII PGSD, program ini juga merupakan kerja sama antara Ditjen Dikdasmen dengan Ditjen Dikti, dalam hal ini UT. Oleh karena itu, pembukaan program ini didasarkan atas permintaan dari Ditjen Dikdasmen, dalam hal ini Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis (Dit. Dikguten) sebagai pembina guru di lingkungan Ditjen Dikdasmen.

Mahasiswa program ini terdiri dari para guru SMP (SLTP) dengan latar belakang pendidikan Diploma I atau Diploma II bidang studi yang sejenis. Karena latar belakang yang berbeda, lama atau masa studi kedua masukan ini berbeda. Dengan mempertimbangkan tugas rutin seorang guru yang sedang menempuh program ini, beban studi setiap semester berkisar antara 12-15 sks. Oleh karena itu, lama studi masukan D I adalah enam semester, sedangkan lama studi masukan DII adalah tiga semester.

Kurikulum dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan para guru SLTP serta mengacu kepada Kurikulum DIII Kependidikan Prajabatan. Analisis kebutuhan dilakukan dengan mengkaji berbagai hasil penelitian, diantaranya hasil penelitian yang dilakukan dan dilaporkan oleh Jiono, 1992; Nasoetion, 1985; dan Egelstone, J., 1984, serta menelaah masukan dari pengguna lulusan,

dalam hal ini dari Dit. Dikgutenis dan Direktorat Pendidikan Menengah Umum (Dit. Dikmenum). Pengembang kurikulum adalah para pendidik dan pakar bidang studi dari berbagai IKIP serta universitas negeri dan swasta, seperti IKIP Bandung, IKIP Surabaya, IKIP Semarang, IKIP Jakarta, dan IKIP Yogyakarta, disamping instruktur dan guru inti Pemantapan Kerja Guru (PKG).

Sama halnya dengan Program Penyetaraan DII PGSD, mahasiswa Program DIII PGSMP diharapkan mampu belajar mandiri dengan bahan belajar utama berupa modul. Untuk memfasilitasi kemampuan belajar mandiri, UT menyediakan program bantuan belajar berupa tutorial tatap muka, praktikum/praktik, dan Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM). Kegiatan akademik berlangsung di kelompok belajar pada tingkat kabupaten/kota madya, dibimbing oleh para tutor, instruktur praktikum, dan supervisor PKM, serta dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di SLTP setempat.

Jumlah mahasiswa yang memasuki program ini bervariasi menurut jumlah alokasi beasiswa untuk setiap tahun. Berbeda dengan Program Penyetaraan DII Guru SD, semua mahasiswa Program Penyetaraan DIII PSMP adalah mahasiswa beasiswa. Jumlah mahasiswa yang masuk dan yang telah lulus sampai dengan tahun akademik 1997/1998 untuk setiap program tergambar dalam Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Mahasiswa dan Lulusan DIII PGSMP sampai dengan Tahun 1997/1998

No.	Program Studi	Tahun Program Dibuka	Jumlah Mahasiswa	Jumlah Lulusan	Jumlah yang Belum Lulus
1.	Pendidikan Matematika	1992/1993	19.226	13.116	6.110
2.	Pendidikan IPA	1992/1993	16.176	9395	6.781
3.	Pendidikan Bahasa. Inggris	1994/1995	10.092	2.352	7.740

4.	Pendidikan Bahasa Indonesia	1997/1998	8.097	*)	8.097
	Total		53.591	24.683	28.908

*) Program ini baru dibuka tahun 1997/1998, sehingga belum ada lulusan.

Dari Tabel 2 dapat dilihat jumlah mahasiswa yang mendaftar dan yang sudah lulus dari Program Penyetaraan DIII PGSMMP. Jumlah lulusan yang sudah mencapai 24.683 orang dapat menggambarkan betapa besar peran PJJ dalam meningkatkan kualifikasi guru SLTP. Peran ini akan masih terus diperlukan karena setelah empat jenis program dibuka, program lain menyusul, sehingga seluruh guru bidang studi di SLTP dapat meningkatkan jenjang pendidikannya. Program studi yang segera akan menyusul adalah program studi yang terkait dengan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Dengan demikian, guru-guru SLTP dari lima bidang studi kemudian dapat memanfaatkan keberadaan UT untuk meningkatkan kualifikasinya.

PERKEMBANGAN SAMPAI AWAL TAHUN 2007

Sebagaimana diisyaratkan pada bagian terdahulu, baik Program Penyetaraan DII PGSD maupun DIII PGSMMP merupakan cikal bakal dari program-program peningkatan kualifikasi guru yang dikembangkan selanjutnya. Kedua jenis program ini berlanjut terus dan berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perubahan kebijakan di tingkat nasional. Secara umum, minimal ada dua hal yang perlu dicatat dalam perkembangan kedua program ini.

Hal pertama adalah kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk memohon penganugrahan kredit melalui penilaian Hasil Belajar Melalui Pengalaman (HBMP). Meskipun kesempatan ini sudah dibuka dan disosialisasikan bagi Program Penyetaraan DII PGSD sejak tahun akademik 1997/1998, namun tidak seorang mahasiswapun yang memanfaatkan kesempatan ini. Berbeda halnya dengan mahasiswa Program Penyetaraan DII PGSD. Beberapa orang mahasiswa Program Penyetaraan DII PGSD memanfaatkan

kesempatan ini. Namun dari sejumlah mahasiswa yang mengajukan permohonan penganugrahan kredit, hanya seorang yang berhasil mendapat penganugrahan kredit.

Minimnya jumlah mahasiswa yang memanfaatkan kesempatan ini dapat ditinjau paling tidak dari dua alasan. Pertama, tampaknya para mahasiswa lebih memilih mengambil matakuliah daripada harus mengumpulkan berbagai bukti kemampuan yang diperlukan untuk penganugrahan kredit. Hal ini mungkin juga berakar dari belum membudayanya kebiasaan mendokumentasikan berbagai dokumen penting di kalangan para guru sehingga ketika dokumen tersebut diperlukan, para guru sulit untuk menemukannya. Kedua, mungkin karena memang para guru ini merasa tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk penganugrahan kredit. Kondisi seperti ini patut dipertimbangkan pada masa yang akan datang jika lembaga pendidikan guru akan menghargai pengalaman mengajar para guru.

Hal kedua yang perlu dicatat adalah bahwa sejak tahun 2001, nama penyetaraan tidak lagi digunakan sehingga nama program menjadi Program Diploma II Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Program DII PGSD) dan Program Diploma III Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (Program DIII PGSLTP), yang kemudian berubah lagi menjadi Program Diploma III Pendidikan Guru Sekolah Menengah Pertama (Program DIII PGSM), sesuai dengan perubahan kebijakan di tingkat nasional. Penghilangan istilah penyetaraan diawali oleh keinginan untuk meningkatkan citra program ini di kalangan para guru. Istilah penyetaraan dianggap membuat program ini seolah-olah tidak sama dengan program kependidikan prajabatan sejenis, padahal isi program sebenarnya sama. Dengan hilangnya istilah penyetaraan, berarti program ini dianggap sama, bukan setara dengan program sejenis yang dibuka oleh LPTK tatap muka.

Disamping hal-hal yang sama, masing-masing program juga memiliki kekhususan dalam perkembangannya. Berikut ini diuraikan secara singkat kekhususan perkembangan tersebut untuk setiap program.

1. Program DII PGSD

Program Penyetaraan DII PGSD masih terus menjadi salah satu pilihan para guru SD yang ingin meningkatkan kualifikasinya. Hal ini dapat dimaklumi paling tidak karena dua alasan. Pertama, dengan memilih program ini, untuk mengikuti pendidikan, para guru tidak perlu meninggalkan tugasnya sebagai guru dan kedua, biaya yang cukup terjangkau membuat para guru tidak menanggung beban finansial yang terlalu berat. Disamping itu, adanya upaya UT untuk mendapatkan beasiswa bagi para guru melalui kerja sama dengan pemerintah daerah yang dirintis sejak tahun 2000, membuat program ini menjadi pilihan utama bagi para guru.

Dari segi program, tidak banyak perubahan yang terjadi karena penerapan Kurikulum 1996 yang dimulai pada tahun akademik 1997/1998 masih tetap diterapkan dengan berbagai penyesuaian yang lebih banyak terfokus pada penyelenggaraan program. Satu perkembangan yang perlu dicatat dalam program ini adalah dikembangkannya program layanan bagi mahasiswa Aktif Lewat Masa Studi (ALMS) melalui kerja sama dengan Direktorat Tenaga Kependidikan (Dit. Tendik), sejak tahun 2002 sampai dengan 2005 (Dekan FKIP-UT, 2005). Program ini memberikan layanan tutorial khusus yang memacu mahasiswa DII PGSD yang belum lulus untuk belajar lebih giat sehingga mampu menyelesaikan studinya.

Pada tahun 2006 terjadi perubahan dalam Kurikulum Program DII PGSD. Perubahan ini terkait dengan adanya kerja sama antara UT dan Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, yang sedang gencar-gencarnya meluncurkan program Pemberantasan Buta Aksara (PBA). Untuk mengakomodasi program PBA ini, para guru SD yang sedang mengikuti Program DII PGSD dianggap tepat untuk menjadi salah satu ujung tombak di lapangan. Sehubungan dengan itu dikembangkan satu matakuliah yang memungkinkan para guru SD ini memiliki kemampuan untuk membimbing warga belajar (WB) dari buta aksara menjadi melek aksara. Matakuliah tersebut

berkode PGSD2407 dengan nama Pendidikan Masyarakat, dan dapat diambil oleh mahasiswa DII PGSD semester 4. Sebagai kompensasi, mahasiswa yang mengambil matakuliah ini dibebaskan 2 sks dari matakuliah Pendidikan Agama pada semester 5, sehingga mereka ini hanya wajib mengambil matakuliah Pendidikan Agama 2 sks dari yang semula 4 sks. Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam program uji coba PBA pada tahun 2006 ini adalah 579 orang, yang terdiri dari mahasiswa DII PGSD guru kelas 577 orang dan dua orang mahasiswa DII Pendidikan Olah Raga. Setiap mahasiswa ditugaskan membina tujuh orang WB. Pada tahun 2007, jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam program PBA meningkat hampir dua kali lipat seiring dengan peningkatan dana PBA yang disediakan oleh pemerintah.

Sementara itu, jumlah mahasiswa dan lulusan sejak dibukanya program ini pada tahun akademik 1990/1991 sampai dengan awal 2007 disajikan pada Tabel 3.

Sebagaimana sudah dipaparkan pada bagian terdahulu, program ini mendidik guru kelas SD dan Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan di SD atau sering disebut DII Guru Penjaskes, yang kemudian berubah nama menjadi DII Pendidikan Olah Raga. Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa jumlah mahasiswa sejak dibukanya Program DII PGSD ini sampai tahun 2007 adalah 741.186 orang, dengan jumlah lulusan sebanyak 511.320 orang. Ini berarti, masih ada 229.866 orang yang belum lulus. Dibandingkan dengan jumlah mahasiswa dan lulusan pada tahun 1999 yang terdapat pada Tabel 1, jumlah ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jumlah lulusan yang mencapai 511.320 orang dalam kurun waktu sekitar 16 tahun menunjukkan peran PJJ yang sangat signifikan dalam meningkatkan kualifikasi guru SD.

Tabel 3. Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Program DII PGSD sampai dengan Awal 2007

No.	Program Studi	Jumlah Mahasiswa		Total Mahasiswa	Jumlah Lulusan		Total Lulusan
		Swadana	Beasiswa		Swd.	Beasiswa	
1.	Pendidikan Olah Raga	11.224	42.985	54.207	3.636	35.083	38.719
2.	DII PGSD Guru Kelas	336.123	350.854	686.400	202.119	270.482	472.601
	Total	347.347	393.839	741.186	205.755	305.565	511.320

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kualifikasi guru dalam semua jenjang pendidikan ditingkatkan menjadi minimal sarjana (S1) atau Diploma 4. Untuk mengakomodasi perubahan ini, FKIP UT segera melakukan pembenahan. Sejak tahun 2002, UT bersama dengan enam LPTK lain (Universitas Negeri Jakarta, Universitas Atma Jaya, Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo, dan Universitas Negeri Malang) mendapat kepercayaan dari Ditjen Dikti untuk menyelenggarakan Program S1 PGSD. Dengan demikian, ketika diluncurkannya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UT sudah siap untuk berperan dalam meningkatkan kualifikasi guru SD sampai jenjang sarjana (S1 PGSD). Bahkan, sampai awal 2007, jumlah mahasiswa S1 PGSD sekitar 69 ribu orang, sedangkan lulusannya sudah mencapai sekitar 13 ribu orang.

Sesuai dengan kualifikasi guru SD yang minimal harus berpendidikan S1 PGSD seperti tuntutan dalam UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen, maka Program DII PGSD secara berangsur-angsur ditutup (*phasing out*). Mulai semester 2007.1, Program ini tidak lagi menerima mahasiswa baru. Mahasiswa yang sudah ada dalam Program diberi kesempatan untuk menyelesaikan studi sampai dengan semester 2008.2 atau mengalih ke Program S1 PGSD. Namun demikian, Program DII Pendidikan Guru Olah Raga masih tetap dibuka karena UT belum

memiliki Program S1 Pendidikan Olah Raga.

Satu perkembangan lain yang perlu diketengahkan dalam kaitan dengan peningkatan kualifikasi guru yang diselenggarakan oleh FKIP-UT adalah pembukaan Program DII Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak (DII PGTK) pada semester 2004.2. Program ini berada di bawah Jurusan Pendidikan Dasar bersama dengan Program DII Pendidikan Olah Raga, dan Program S1 PGSD. Program DII PGTK dibuka untuk meningkatkan kualifikasi guru TK dari lulusan setingkat SLTA menjadi setingkat Diploma II. Dengan demikian, semua mahasiswa program ini adalah guru TK, baik swasta maupun negeri. Sampai dengan awal 2007, jumlah mahasiswa DII PGTK sudah mencapai sekitar 14 ribu orang.

2. Program DIII PGSM

Mahasiswa DIII PGSM dari empat program studi terdahulu yang belum menyelesaikan studinya dalam kurun waktu yang diberikan harus membiayai sendiri penyelesaian studinya. Mahasiswa yang menyelesaikan studi dengan biaya sendiri diubah statusnya menjadi mahasiswa swadana (reguler), sehingga mereka disebut sebagai mahasiswa DIII Reguler. Sistem yang berlaku bagi program DIII Reguler ini sama dengan sistem yang berlaku bagi program reguler lainnya. Jumlah mahasiswa dan lulusan DIII PGSM dari empat program studi, sebelum diubah menjadi DIII Reguler, disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Mahasiswa, Lulusan, dan Jumlah Mahasiswa yang Belum Lulus Program DIII PGSM (Data: 2 Februari 2007)

No.	Program Studi	Tahun Program Dibuka	Jumlah Mahasiswa	Jumlah Lulusan	Jumlah Mahasiswa yang Belum Lulus
1.	Pendidikan Matematika	1992/1993	19332	14428	4904
2.	Pendidikan IPA	1992/1993	16290	11320	4970

3.	Pendidikan Bahasa Inggris	1994/1995	10133	3924	6209
4.	Pendidikan Bahasa Indonesia	1997/1998	8107	1434	6673
	Total		53862	31106	22756

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah mahasiswa empat program studi dari tahun akademik 1997/1998 sampai dengan diubahnya status program menjadi DIII Reguler tidak mencolok, bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada penambahan (dari 53.591 pada tahun akademik 1997/1998 menjadi 53.882) ketika program DIII PGSM diubah menjadi DIII Reguler (bandingkan dengan Tabel 2). Hal ini dapat dipahami karena semua mahasiswa DIII PGSM ini adalah mahasiswa beasiswa. Pengalokasian beasiswa tentu didasarkan pada kebutuhan guru bidang studi tertentu pada kurun waktu tertentu pula. Namun demikian, dari segi jumlah lulusan, keempat program studi ini ada peningkatan, yaitu dari 24.683 lulusan menjadi 31.106 lulusan.

Sebagaimana sudah diisyaratkan pada uraian terdahulu, pada tahun akademik 1998/1999 dibuka dua Program Penyetaraan DIII PGSM, yaitu Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) serta Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi (PEKO). Administrasi, kedua program ini adalah Program DIII Reguler, meskipun para mahasiswanya adalah mahasiswa beasiswa.

Menindaklanjuti UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan untuk efisien program kependidikan maka dengan SK Rektor Nomor 426a/J31/Kep/2003, terhitung mulai semester 2004.1 seluruh Program DIII Kependidikan FKIP-UT ditutup dan diintegrasikan ke dalam program sarjana yang sejenis. Ini berarti, bahwa sejak semester 2004.1 Program DIII Kependidikan tidak menerima mahasiswa baru dan mahasiswa yang sudah ada dalam program diberi kesempatan untuk menyelesaikan studinya sampai semester 2005.2. Dalam

realisasinya, masa untuk menyelesaikan studi ini diperpanjang sampai semester 2006.2. Selanjutnya, para mahasiswa yang belum lulus diarahkan untuk beralih ke Program Sarjana (S1) sejenis atau diberi Surat Keterangan Penempuhan Matakuliah bagi yang tidak ingin mengalih ke Program S1. Jumlah mahasiswa dan lulusan Program DIII Reguler sampai dengan awal 2007, disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Mahasiswa, Lulusan, dan Jumlah Mahasiswa yang Belum Lulus Program DIII Reguler (Data: 8 Februari 2007)

No.	Program Studi	Jumlah Mahasiswa	Jumlah Lulusan	Jumlah Belum Lulus
1.	Pendidikan Matematika	1078	813	265
2.	Pendidikan IPA	1215	835	380
3.	Pendidikan Bahasa Inggris	1862	1665	197
4.	Pdd. Bahasa Indonesia	3122	2916	206
5.	Pendidikan Ekonomi dan Koperasi	2539	2144	395
6.	Pendidikan Pancasila dan Kewargaan Negara	1837	1706	131
	Total	11653	10079	1574

Dengan membandingkan angka pada Tabel 4 dan Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa tidak semua mahasiswa dari empat program studi (Pendidikan Matematika, Pendidikan IPA, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Pendidikan Bahasa Indonesia) yang belum lulus mau menyelesaikan studinya melalui Program DIII Reguler dengan biaya sendiri. Jumlah mahasiswa DIII Reguler per program studi lebih kecil dari mahasiswa yang belum lulus ketika masih berstatus mahasiswa DIII PGSM. Seharusnya, jika semua mahasiswa yang belum lulus tetap mendaftar untuk menyelesaikan studinya, jumlah ini harus sama. Di samping jumlah mahasiswa dan lulusan empat program studi, pada Tabel 5 juga tercantum jumlah mahasiswa dan lulusan Program DIII Pendidikan Ekonomi dan Koperasi serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jumlah mahasiswa yang belum berhasil

menyelesaikan studi sampai dengan batas waktu terakhir cukup besar, yaitu 1574 orang. Jumlah inilah yang disarankan langsung mengalih ke Program S1 sejenis, atau akan diberi surat keterangan jika tidak berkeinginan beralih program.

Ketika PP Nomor 19 tahun 2005 dan UU Nomor 14 tahun 2005 diberlakukan, keputusan untuk menutup semua Program DIII Kependidikan, sebagaimana yang sudah diuraikan menjadi sangat relevan. Dengan penutupan program tersebut, pendidikan guru untuk sekolah menengah difokuskan pada program Pendidikan S1 Bidang Studi yang sudah diselenggarakan sejak berdirinya UT. Dalam hal ini FKIP-UT telah memiliki Program S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan Biologi, dan Pendidikan Kimia. Tahun 2003, dua program sarjana kependidikan, yaitu Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi dan Koperasi (PEKO) dan S1 Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dibuka berdasarkan ijin resmi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, UT sudah siap berperan dalam peningkatan kualifikasi guru sekolah menengah sampai jenjang sarjana (S1).

Dengan ditutupnya Program D II PGSD pada semester 2007.1 dan Program DIII Kependidikan pada semester 2004.1, maka program pendidikan guru yang diselenggarakan oleh FKIP-UT merupakan program pada jenjang sarjana (S1), kecuali Program D II Pendidikan Olah Raga dan Program D II PGTK. Hal ini membuktikan bahwa UT mempunyai komitmen yang tinggi untuk membantu peningkatan kualifikasi guru sesuai dengan tuntutan undang-undang.

KESIMPULAN

Dari uraian dapat disimpulkan bahwa program penyetaraan yang diselenggarakan oleh FKIP-UT memang merupakan cikal bakal dari berbagai program peningkatan kualifikasi guru SD dan SMP yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan kebijakan pemerintah. Berbagai pendekatan, termasuk filosofi yang melandasi

program penyetaraan, masih tetap merupakan landasan utama program-program selanjutnya meskipun ada berbagai modifikasi yang disesuaikan dengan tuntutan kebijakan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan jumlah lulusan yang sudah dihasilkan, program penyetaraan juga mempunyai peran penting dalam peningkatan kualifikasi guru. Peran ini menjadi lebih sentral karena program penyetaraan ini diselenggarakan melalui PJJ, sehingga guru dapat meningkatkan kualifikasinya tanpa meninggalkan tugas pokoknya sebagai guru. Jumlah guru yang sudah berhasil meningkatkan kualifikasinya dalam kurun waktu sekitar 16 tahun merupakan jumlah yang patut diperhitungkan. Dibandingkan dengan lulusan yang dihasilkan oleh LPTK tatap muka dalam kurun waktu yang sama, jumlah ini berada jauh di atasnya. Oleh karena itu, tampaknya peningkatan kualifikasi guru melalui PJJ merupakan salah satu alternatif utama.

Satu pelajaran yang dapat dipetik (*lesson learned*) dari program penyetaraan ini adalah mengenai penghargaan terhadap pengalaman mengajar para guru yang mengikuti program peningkatan kualifikasi, yang memang layak diperhitungkan. Namun, penganugrahan kredit melalui penilaian HBMP ternyata tidak menjanjikan karena banyaknya dokumen yang harus disiapkan dan rumitnya prosedur yang harus ditempuh untuk mendapat penganugrahan kredit. Oleh karena itu, perlu dipikirkan cara lain untuk menghargai pengalaman mengajar guru. Cara tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi akademik maupun pengelolaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dekan FKIP-UT. 2005. *Laporan Akhir Masa Jabatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 2001-2005*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Depdikbud. 1995. *Pedoman penyelenggaraan program penyetaraan DIH guru sekolah dasar (0 s.d. 10)*. Jakarta: Proyek Peningkatan Mutu Guru SD Setara DIH.

- Depdikbud. 1992. *Panduan penyelenggaraan program penyetaraan DIII guru SMP (I s.d. 8)*. Jakarta: Proyek Penataran Guru SLTP Setara DIII.
- Egelston, J. 1984. *A summative evaluation of pemantapan kerja guru*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
- Jiono. 1992. *Laporan penelitian kemampuan/pemahaman guru tentang IPA dan sarana pelajaran IPA di SMP*. Jakarta: Balitbang-Dikbud.
- Nasoection, N. 1985. *Laporan penelitian proses belajar-mengajar bidang studi IPA di SPG negeri Cianjur*. Jakarta: Balitbang Dikbud.
- Nasoection, N. 1996. *Laporan pendidikan IPA dan teknologi di SMP (Science and technology secondary education project)*. Naskah disajikan pada seminar Dies Natalis UT, 28 Agustus 1996.
- Nielson, D., Somersset, A., Mahadi, R., & Wardani, I G.A.K. 1996. *Sthrengthening Teacher Competency and Student Learning*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0854/U/1989, tentang Pengadaan dan Penyetaraan Guru Sekolah Dasar.
- Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 426a/J31./KEP/2003 tanggal 12 November 2003, tentang Penutupan Seluruh Program DIII FKIP Universitas Terbuka dan Pengintegrasian ke dalam Program Sarjana Sejenis.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Wardani, I G.A.K. 1998. *Pemberdayaan Guru: Suatu usaha peningkatan mutu pendidikan*. Naskah disampaikan sebagai Orasi Ilmiah pada Upacara Dies Natalis UT, 14 September 1998.

SLTP TERBUKA: ALTERNATIF PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN

Machdum Almunawar

Kebutuhan akan SLTP Terbuka berawal dari terjadinya ledakan Sekolah Dasar (SD) sebagai akibat dari kebijakan SD Inpres 1973/1974 (Kartasuryadkk. 1992). Perluasan kesempatan belajar dan peningkatan daya tampung pendidikan dasar di Indonesia masih merupakan masalah yang besar. Usaha peningkatan daya tampung di tingkat SD dilakukan antara lain dengan membangun SD Inpres pada awal Pelita II.

Pada awal Pelita III saat murid SD Inpres angkatan pertama lulus sekolah terjadi ledakan lulusan SD. Jumlah lulusan itu tercatat sebanyak 2.546.000 orang murid. Hal tersebut menimbulkan masalah baru terhadap penyediaan kesempatan belajar pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Dari jumlah lulusan SD tersebut dapat ditampung di SLTP sekitar 71,1%. Padahal target yang harus dicapai pada akhir Pelita V adalah 85%. Faktor lain yang memperberat masalah ini ialah kurangnya tenaga pengajar yang berkualifikasi, dana, ruang belajar, dan fasilitas belajar.

Banyak usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Usaha tersebut antara lain dengan meningkatkan kapasitas sekolah yaitu ada, misalnya penyediaan ruang kelas dan gedung baru, pengadaan guru dengan program kilat, pengangkatan guru-guru baru, serta peningkatan mutu guru. Beragam usaha tersebut ternyata belum sepenuhnya dapat mengatasi masalah secara tuntas. Usaha yang ditempuh dengan mengangkat guru baru, meningkatkan mutu, menyediakan ruang kelas dan gedung sekolah baru tentu saja dapat mengurangi masalah kurangnya daya tampung tersebut. Selain itu masih ada masalah lain, yaitu faktor sosial, ekonomi, dan geografis yang menyebabkan siswa tidak dapat mengikuti pendidikan yang ada. Misalnya siswa yang tinggal di lokasi terpencil atau terisolasi, dan siswa yang harus bekerja pada jam-jam sekolah. Karena itu perlu dicari cara lain yang dapat dikembangkan

secara cepat tanpa banyak menimbulkan masalah dalam penyediaan biaya, tenaga guru yang berkualifikasi dan ruang-ruang belajar yang baru.

Masalah tersebut telah mendorong para ahli dalam bidang pendidikan untuk mencari suatu cara baru (inovasi) dalam sistem pendidikan yang mampu memecahkan masalah pendidikan yang belum dapat dipecahkan melalui usaha yang bersifat konvensional. Setelah secara sistematis masalah yang ada dianalisis dan dicarikan alternatif pemecahannya maka dikembangkan suatu sistem pendidikan terbuka jenjang SLTP yang disebut Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Terbuka (SLTP Terbuka). Sebelum berlakunya Undang-Undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989, SLTP Terbuka dikenal sebagai SMP-Terbuka.

Sistem pendidikan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan belajar kepada lulusan SD/Madrasah Ibtidaiyah yang tidak dapat melanjutkan ke sekolah yang ada karena alasan sosial, ekonomi, dan geografis. Sistem ini diselenggarakan dengan memanfaatkan sumber belajar yang telah tersedia di masyarakat seperti tenaga pengajar, ruang belajar, dan fasilitas belajar. Karena itu sistem ini dapat dikembangkan dengan relatif cepat tanpa menuntut disediakannya guru dan gedung sekolah khusus.

PERKEMBANGAN SLTP TERBUKA

Setelah mempertimbangkan berbagai hal, Pemerintah menetapkan bahwa model sub sistem pendidikan SLTP Terbuka menjadi alternatif pilihan untuk mengatasi masalah pendidikan. Untuk menemukan model yang efektif, pemerintah memutuskan untuk mengadakan perintisan dalam skala kecil sebelum menyebarkan secara luas.

1. Tahap Perintisan

Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 21 Pebruari 1979 Nomor 034/U/1979, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (BP3K) diberi wewenang untuk mengadakan perintisan SMP

Terbuka. Kemudian surat Ketua BP3K Nomor 1321/G1.1/1/79 menunjuk Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom Dikbud) untuk melaksanakan Keputusan Menteri tersebut.

Melalui berbagai pertemuan, studi ke lapangan, rapat koordinasi dan seminar nasional maka ditetapkan lima lokasi perintisan, yaitu:

- SMP Terbuka Kalianda, di Lampung Selatan, Propinsi Lampung
- SMP Terbuka Plumbon, Cirebon, Propinsi Jawa Barat;
- SMP Terbuka Adiwerna, Tegal, Propinsi Jawa Tengah;
- SMP Terbuka Kalisat, Jember, Propinsi Jawa Timur; dan
- SMP Terbuka Terara, Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Selama masa perintisan telah dilakukan berbagai studi dan pemantauan untuk melihat sejauhmana kelaikan dari sistem tersebut, antara lain sebagai berikut.

- Tahun 1981, Tim Peneliti dari IKIP Yogyakarta yang dipimpin Imam Barnadib mengungkapkan adanya berbagai masalah yang dihadapi. Masalah utama menyangkut terbatasnya anggaran yang disediakan dan tidak tercapainya rasio 90% belajar mandiri, 10% tatap muka. Namun demikian proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan penggunaan bahan cetak modul sebagai media utama terbukti dapat dipergunakan dengan baik pula.
- Tahun 1982, diadakan studi yang dilakukan oleh Michael Calvano dan Arief S. Sadiman. Mereka menemukan bahwa siswa SMP Terbuka menunjukkan hasil kinerja yang dapat diperbandingkan dengan rekan-rekan mereka di SMP induknya. Meskipun tidak sebaik rekan mereka di SMP induk namun dari segi perilaku, siswa SMP Terbuka menunjukkan sikap lebih aktif, berprakarsa, dan lebih bertanggung jawab.
- Tahun 1983 dievaluasi kembali oleh Tim dari IKIP Yogyakarta yang dipimpin Imam Barnadib. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem akan berfungsi lebih baik bila

pengiriman bahan belajar dapat diusahakan tepat waktu dan sistem pengelolaan belajar mengajarnya diperbaiki.

Terungkap juga bahwa jumlah lulusan SMP Terbuka yang melanjutkan ke SLTA cukup banyak, sedangkan yang lain menggunakan ijazahnya untuk mencari kerja.

Selama masa perintisan tersebut (1978/1979 s.d 1983/1984) telah berlangsung tiga kali ujian negara. Catatan hasil belajar siswa SMP Terbuka di lima lokasi perintisan tersebut menunjukkan kemandirian lulusan di atas 90% dari jumlah siswa yang ikut ujian, meskipun angka ini sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan angka lulusan di SMP induknya.

2. Tahap Penyebaran

Penyebaran SLTP Terbuka semula direncanakan untuk mengantisipasi akan adanya kendala kurangnya gedung sekolah. Tenggang waktu diberikan sampai tahun 1989 saat mana diperkirakan Pemerintah akan mempunyai dana untuk menambah gedung sekolah serta fasilitas yang diperlukan. Namun kendala keuangan Pemerintah tidak kunjung membaik. Karena itu pada tahun 1989 lokasi SLTP Terbuka mulai dikembangkan yang semula hanya lima lokasi di lima propinsi menjadi:

- 8 lokasi di 5 propinsi pada tahun 1988/1989
- 15 lokasi di 9 propinsi pada tahun 1989/1990
- 20 lokasi di 14 propinsi pada tahun 1990/1991
- 25 lokasi di 19 propinsi pada tahun 1991/1992
- 34 lokasi di 25 propinsi pada tahun 1992/1993
- 59 lokasi di 26 propinsi pada tahun 1994/1995

Pada tahun 1994 Pemerintah mencanangkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun (Wajar Dikdas) dengan target penuntasannya selama lima belas tahun. Namun karena makin bertambahnya tantangan yang akan dihadapi terutama dalam menuju persaingan bebas tingkat ASEAN tahun 2003/2004 dan tahun 2020 tingkat Asia Pasifik maka target penuntasan Wajar Dikdas dipercepat menjadi sepuluh tahun. Ini jelas merupakan tantangan yang tidak ringan namun menarik untuk kita jawab.

Tantangan ini lebih berat lagi karena angka partisipasi kasar baru mencapai 52,67%.

Berbagai upaya telah dipersiapkan sejak lama dan telah dikembangkan dengan sungguh-sungguh. Namun data tahun 1993 menunjukkan bahwa masih terdapat 13.244.000 anak usia 13-15 tahun. Dari angka tersebut sebanyak 6.976.100 orang menjadi siswa SLTP sedangkan sisanya sebanyak 6.267.900 orang anak usia SLTP masih harus diusahakan pelayanan pendidikannya.

Berbagai cara konvensional telah ditempuh namun tetap belum bisa menampung jumlah anak tersebut. Karena itu pola SLTP Terbuka diharapkan menjadi andalan dalam mengatasi masalah tersebut dengan target daya tampung sebanyak 2.250.450 orang anak selama 10 tahun.

Sejak saat itu SLTP Terbuka dikembangkan secara luas sehingga menjadi:

- 356 lokasi di 27 propinsi pada tahun 1995/1996,
- 956 lokasi di 27 propinsi pada tahun 1996/1997,
- 2356 lokasi di 27 propinsi pada tahun 1997/1998, dan
- 3773 lokasi di 27 propinsi pada tahun 1998/1999.

Demikianlah seterusnya nantinya setiap tahun akan terus bertambah sehingga pada akhir Pelita VII nanti SLTP Terbuka diharapkan dapat menampung paling tidak 2.250.450 anak usia SLTP lulusan SD/MI. Jumlah siswa yang dapat ditampung melalui SLTP Terbuka sejak tahun 1979 sampai dengan saat ini terus bertambah. Tercatat saat ini sebanyak 376.620 orang siswa pada 3645 lokasi SLTP Terbuka (Data siswa dicatat berdasarkan laporan yang masuk. Masih ada 28 lokasi yang belum memberikan laporan).

Tabel 1 menyajikan data perkembangan lokasi dan siswa pada tahun ajaran 1994/1995 sampai dengan 1998/1999.

Tabel 1. Perkembangan SLTP Terbuka Jumlah Lokasi dan Jumlah Siswa (Keadaan Tahun Ajaran 1994/1995 s.d. 1998/1999)

Tahun Ajaran	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		Total Jumlah Siswa
	Jumlah Lokasi	Jumlah Siswa	Jumlah Lokasi	Jumlah Siswa	Jumlah Lokasi	Jumlah Siswa	
1994/1995	59	9,738	34	4,869	20	3,759	18,366
1995/1996	356	28,480	59	9,738	34	4,869	43,087
1996/1997	956	52,191	356	28,480	59	9,738	64,409
1997/1998	2,356	127,090	956	52,191	356	28,480	207,761
1998/1999	3,773	197,369	2,356	127,090	956	52,191	376,620

Siswa-siswa SLTP Terbuka pada umumnya berasal dari keluarga miskin dan berpendidikan rendah. Mayoritas dari orang tua siswa adalah petani miskin. Beberapa diantaranya adalah pengusaha kecil, buruh, pekerja bangunan, montir, penarik beca, pembantu rumah tangga, sedangkan minoritas terdiri dari pegawai rendah di pemerintahan. Dalam kondisi seperti ini, pada umumnya sikap orang tua terhadap anaknya adalah bahwa anak harus membantu orang tua mencari nafkah bagi keluarga mereka.

Beberapa alasan SLTP Terbuka disebarluaskan sehingga menjadi pilihan andalan untuk menuntaskan Wajar Dikdas 9 Tahun, adalah hal-hal berikut.

- SLTP Terbuka telah menunjukkan beberapa hasil positif, seperti lulusannya dapat melanjutkan ke SLTA, diterima bekerja di masyarakat, bertanggung jawab, *adaptable*, mandiri dan sebagainya.
- SLTP Terbuka sebagai suatu sistem pendidikan jalur sekolah telah dapat diterima oleh masyarakat.
- SLTP Terbuka sebagai suatu sistem pendidikan dapat mengatasi masalah pendidikan yang sulit diatasi dengan menggunakan sistem konvensional. Lulusan SD yang tinggal di daerah terpencil, yang tinggal di daerah yang berpenduduk sedikit, yang harus bekerja mencari nafkah pada jam-jam sekolah dapat diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan tingkat SLTP melalui SLTP Terbuka.

- Titik berat pembangunan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh GBHN 1993 adalah perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu di segala jenis dan jenjang pendidikan. Salah satu program Pemerintah untuk menunjang kebijakan tersebut yaitu Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang telah dicanangkan Presiden pada tanggal 2 Mei 1994. Selanjutnya GBHN 1998 mengamanatkan bahwa pembangunan pendidikan dalam Repelita VII diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta didik, sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan yang berwawasan budaya dan lingkungan, yang selanjutnya akan meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan masyarakat Indonesia. Dalam kerangka itulah Presiden telah mengarahkan agar pembangunan pendidikan diprioritaskan pada pembangunan sumberdaya manusia, dengan fokus penuntasan Wajar Dikdas. Hal itu juga dikaitkan dengan usaha menunjang program peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan.
- SLTP Terbuka diyakini sebagai alternatif yang potensial untuk membantu mensukseskan Wajar Dikdas karena selain sifatnya yang luwes, dapat dibuka dengan cara relatif lebih cepat karena dapat mendayagunakan sumber-sumber yang ada (ruang belajar dan guru), juga terbukti telah memberikan hasil memadai. SLTP Terbuka telah teruji mampu memberikan pendidikan tingkat SLTP kepada anak-anak lulusan SD/MI, mengantarkan mereka hingga kelas terakhir, berhasil dalam EBTANAS dan EBTANAS, memperoleh ijazah SLTP dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.
- Pengakuan *The Commonwealth of Learning* dan UNESCO terhadap SLTP Terbuka sebagai salah satu sistem pendidikan terbuka pada jenjang SLTP yang berhasil, telah memperkuat keyakinan kita bahwa sistem ini layak dipercaya untuk ikut menuntaskan Wajar Dikdas.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa lokasi SLTP Terbuka saat ini sebanyak 3773 lokasi yang tersebar di 27 propinsi

di seluruh Indonesia. Pada setiap lokasi SLTP Terbuka banyak melibatkan berbagai pihak, yaitu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru Bina, Guru Pamong, Guru Pamong Khusus, Guru Bimbingan dan Penyuluhan (BP), dan tenaga administrasi.

Kepala Sekolah adalah kepala SLTP induk sekaligus menjadi kepala SLTP Terbuka yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan SLTP Terbuka secara keseluruhan. Tanggung jawab pelaksanaan harian pengelolaan SLTP Terbuka diserahkan kepada guru senior yang ditunjuk menjadi wakil kepala SLTP Terbuka. Kepala SLTP Terbuka saat ini sebanyak 3773 orang dan pada umumnya (76%) berijazah Strata I dan sisanya (24%) berijazah Sarjana Muda atau Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (PGSLP).

Wakil Kepala Sekolah adalah guru senior dari SLTP induknya yang ditunjuk mewakili Kepala Sekolah dalam pengelolaan kegiatan SLTP Terbuka sehari-hari. Jumlah Wakil Kepala SLTP Terbuka saat ini sebanyak 3773 orang dengan latar belakang pendidikan Strata I (31 %) dan sisanya (69%) berijazah Sarjana Muda atau PGSLP.

Guru Bina adalah guru mata pelajaran dari SLTP induknya. Sebagai guru mata pelajaran mereka mempunyai kualifikasi mengajar dalam mata pelajarannya dan diserahi tugas membina pembelajaran pada SLTP Terbuka. Tugas dan tanggung jawab guru bina meliputi antara lain: merencanakan, mengatur pembagian bahan belajar, mempelajari lebih dahulu bahan belajar yang akan dibagikan, mengawasi, membimbing, mengatur pertemuan tatap muka, membahas kesulitan belajar siswa, mengatur penggunaan fasilitas belajar, dan menilai hasil belajar siswa. Jumlah guru bina saat ini tercatat sebanyak 43.590 orang dengan latar belakang pendidikan: 16,3% Strata I, 16,4% Sarjana Muda atau Diploma III atau PGSLP, 28,6% Diploma II, 38,7% Diploma I. Pada umumnya mereka bertempat tinggal tidak terlalu jauh dari SLTP induknya.

Guru Pamong pada umumnya adalah guru SD atau anggota masyarakat yang bertugas membantu guru bina dalam pelaksanaan

kegiatan pembelajaran di Tempat Kegiatan Belajar (TKB). Guru Pamong berperan sebagai fasilitator yang menjaga agar para siswa SLTP Terbuka benar-benar belajar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan jadi TKB. Guru Pamong tidak mengajar karena mereka tidak mempunyai kewenangan untuk mengajar di tingkat SLTP, melainkan hanya memberikan tuntunan serta dorongan manakala siswa mengalami kesulitan dalam belajarnya. Bila guru pamong sendiri tidak dapat mengatasi kesulitan siswa, mereka akan melaporkannya kepada guru bina yang bersangkutan agar kesulitan tersebut dapat ditangani oleh guru bina pada pertemuan tatap muka. Dalam menunjuk guru pamong, prioritas diberikan kepada mereka yang memiliki sertifikat serta berpengalaman mengajar di SD. Meskipun demikian tokoh masyarakat, tenaga pendidikan non formal, mahasiswa dan lain-lain yang mampu dan bersedia membimbing siswa belajar di TKB dapat diangkat menjadi Guru Pamong. Pada saat ini jumlah guru pamong sebanyak 9.721 orang terdapat di 3.773 SLTP Terbuka. Pada umumnya mereka adalah Kepala dan guru SD dengan latar belakang pendidikan Diploma 2 (47%) dan SPG 53%.

Guru Pamong Khusus adalah anggota masyarakat yang mempunyai keterampilan khusus, keahlian atau pengetahuan yang tidak terdapat dalam kurikulum SLTP namun berguna bagi siswa dan masyarakat sekitarnya. Keahlian tersebut meliputi bidang keagamaan, olahraga dan kesehatan, kerajinan tangan dan kesenian, serta muatan lokal lainnya. Guru Pamong Khusus dapat seorang tokoh keagamaan, seorang atlit/pembina olahraga, seniman, pengrajin, pemilik salon kecantikan, pedagang, atau seorang profesional dengan keahlian tertentu yang bersedia membantu perkembangan siswa SLTP Terbuka.

Guru Bimbingan dan Penyuluhan (Guru BP) yang ada di SLTP induk dengan sendirinya menjadi guru BP di SLTP Terbuka. Namun bila tambahan tugas di SLTP Terbuka terlalu memberatkan tugas bagi guru BP yang ada maka untuk di SLTP Terbuka dapat ditunjuk guru lain yang memiliki kemampuan menjalankan tugas bimbingan dan penyuluhan.

Tenaga administrasi SLTP Terbuka dirangkap oleh tenaga administrasi SLTP induknya. Tanggung jawab mereka meliputi administrasi persuratan, keuangan, kesiswaan, ketenagaan, dan perlengkapan.

Perkembangan lokasi, TKB, Kepala sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru Bina, Guru Pamong, Guru BP, dan Tenaga Administrasi SLTP Terbuka sampai dengan sekarang dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Lokasi, Tkb, Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah, Guru Bina, Guru Pamong, Guru Bp, Dan Tenaga Administrasi Sltp Terbuka Kcadaan Tahun Ajaran 1994/1995 S.D. 1998/1999

Tahun Ajaran	Jumlah Lokasi	Jumlah TKB	Kelapa Sekolah/ Wakil Kepala Sekolah	Guru Bina	Guru Pamong	Guru BP	Staff Administrasi
1994/1995	59	590	106	708	590	59	177
1995/1996	356	2848	712	4272	2848	356	1068
1996/1997	956	5736	1912	11472	5736	956	2868
1997/1998	2356	7068	4712	28272	7068	2356	7068
1998/1999	3773	9721	7546	43590	9721	3773	11319

HASIL YANG DICAPAI OLEH SLTP TERBUKA

SLTP Terbuka telah diselenggarakan selama kurang lebih 20 tahun. Selama 20 tahun itu sudah banyak hasil yang diperoleh. Hasil yang telah diperoleh sampai saat ini antara lain sebagai berikut.

1. Suatu sistem pendidikan terbuka tingkat SLTP yang sesuai untuk situasi dan kondisi di Indonesia. Sungguhpun sistem ini masih perlu disempurnakan dan dimantapkan tetapi sistem ini sudah dapat berjalan dan menghasilkan lulusan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diterima masyarakat. (Evaluasi sistem SLTP Terbuka, 1981, 1985).
2. Lulusan SLTP Terbuka menurut guru-guru SLTA dan para

pengusaha yang menampungnya mempunyai sifat *adaptabel*, mampu berorganisasi, mempunyai kemampuan akademik tidak di bawah merata, mempunyai inisiatif dan tanggung jawab besar. (Evaluasi sistem SLTP Terbuka 1981, 1985).

3. Sebuah bentuk kerjasama yang baik antara Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom Dikbud) dan Direktorat Pendidikan Menengah Umum (Dit Dikmenum) yang secara bersama-sama mengembangkan dan membina pelaksanaan sistem SLTP Terbuka. Dalam kerjasama ini Pustekkom Dikbud terutama bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem SLTP Terbuka, dan Dit Dikmenum bertanggung jawab dalam membina pelaksanaan SLTP Terbuka.
4. Sebuah buku pola operasional dan dua buah buku Petunjuk untuk Guru Bina dan untuk Guru Pamong yang dapat digunakan untuk para pengelola dan pelaksana sebagai pedoman dalam menyelenggarakan SLTP Terbuka.
5. Seperangkat bahan belajar mandiri (90 buku untuk kelas I, II, dan III) yang disajikan dalam bentuk media cetak berupa modul, serta media non cetak seperti program audio/siaran radio, film bingkai, video/TV yang dikembangkan berdasarkan kurikulum yang berlaku.
6. Seperangkat modul orientasi SLTP Terbuka (15 judul) untuk memberikan orientasi bagi pembina, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru bina, dan guru pamong.
7. Sejumlah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru bina dan guru pamong yang telah terlatih dan mempunyai pengalaman dalam mengelola pelaksanaan SLTP Terbuka yang terdapat pada 3.773 lokasi. Mereka ini merupakan modal yang berharga dalam penyebarluasan SLTP Terbuka.
8. Sebuah tim pengembang bahan belajar yang meliputi tim penulis, tim pengkaji materi, tim pengembang instruksional yang telah terlatih dan mempunyai pengalaman dalam mengembangkan bahan belajar untuk pendidikan jarak jauh atau pendidikan terbuka.
9. Berbagai pola kegiatan belajar mengajar SLTP Terbuka. Pola-

pola ini telah berkembang di berbagai lokasi SLTP Terbuka sesuai dengan kondisi dan tersedianya sumber belajar di lokasi bersangkutan. Pola-pola ini setelah dimantapkan akan dapat digunakan oleh lokasi penyebaran yang kondisinya sama.

10. Berdasarkan laporan yang masuk sebanyak 956 lokasi SLTP Terbuka yang telah berhasil melaksanakan sistem tersebut dan meluluskan siswanya tahun ajaran 1998/1999. Sedangkan jumlah lokasi SLTP Terbuka saat ini sebanyak 3773 lokasi yang tersebar di 27 propinsi. Disamping itu ada sejumlah SLTP Terbuka yang dibuka oleh Pemerintah Daerah seperti di DKI Jakarta.
11. Laporan hasil evaluasi dan monitoring serta hasil rapat-rapat koordinasi yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan kebijakan-kebijakan lebih lanjut dalam pengembangan dan penyebaran SLTP Terbuka.

HAMBATAN DAN KESULITAN YANG DIHADAPI SLTP TERBUKA

Pengalaman dalam menyelenggarakan SLTP Terbuka selama hampir 20 tahun menunjukkan bahwa banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan sistem SLTP Terbuka. Namun hambatan dan kesulitan itu sedikit demi sedikit dapat teratasi. Pengalaman dalam mengatasi kesulitan ini kiranya dapat dijadikan pelajaran yang berharga supaya penyelenggaraan SLTP Terbuka selama penyebaran lebih lanjut dapat lebih baik dan lebih lancar. Hambatan dan kesulitan itu adalah sebagai berikut.

1. Kesulitan dalam penyediaan bahan belajar tepat pada waktunya. Kurangnya jumlah penulis yang berpengalaman telah menyebabkan kurang lancarnya penulisan modul dan penulisan naskah program media lainnya. Ketentuan dan peraturan yang berlaku juga menghambat kelancaran proses produksi dan reproduksi program. Akibat dari semua itu bahan belajar yang diperlukan untuk belajar terlambat sampai di lokasi.
2. Kesulitan yang dihadapi Kepala Sekolah dalam melaksanakan SLTP Terbuka karena bahan belajar terlambat sampai di

sekolah. Siswa SLTP Terbuka pada prinsipnya diharapkan dapat belajar dengan bantuan seminimal mungkin dari gurunya. Karena itu dalam sistem SLTP Terbuka bahan belajar mandiri itu merupakan komponen yang sangat penting. Bila bahan belajar itu terlambat datang dilokasi akan sangat sulit bagi Kepala Sekolah untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Hal tersebut hanya dapat diatasi bila Kepala Sekolah mempunyai rasa tanggung jawab, penuh kreatif dan mendapat dukungan dan bantuan sepenuhnya dari para guru dan anggota masyarakat.

3. Perlu adanya koordinasi yang mantap dalam pengelolaan SLTP Terbuka. Karena SLTP Terbuka dikelola oleh beberapa pihak, perlu adanya koordinasi yang baik dalam menyelenggarakan SLTP Terbuka. Koordinasi tersebut selama ini telah berjalan dengan baik tetapi karena pihak terkait itu masing-masing mempunyai tugas-tugas lain yang juga penting, koordinasi pengelolaan SLTP Terbuka tidak selamanya berjalan mulus.
4. Masih ada kecenderungan dari pelaksana SLTP Terbuka di tingkat sekolah untuk menambah jam belajar tatap muka dengan maksud membantu siswa dalam belajar. Sungguhpun kecenderungan ini mempunyai maksud baik, namun hal tersebut mengandung unsur-unsur yang kurang sesuai dengan sistem SLTP Terbuka dan kurang sesuai dengan prinsip belajar mandiri. Dalam sistem SLTP Terbuka siswa diharapkan dapat belajar dengan bantuan sesedikit mungkin dari orang lain. Di samping itu juga kurang sesuai dengan kondisi siswa. Banyak siswa SLTP Terbuka yang merasa berat untuk menghadiri kegiatan tatap muka karena kesulitan biaya transportasi. Makin sering kegiatan tatap muka diselenggarakan maka makin berat bagi mereka.
5. Kurang lancarnya pelaksanaan kegiatan pembelajaran SLTP Terbuka di beberapa lokasi baru. Sampai tahun ajaran 1998/1999 penyebaran SLTP Terbuka yang dibuka oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 3773 lokasi. Di samping itu ada beberapa lokasi yang dibuka oleh Pemerintah

Daerah, seperti di DKI Jakarta. Hal tersebut tentu saja merupakan kenyataan yang sangat menggembirakan, karena hal itu memberikan pertanda bahwa SLTP Terbuka telah dapat diterima oleh masyarakat. Namun demikian penyebaran itu perlu didahului dengan persiapan yang matang yang meliputi antara lain studi kelayakan lokasi, orientasi bagi pengelola, persiapan ruangan dan fasilitasnya, dan penyediaan bahan belajar yang cukup bagi siswa. Bila hal tersebut tidak dipenuhi, SLTP Terbuka baru itu tidak akan berjalan seperti yang diharapkan.

6. SLTP Terbuka bukanlah SLTP biasa, tetapi suatu sistem pendidikan jarak jauh yang memerlukan perlakuan dan penanganan tersendiri. Dengan sistem ini kita berurusan dengan anak-anak lulusan SD/MI yang telah terbentuk selama paling tidak 6 tahun belajar langsung dari guru di kelas setiap hari. Anak-anak usia 12-13 tahun selama kurun waktu terbiasa untuk bergantung kepada orang yang disebut guru. Dengan SLTP Terbuka sebenarnya tidak sekedar menyajikan materi pelajaran yang ada dalam kurikulum kepada siswa secara jarak jauh, tetapi lebih besar dari itu. Melalui SLTP Terbuka sebenarnya kita sedang mengadakan rekayasa sosial, mengubah sikap, persepsi dan gaya belajar dari anak-anak, orang tua, guru dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
7. Sikap dan gaya belajar yang semula mengandalkan dan bergantung kepada guru, sekarang harus belajar mandiri, harus aktif mencari sendiri. Persepsi orang tua dan masyarakat yang semula menganggap bahwa sekolah hanyalah dengan cara yang konvensional yaitu pergi ke gedung sekolah dan bertatap muka dengan guru harus berubah menjadi belajar dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.

BERBAGAI PROGRAM PENUNJANG PENYELENGGARAAN SLTP TERBUKA

Untuk memantapkan penyelenggaraan SLTP Terbuka dan meningkatkan mutu pembelajaran dan pengelolaan, dilakukan

berbagai upaya antara lain berikut ini.

1. Siaran Radio Pendidikan bekerjasama dengan Stasiun Nasional RRI Jakarta (1997-sekarang) untuk mata pelajaran yang dibelajarkan dengan waktu siaran setiap hari Rabu dan Jumat.
2. Majalah Udara (sejak 1998/1999) melalui Stasiun Nasional RRI Jakarta setiap hari Sabtu dan Minggu dengan program khusus untuk memotivasi siswa.
3. Warta Siswa SLTP Terbuka (sejak 1997/1998) berupa media cetak sebagai sarana komunikasi antar siswa SLTP Terbuka dengan oplag 15.000 eksemplar, terbit empat kali dalam setahun.
4. Sejak tahun ajaran 1997/1998 telah dipersiapkan perintisan Radio Komunikasi Dua Arab di tujuh lokasi SLTP Terbuka yang terdapat di tujuh provinsi, yaitu di SLTP Terbuka Kotalampa, Riau; SLTP Terbuka Jembayan, Kalimantan Timur; SLTP Terbuka Pahandut, Kalimantan Tengah; SLTP Terbuka Tanjungsari, Jawa Barat; SLTP Terbuka Boyolali, Jawa Tengah; SLTP Terbuka Pujut, NTB; dan SLTP Terbuka Pangkep di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tatap muka di SLTP Terbuka.
5. Sejak tahun 1997/1998 telah mulai dikembangkan komputerisasi data SLTP Terbuka.

PENUTUP

Jika kita perhatikan angka-angka yang direncanakan, jumlah lokasi SLTP Terbuka maupun jumlah siswanya jelas merupakan angka yang tidak ada duanya di dunia. Kita boleh berbangga namun harus waspada. Ada kecenderungan bahwa penambahan dari segi jumlah diikuti dengan penurunan dari segi mutu. Apabila lokasi bertambah dengan sendirinya jumlah siswa dan tenaga yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaannya akan bertambah pula. Kompleksitas pengelolaan dan permasalahannya tentu akan bertambah pula. Karena itu penambahan lokasi SLTP Terbuka senantiasa harus diikuti dengan tetap meningkatkan mutu pembelajaran dan pengelolaannya.

Menyadari bahwa SLTP Terbuka bukan SLTP biasa maka penanganan SLTP Terbuka harus dilakukan secara lebih serius, cermat dan terkoordinir mulai dari pusat hingga daerah yang paling ujung berurusan dengan anak didik. SLTP Terbuka sudah saatnya untuk tidak diurus secara sambilan tetapi oleh tenaga yang profesional, yang secara khusus dipersiapkan untuk menangani sistem belajar jarak jauh tingkat SLTP ini. Penyebaran secara massal seperti yang dilakukan selama ini memerlukan tenaga yang mampu, mau, dan punya tingkat kepedulian yang tinggi untuk mengelola SLTP Terbuka dengan jumlah tenaga yang cukup.

Target SLTP Terbuka diakhiri Pelita VII sebagaimana yang telah ditetapkan mudah-mudahan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Barnadib, I. et al. 1983. *Evaluasi SMP Terbuka*. Jakarta: Pustekkom.
- Barnadib, I. et al. 1985. *Evaluasi SMP Terbuka*. Jakarta: Pustekkom.
- BPP. 1999. *Ringkasan eksekutif hasil studi: Volume II*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan.
- Bradley, J. 1991. *Improving the printed learning materials of SMP Terbuka: Consultancy report*. Jakarta: Pustekkom Dikbud-UNESCO/UNDP.
- CBS. 1997. *Statistik kependudukan*. Jakarta: Central Bureau of Statistics.
- Calvano, M. A. & Sadiman, A. S. No Year. *Case study of the Indonesian open junior secondary school*. Jakarta: Pustekkom.
- Kartasurya, K. et al. *Baseline study for open junior high school*. Jakarta: Unesco/UNDP INS/88/028.
- Pustekkom. 1993. *Temuan hasil penelitian SMP Terbuka*. Jakarta: Pustekkom.
- Rowntree, D. 1992. *Exploring open and distance learning*. London: Kogan Page Ltd.
- Rumble, G. 1992. *The Management of distance learning systems*. Paris: UNESCO, International Institute for Educational Planning.

- Sadiman, A. S. & Rahardjo, R. 1997. *Contribution of SMP Terbuka towards lifelong learning in Indonesia*. Dalam Michael J. Hatton (Ed.), *Lifelong learning, policies, practices, and programs*. Toronto: APEC Publication.
- Sadiman, A. S., Seligman, D., & Rahardjo, R. 1995. *The open junior secondary school: An Indonesian case study*. Jakarta: UNESCO/ UNDP INS/88/028.

SIARAN RADIO PENDIDIKAN (SRP): EMBRIO PENDIDIKAN TERBUKA DAN JARAK JAUH DI INDONESIA

Zamris Habib

Siaran Radio Pendidikan (SRP) adalah penerapan teknologi komunikasi pendidikan untuk pendidikan jarak jauh (terbuka) di Indonesia yang sudah diawali pada tahun 1952, segera setelah adanya pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Dengan adanya pengakuan kedaulatan itu banyak para pelajar pejuang yang berhasrat untuk meneruskan sekolah lagi. Sementara itu usia serta pengalaman mereka telah cukup jauh berbeda dibandingkan dengan adik-adik mereka yang terus bersekolah tanpa ikut kesatuan tentara pelajar. Mengingat bahwa motivasi belajar mereka lebih kuat maka dianggap kurang tepat bila diberi perlakuan yang sama seperti murid biasa.

Atas dasar kondisi tersebut, Jawatan Pendidikan Masyarakat pada tahun 1952 menyelenggarakan suatu sistem siaran radio untuk penyajian pelajarannya dengan sasaran wilayah Jakarta. Penyelenggaraan sistem ini didukung oleh Radio Republik Indonesia (RRI) dan pemancar sumbangan Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) yang dioperasikan sendiri oleh Jawatan Pendidikan Masyarakat dari Jalan Cilacap. Tetapi sistem ini berakhir begitu saja dengan dipusatkannya pendidikan bagi eks pelajar pejuang di kota Malang (Miarso, 1982).

Baru pada permulaan tahun 1958 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) meminta bantuan UNESCO untuk mengadakan suatu studi tentang pendidikan di Indonesia. Studi itu dilakukan oleh L.H.S. Emerson, M.A. dengan laporannya yang berjudul *"Education of Indonesia: The Present situation with Identification of Priorities for Development"*.

Dalam laporan Emerson tersebut antara lain diidentifikasi potensi radio dan televisi untuk membantu memecahkan persoalan dan memenuhi kebutuhan pendidikan. Bahkan diajukan agar Siaran

Pendidikan (Radio dan Televisi) merupakan prioritas pertama dalam rangka kesatuan integral pengembangan kurikulum dan bahan pelajaran. Sebagai kelanjutan dari studi Emerson tersebut, maka pada akhir tahun 1968 didatangkan konsultan UNESCO, C. Koch, *Education Officer* dari ABC untuk merinci rancangan siaran pendidikan dalam rangka membantu memecahkan persoalan dan memenuhi kebutuhan pendidikan.

Pada tahun itu juga dilaksanakan analisis sistem pendidikan yang pertama dengan memakai pendekatan sistem. Analisis itu dilakukan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun tahap I (Repelita I). Di antara hasil analisis itu dikemukakan, bahwa titik kritis dalam usaha pengembangan dan pembaharuan pendidikan sekolah adalah guru, dan untuk meningkatkan mutu pendidikan, kurikulum perlu diubah. Perubahan kurikulum harus diikuti serentak dengan penataran para guru, penyediaan buku dan alat pendidikan, dan peningkatan pembinaan (supervisi) terhadap pelaksanaan pengajaran. Untuk melaksanakan penataran guru tersebut perlu ditempuh cara yang inovatif dengan memanfaatkan sumber yang ada seperti misalnya siaran radio.

Disamping itu, REPELITA I yang dimulai pada tahun 1969 menekankan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun karena kekurangan guru, baik jumlah dan kualitas, maka direncanakan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan melalui radio. Pemilihan media radio oleh Pemerintah didasarkan pada kemampuan media tersebut menjangkau populasi pendengar yang lebih banyak dengan sistem jarak jauh secara serempak dan dengan waktu yang lebih cepat serta biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan media lain (Cantrill dan Allport, 1971).

Untuk mempelajari *educational planning* dan *educational broadcasting* secara mendalam, Depdikbud telah mengirimkan tiga orang dosen IKIP (dari IKIP Malang, Yogyakarta dan Bandung) ke Australia. Pada akhir tahun 1970 telah disusun *planning document* dengan judul *A Programme of the Introduction of Educational Broadcasting in Indonesia*. Sebagai tindak lanjut maka sejak tahun

1970, dirintis Pilot Proyek Siaran Radio Pendidikan di beberapa tempat di Indonesia. Dua di antaranya adalah usaha untuk penataran guru. Pilot Proyek di Jawa Tengah yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan guru Sekolah Dasar (SD) dalam mengajar, telah menunjukkan hasil positif. Evaluasi yang dilakukan oleh IKIP Semarang menunjukkan antara lain berikut ini.

1. Tujuan instruksional siaran pendidikan yaitu setelah mengikuti siaran guru-guru pendengar memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai metodologi pengajaran modern, telah terbukti menunjukkan angka rata-rata seluruh komponen pengetahuan 54%.
2. Para guru di luar kota ternyata lebih bergairah dalam mengikuti dalam program siaran pendidikan.
3. Para guru pada umumnya (lebih dari 70%) rajin mengikuti acara siaran pendidikan. Lebih dari 73% guru mengikuti acara siaran pendidikan dengan motif untuk menambah pengetahuan.

Karena masih ada keragu-raguan atas potensi siaran radio pendidikan, terutama dilihat dari segi *pay off* dan *cost effectiveness*, maka dengan bantuan UNESCO, Dean Jamison dari Stanford University melakukan studi pada tahun 1971. Dalam laporannya yang berjudul *Alternative Strategies for Primary Education in Indonesia: A Cost-effectiveness Analysis*, Jamison menyimpulkan bahwa:

1. *The cost of providing a half hour of instruction per day in each of two courses is less than Rp. 300, - per student per year, all cost considered, if only 10% primary students are using radio.*
2. *This amount of radio could be provided at no increase in per student annual cost if the student to teacher ratio was raised 35-40.*
3. *Using radio for teacher upgrading is preferable to using conventional means, and would probably result in sought improvement in the primary system's output within the same cost constraint.*
4. *Using radio in two subject areas on every level with a shortened school hours to four hours a day in order to make provision for*

a double school shift. Has a quantitative edge on simply increasing student to teacher ratio and important quality advantage by about 25%.

Usaha-usaha yang bersifat inovatif seperti pemanfaatan radio untuk pendidikan mendapat dukungan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mashuri mengatakan:

“... untuk menanggulangi dan menghadapi tantangan dan masalah itu diterapkan strategi serta program-program pendidikan. Salah satu di antara strategi itu adalah penerapan aspek-aspek inovasi dalam sistem pendidikan. Usaha penerapan aspek-aspek inovasi ini bukan hanya sekedar merupakan kosekuensi logis dari pada pendidikan yang berorientasi pada kemajuan zaman, tetapi juga karena *approach* tradisional dan konvensional tidak mungkin lagi menanggulangi masalah yang bertambah lama bertambah rumit. Salah satu di antara aspek inovasi itu adalah penggunaan siaran (*broadcasting*) dalam pendidikan. Telah lama diidentifikasi bahwa *broadcasting* mempunyai potensi hebat jika penggunaannya teratur dan terarah” (Mashuri, 1972).

Penggunaan media radio untuk pendidikan juga didorong oleh pertimbangan-pertimbangan (Miarso, 1971) sebagai berikut.

1. Eksplosi penduduk yang dengan sendirinya mengakibatkan eksplosif anak-anak usia sekolah.
2. Eksplosi ilmu pengetahuan.
3. Eksplosi teknologi, kedua eksplosif terakhir ini menambah lebar dan dalam jurang pemisah antara negara berkembang dan negara sedang berkembang.
4. Terbatasnya dana dan fasilitas untuk perbaikan.
5. Perjalanan waktu yang tak dapat menunggu lagi.

Untuk meyakinkan keadaan lapangan, maka dilaksanakan *Field Test* dengan maksud dan tujuan:

1. Untuk mengetahui penerimaan siaran pendidikan jarak jauh dan efeknya terhadap murid/pendengar.
2. Untuk mengetahui respon murid/pendengar terhadap berbagai kualitas suara radio yang terdengar pada waktu jam pelajaran

dan memperkirakan berapa *power output audio* yang paling efektif untuk radio pendidikan.

3. Untuk mendapatkan informasi tentang kritik dan saran dari guru-guru terhadap operasi dan penyetelan pesawat radio.
4. Untuk mengadakan tukar pikiran, kesan-kesan, dan pengalaman dengan guru dari pilot proyek siaran pendidikan (yang sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah mereka).

Sedangkan eksperimen yang dilaksanakan di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum disebarkan ke daerah lain telah diteliti oleh PT Inscore Indonesia atas biaya UNESCO (1973). Dua di antara sepuluh kesimpulannya menyatakan:

1. Pencapaian (*coverage*) dari sasaran tergantung bukan saja dari kemampuan teknis pemancar tetapi juga pada kemampuan ekonomi pendengar, pemilihan waktu siaran yang tepat, dan informasi yang lebih meluas, jelas dan tegas (umpamanya berbentuk instruksi mengenai adanya siaran).
2. Siaran pendidikan ternyata lebih tepat untuk pelajaran-pelajaran/acara-acara yang memerlukan unsur-unsur audio dan hal-hal atau perkembangan-perkembangan baru yang dapat diikuti terus-menerus oleh guru/kelompok pendengar.

Walaupun hasil studi dan penelitian ini menunjukkan hasil yang positif tetapi harus pula kita sadari bahwa berkenaan dengan kesulitan-kesulitan organisasi, teknis, personil dan keuangan maka segala macam bentuk inovasi teknologi tersebut harus mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut.

1. Biaya unit penggunaan inovasi teknologi harus relatif rendah.
2. Teknologi itu sendiri harus dapat merupakan bagian dari kebudayaan kita sendiri (bukan melalui hasil impor). Artinya kita sendiri mampu memproduksi, memelihara dan menggunakan *software* maupun *hardware* teknologi itu.
3. Teknologi itu harus dapat digunakan dengan efektif dalam pendidikan.
4. Inovasi itu harus dapat disebarkan secara luas dalam waktu yang relatif pendek.

SRP UNTUK PENATARAN GURU SD

Usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar telah dilaksanakan program penataran guru SD/MI dan Pembina SD sebanyak lebih kurang 400.000 orang mulai tahun 1976. Penataran tersebut dilaksanakan oleh Proyek Pembinaan Pendidikan Dasar (P3D). Sistem penataran yang dipakai adalah dengan menggunakan tim mobil (sebanyak 120 tim @ 8 orang) yang bergerak di 17 propinsi yang keadaan daerah dan transportasinya memungkinkan sampai meliputi 2200 SD *Center*. Sedang pada 9 propinsi yang lain hanya sampai di kabupaten, mengingat keadaan daerah dan transportasi yang sulit. Penataran pada SD *Center* dilangsungkan tiga kali dalam setahun, masing-masing empat hari lamanya. Sedangkan penataran pada tempat lain berlangsung sekali dalam setahun selama 15 hari. Tiap guru hanya akan mendapat program penataran sekali (3 x 4 hari atau 1 x 15 hari) selama jangka waktu proyek.

Dalam pelaksanaan program P3D, telah dirasakan perlu adanya komunikasi terus-menerus antara Penatar Keliling dengan SD *Center* dan SD lain di sekitarnya, serta dengan pembina wilayah, komunikasi ini diperlukan untuk membina dan memantapkan hasil-hasil penataran. Untuk hal ini, diperlukan siaran radio sebagai alat komunikasi dan menjaga kontinuitas pelatihan, sebab proses penataran yang dilakukan oleh setiap *mobile team* untuk masing-masing SD *Center* dari 25 SD *Center* yang menjadi tanggung jawabnya hanya 12 hari pelatihan (3 kali pelatihan @ 4 hari) selama setahun dengan interval waktu lebih kurang tiga bulan.

Oleh karena itu, siaran radio dapat digunakan sebagai media komunikasi untuk menguraikan persoalan-persoalan umum yang dijumpai dan berguna untuk mencapai tujuan program P3D itu sendiri. Persoalan dimaksud antara lain bahan-bahan penataran, prosedur penyampaian, dan persoalan-persoalan yang perlu diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam waktu cepat.

Selain hal-hal yang telah disebutkan, masalah utama yang dihadapi oleh Tim Penatar Keliling (TPK) dari P3D adalah terbatasnya waktu dan luasnya materi penataran sehingga tidak

semua mata pelajaran dapat disampaikan pada waktu tatap muka. Besarnya jumlah guru yang akan ditatar, karakteristik geografis yang terdiri dari kepulauan dan daerah pedalaman yang sulit dijangkau dengan transportasi biasa, dan keterbatasan waktu tatap muka yang hanya dua minggu, tidak menjamin kontinuitas hasil penataran.

KERJASAMA DEPDIKBUD DENGAN DEPARTEMEN PENERANGAN

Pada tanggal 16 Februari 1977, Menteri P dan K, Syarif Thayeb, meresmikan penggunaan SRP untuk penataran guru. Pada kesempatan tersebut juga telah ditandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kepala (waktu itu disebut Ketua) Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (BP3K/Dikbud), Setyadi, dengan Direktur Jenderal Radio, Televisi, dan Film (Ditjen RTF), Sumadi, Nomor 0499/K/1977 dan Nomor 08/Kep/DIRJEN/KTF/T7. Isi kerjasama tersebut antara lain adalah bahwa kedua belah pihak bertanggung jawab atas terlaksananya siaran dan atau siaran sekolah melalui RRI dan TVRI berdasarkan konsepsi dan atau kurikulum yang berlaku.

Dalam kerjasama tersebut Ditjen RTF bertanggung jawab menyediakan unit-unit produksi dan sarana pemancar. Sedangkan pihak BP3K/Balitbang Dikbud bertanggung jawab untuk kurikulum siaran pendidikan, biaya produksi, dan alat penerima siaran di lapangan. Pada kesempatan itu Menteri P dan K menyampaikan pesan agar siaran radio pendidikan yang dimaksudkan untuk membantu kegiatan penataran yang telah ada, bisa mempercepat proses dalam pencapaian target. Di samping itu, siaran radio tersebut dapat digunakan untuk keperluan komunikasi kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan sehingga kebijaksanaan tersebut dapat sampai lebih cepat kepada guru-guru.

TUJUAN DAN SASARAN SRP

Secara umum, tujuan penataran melalui SRP adalah untuk menunjang pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan dasar

dengan mengintegrasikan penerapan media dan teknologi komunikasi secara terencana dan terarah sebagai suatu sub sistem dalam pendidikan dasar. Secara khusus, SRP dimaksudkan untuk: (1) meningkatkan mutu pengetahuan dan kemampuan profesional guru dan calon guru SD; (2) memperluas kesempatan memperoleh pendidikan; (3) memperkaya sumber belajar, dan (4) membantu terciptanya prinsip belajar seumur hidup dan masyarakat gemar belajar.

Sasaran program ini adalah guru SD terutama yang berada di daerah terpencil di sebelas propinsi, yaitu Irian Jaya, Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, NTT, NTB, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan termasuk dua propinsi daerah eksperimen yaitu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

STRATEGI SRP

Materi penataran disajikan melalui media radio yang disiarkan oleh RRI daerah, Radio Pemerintah Daerah (RPD), dan Radio Swasta Niaga (RSN) setiap pagi hari dan sore harinya siaran ulang, selama enam hari dalam seminggu. Sementara setiap minggu disiarkan program lokal yang berisi jawaban-jawaban umpan balik dari para guru. Di setiap SD, dibentuk kelompok belajar (pendengar) yang terdiri dari guru-guru SD atau kelompok yang lebih besar dari SD yang berdekatan.

Kelompok belajar ini diketuai oleh kepala sekolah. Seorang sekretaris yang dipilih dari anggota kelompok belajar. Selain media radio, anggota kelompok belajar dilengkapi dengan buku petunjuk pemanfaatan yang berisi bagaimana belajar melalui radio, persiapan yang perlu dilakukan sebelum mendengarkan siaran, kegiatan selama mendengarkan, serta tugas yang harus dilaksanakan setelah mendengarkan siaran.

Dengan keterbatasan durasi siaran yang hanya sekitar 20 menit siaran per topik maka para guru diberikan buku Bahan Penyerta (BP) siaran. BP tersebut berisi judul program yang disiarkan, tujuan umum dan khusus, serta ringkasan dari materi

penataran. Agar para guru tidak mengalami kesulitan pada saat mendengarkan siaran, pada BP disajikan arti dari kata sulit, tugas setelah mendengarkan siaran, serta buku sumber. Pada sore harinya guru dapat mendengarkan siaran ulang secara individual di rumah masing-masing.

KOMPONEN KEGIATAN SRP

Kegiatan SRP mempunyai lima komponen sub-kegiatan (Habib dalam Miarso, 1984), sebagai berikut.

1. Pengembangan Program dan Sistem Penyajian
 - a. Penyusunan Pola Dasar Kegiatan Belajar Mengajar (PDKBM) sebagai kurikulum penataran lewat media.
 - b. Penulisan naskah bahan penyerta siaran (BP).
 - c. Penulisan naskah siaran
 - d. Produksi dan penggandaan program siaran.
 - e. Penyebaran (distribusi) BP ke kelompok belajar dan program siaran ke stasiun pemancar.
 - f. Transmisi (penyiaran) program dari Stasiun Pemancar Radio.
 - g. Pembinaan Kelompok Belajar.
 - h. Evaluasi.

2. Pembentukan Jaringan Kerja

Pada mulanya telah dibentuk satuan kerja di Propinsi yaitu yang disebut Satuan Tugas Pelaksana Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (SPTD) di sebelas propinsi daerah sasaran sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 31 Juli 1976, Nomor 0200/P/1976. Pada tahun 1979, Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0145/O/1979, menjadikan SPTD sebagai lembaga struktural dengan nama Sanggar Teknologi Komunikasi Pendidikan (Sanggar TKPK, selanjutnya disebut Sanggar Tekkom), yang berada di bawah pembinaan teknis Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom) dan secara taktis operasional dibina oleh Kantor Wilayah Depdikbud (Kanwil Depdikbud) setempat. Sanggar Tekkom inilah yang mengelola kegiatan SRP di daerah, seperti membentuk kelompok belajar,

mendistribusikan bahan, mengadakan kerjasama dengan RRI, RPD, dan RSN setempat, serta memonitor dan memberikan umpan balik kepada kelompok belajar.

3. Pelatihan/Penataran

- a. Penataran bagi TPK - P2SD (sebelumnya P3D) untuk sebelas propinsi dalam rangka penggunaan media radio dan media lain.
- b. Penataran bagi Kepala Kantor Depdikbud tingkat Kotamadya/Kabupaten/Kecamatan dan Penilik SD (untuk sebelas propinsi), sebagai pembekalan untuk bertugas sebagai *feedback officer* dan *supervisor* siaran radio pendidikan.
- c. Latihan Staf Sanggar Tekkom di sebelas propinsi yang bertujuan untuk memberikan kemampuan dalam mengelola kegiatan siaran radio pendidikan (meliputi penulisan naskah, pembuatan program lokal, pendayagunaan media, pengolahan umpan balik, dan pembinaan program di wilayahnya masing-masing).
- d. Latihan produser dan penulisan naskah siaran dalam rangka pembuatan program nasional.

4. Penyiaran Program

Sampai tahun 1984, penyiaran program (transmisi) dilakukan oleh 23 stasiun pemancar RRI, 17 RPD dan 4 RSN. Kegiatan penyiaran ini didasarkan pada kerjasama penyelenggaraan SRP antara Deppen dengan Depdikbud. Penyiaran yang berdurasi 20 menit diselenggarakan dua kali sehari, pagi hari pada waktu istirahat dan didengarkan secara berkelompok sedangkan pada sore hari diselenggarakan siaran ulang yang dapat didengarkan secara individual. Siaran ulang umumnya ditujukan bagi mereka yang berhalangan pada pagi hari. Penyiaran pada sore hari ini disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

5. Pengadaan Sarana dan Fasilitas

Pada tahun 1984, fasilitas berupa 6.806 pesawat radio dan radio kaset baru dapat disediakan dan didistribusikan ke SD yang letaknya di pelosok terpencil yang dapat menangkap siaran.

Pengadaan pesawat radio tersebut selain dilakukan oleh Pustekkom, juga berasal dari sumbangan Pemerintah Daerah selaku Dewan Pembina Sanggar Tekkom.

Dalam rangka pembuatan program lokal, masing-masing Sanggar Tekkom di sebelas propinsi dilengkapi dengan sebuah sepeda motor untuk dimanfaatkan dalam kegiatan supervisi dan pengumpulan umpan balik dari kelompok belajar-kelompok belajar.

POLA OPERASIONAL

1. Penyusunan PDKBM

Setiap tahun, pelaksanaan SRP dimulai dengan kegiatan menyusun Pola Dasar Kegiatan Belajar Mengajar (PDKBM). PDKBM merupakan penjabaran dari kurikulum yang berlaku dan silabi penataran tatap muka yang disusun oleh Tim Pengembang Bahan Pelajaran. Tim ini terdiri dari tenaga-tenaga ahli mata pelajaran dari IKIP, guru SD yang berpengalaman, dan ahli media dari Pustekkom. Berbeda dengan kurikulum, PDKBM lebih terperinci yang mencakup: Tujuan Pembelajaran Umum dan Khusus, Pokok dan Sub Pokok Bahasan, Topik, materi ringkas, sumber bahan, serta media yang sesuai dengan topik-topik yang akan disajikan. Perincian tentang media dalam PDKBM didasarkan pada kepentingan bahwa selain melalui media radio juga ditunjang dengan media kaset dan film bingkai. Bidang-bidang studi yang telah disusun PDKBM, adalah: Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika, Pendidikan Umum dan Kesenian. Mulai tahun 1984 disiarkan dua bidang pelajaran baru, yaitu Agama Islam dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) serta Program Komunikasi Kebijakan dan Keguruan.

2. Penulisan Naskah Bahan Penyerta Siaran

Setiap program radio yang disiarkan ditunjang dengan media cetak berupa Bahan Penyerta (BP) siaran. BP berisi materi

program yang disiarkan serta petunjuk tentang kegiatan yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah mendengarkan siaran sebagai tindak lanjut dari program yang disajikan. Setiap akhir program terdapat lembar evaluasi dan kunci jawaban. Naskah BP ditulis oleh Tim Penulis Naskah yang terdiri dari dosen-dosen IKIP dan guru SD sesuai dengan bidang pelajaran masing-masing. Penulisan naskah BP harus berpedoman kepada PDKBM. Naskah yang sudah ditulis harus diperiksa lebih dahulu oleh Tim Pengembang Bahan Pelajaran dan Pengkaji Media sebelum dicetak.

3. Penulisan Naskah Siaran

Naskah siaran ditulis berdasarkan PDKBM oleh tenaga-tenaga yang sudah dilatih untuk itu. Naskah yang ditulis disesuaikan dengan pengalaman dan tingkat pengetahuan sasaran. Dalam penulisan selalu dipertimbangkan karakteristik media yang dipergunakan. Para penulis naskah diharuskan berkonsultasi dengan bidang studi (*content specialist*) dan pengkaji media. Naskah yang sudah selesai, diujicobakan (*try out*) sebelum diproduksi.

4. Produksi Program

Produksi program dilaksanakan di Balai Produksi Media Radio (BPMR) di Semarang dan di Yogyakarta. BPMR Semarang memproduksi program dari bidang pelajaran PMP, Bahasa Indonesia, IPA, Pendidikan Umum dan Program Komunikasi Kebijakan dan Keguruan. Bidang-bidang pelajaran Matematika, IPS, Kesenian, PSPB, dan Agama Islam diproduksi di BPMR Yogyakarta. Produksi dilaksanakan oleh tenaga terlatih yang bisa menilai naskah, memilih para pelaku, penyiar, dan menentukan suara atau irama sebagai *sound effect* dan suara latar. Hasil rekaman dalam bentuk *master tape* digandakan menjadi 64 copy setiap program, di PN Lokananta, Solo Jawa Tengah. Pada Tabel 1 dapat dilihat jumlah program yang telah diproduksi.

Di samping itu, Sanggar Tekkom di propinsi juga

memproduksi materi Komunikasi Kebijakan Daerah. Program ini bertujuan untuk menjawab umpan balik yang masuk ke Sanggar Tekkom dari kelompok belajar dan sebagai media informasi dari Kanwil Depdikbud setempat. Program tersebut disiarkan dua minggu sekali.

Tabel 1. Jumlah Produksi Program BPMR

Tahun	Jumlah Program	Jumlah Bidang Studi
1976/1977	261	5
1977/1978	312	5
1979/1980	450	6
1980/1981	251	4
1981/1982	312	7
1982/1983	312	5
1983/1984	312	5

5. Produksi Bahan Penyerta

Bahan penyerta dicetak di Jakarta, diterbitkan 12 edisi dalam setahun. Selain BP, dicetak juga buku Pedoman Pemanfaatan (PP) sebagai pedoman bagi anggota kelompok belajar untuk mengikuti siaran dengan baik. Untuk informasi umum bagi khalayak tentang kegiatan Tekkom, dicetak selebaran (*pamflet*). Rincian media ada pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Produksi Bahan Penyerta

Jenis	1977/78	1979//79	1979.80	1980/81	1981.82	1982/83	1983/84	Jumlah
BP	384.000	384.000	224.000	414.000	384.000	460.800	384.000	2.634.800
FP	16.000	16.000	-	-	-	-	-	32.000
Leaflet	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	4000
Jumlah	400.000	400.000	224.000	215.000	385.000	461.800	385.000	2.670.800

6. Distribusi dan Transmisi

Bahan Penyerta tercetak didistribusikan secara terpusat dari Jakarta ke Sanggar-sanggar Tekkom. Khusus untuk daerah-daerah

tertentu, seperti: Irian Jaya dan pedalaman Kalimantan Tengah, BP langsung dikirim ke Kantor Depdikbud Kabupaten. Selanjutnya dari Sanggar Telkom dan Kantor Depdikbud Kabupaten didistribusikan lagi ke kelompok belajar di SD-SD.

Pada tahun 1984/1985, BP langsung dikirim dari Jakarta ke SD-SD dengan menggunakan jasa pos. Sedangkan kaset program yang sudah diproduksi juga didistribusikan dari Jakarta ke Sanggar-sanggar Tekkom untuk diteruskan ke stasiun RRI, RPD dan RSN.

Setiap program disiarkan dua kali sehari menurut jadwal yang telah ditentukan. Siaran pagi diharapkan dapat diikuti secara berkelompok di sekolah dan pada sore hari diadakan siaran ulang. Lama siaran tiap program 20 menit. Pada Tabel 3 dapat dilihat stasiun-stasiun pemancar yang menyiarkan SRP.

Tabel 3. Nama Stasiun Pemancar yang Menyiarkan SRP

No.	Propinsi	Stasiun RRI	Stasiun RPD	Stasiun Radio Swasta Niaga
1	Jawa Tengah	Semarang, Purwokerto, Surakarta	Temanggung, Pemalang	
2	DI Yogyakarta	Nusantara II		
3	Kalimantan Barat	Pontianak	Pontianak di Mempawah, Sambas, Ketapang, Sintang (Singkawang)	Volare Media
4	Kalimantan Timur	Samarinda, Tenggarong	Tenggarong	Analisa
5	Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Pangkalan Bun	
6	Sulawesi Tengah	Palu	Poso, Luwuh, Toli-toli	
7	Sulawesi Tenggara	Kendari		Aneka Tambang
8	Sulawesi Selatan	Nusantara IV		
9	N.T.B	Mataram	Selong, Sumbawa Besar, Praja, Bima, Dompu	
10	N.T.T	Kupang	Soe	
11	Maluku	Ambon, Temate		
12	Irian Jaya	Nusantara V, Jayapura, Biak, Sorong, Manokwari, Merauke, Fak-fak Wamena, Nabire, Serui		

7. Pemanfaatan Program dan Pembinaan Kelompok Belajar

Sebelum mendengarkan siaran, anggota kelompok belajar membaca BP dan menyiapkan segala sesuatunya yang dituntut oleh program SRP yang akan disiarkan. Sedangkan selama siaran berlangsung, anggota-anggota kelompok belajar mencatat hal-hal yang penting untuk kemudian didiskusikan. Supaya dapat segera mengadakan diskusi setelah mendengarkan siaran maka pemanfaatan SRP dilakukan berkelompok dalam bentuk **KELOMPOK BELAJAR**.

Kelompok belajar ini diketuai oleh Kepala Sekolah masing-masing dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih oleh anggota. Hal-hal yang belum dapat dipecahkan dapat ditanyakan secara tertulis kepada Sanggar Tekkom, atau langsung ke BPMR Semarang dan Yogyakarta. Sanggar Tekkom melaksanakan siaran langsung paling sedikit dua kali sebulan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok belajar dan mengumumkan kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya dari Depdikbud.

Sanggar Tekkom secara terus-menerus memonitor dan memantapkan jumlah kelompok belajar di wilayah masing-masing dengan memperhatikan batas kemampuan pembinaan. Faktor kemampuan pembinaan tersebut, baik dari pihak Sanggar Tekkom daerah maupun Pustekkom sendiri sedikit banyak mempengaruhi jumlah anggota kelompok belajar. Jumlah anggota kelompok belajar pada tahun 1978 tercatat 70.000 orang.

Berdasarkan laporan yang masuk pada tahun 1981, jumlah guru yang menjadi anggota Diklat SRP berkembang menjadi 90.000 orang. Dengan bertambahnya tiga propinsi yang menjadi sasaran kegiatan TKPD ini, diharapkan tahun 1984/1985 jumlah anggota kelompok belajar sekitar 34.000 orang. Jumlah tersebut masih harus diecek dan dimantapkan aktivitasnya agar dapat diketahui seberapa jauh efektivitas dan efisiensi kegiatan penataran melalui SRP ini.

8. Evaluasi

Untuk memperoleh informasi berkenaan dengan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, kelayakan, dan akseptabilitas, baik dari aspek program yang disajikan maupun sistem pembelajaran secara menyeluruh, dilaksanakan kegiatan evaluasi formatif atau summatif secara berkala. Kegiatan ini dilaksanakan oleh suatu tim evaluasi yang dikoordinasikan oleh Pustekkom bekerjasama dengan perguruan tinggi. Di samping itu, telah dilakukan juga studi kasus (*case study*) oleh James P. Papay dkk. pada tahun 1982. Laporan evaluasi diharapkan dapat dipakai sebagai salah satu dasar perbaikan atau peningkatan efektivitas dan efisiensi program SRP dan untuk pedoman dalam menentukan kebijakan di masa datang.

PENUTUP

Selama penyelenggaraan SRP, ada beberapa hambatan yang dialami yaitu distribusi BP kadang kala mengalami keterlambatan sampai di tujuan, terutama di daerah terpencil. Untuk itu telah diusahakan pencetakan lebih awal. Pada tahun 1984/1985, pengiriman BP yang selama ini dilaksanakan oleh perusahaan ekspedisi swasta dihentikan dan diganti dengan menggunakan jasa pos. Hambatan lain penggunaan radio sebagai media satu arah membatasi proses interaksi.

Untuk mengatasi masalah tersebut, telah dilakukan pembinaan seperti supervisi dan monitoring. Faktor cuaca yang sering menjadi keluhan dalam mendengarkan siaran, diatasi dengan meningkatkan mutu pesawat radio yang menggunakan *band* SW dan MW sesuai dengan pembangunan stasiun pemancar RRI. Disamping itu, upaya Telkom untuk meningkatkan mutu dan pemerataan mutu pendidikan dasar yang awalnya hanya dilakukan dengan menggunakan media radio ditunjang media kaset dan film bingkai ditingkatkan dengan video. Pada awal PELITA IV dilaksanakan uji coba program penataran melalui Video Pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan mutu guru SD dalam proses belajar mengajar dalam bidang pelajaran tertentu.

Terlepas dari kekurangan dan hambatan yang dihadapi SRP dalam penyelenggaraannya, SRP merupakan cikal bakal pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) di Indonesia. Pada tahun 1979 telah dikembangkan SMP Terbuka di lima propinsi. Perintisan SMP Terbuka (Haryono, 1984) tersebut banyak didukung oleh tenaga yang berpengalaman dalam penyelenggaraan SRP. Perintisan UT juga banyak memanfaatkan fasilitas dan pengalaman penyelenggara SRP (Tim UT dalam Miarso: 1984) sehingga dapat dikatakan bahwa SRP merupakan embrio (cikal bakal) PTJJ di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Cantrill, H. & Allport, G. W. 1971. *The psychology of radio* (Rev. Ed). New York: Arno Press and The New York Times,.
- Habib, Z. 1999. Diklat SRP (Primary School Teachers In-Service Training by Radio), dalam *Distance learning for basic education*. Jakarta: Pustekkom and UNESCO.
- Lembaga Pengembangan Media Pendidikan. 1972. *Lokakarya siaran pendidikan*. Jakarta: Badan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Miarso, Y. 1971. *Dasar penimbangan penggunaan siaran radio dalam pendidikan*. Progress Report Visual Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Bina Graha.
- Miarso, Y. 1980. Teknologi komunikasi pendidikan untuk pemerataan kesempatan pendidikan di Indonesia, *Analisis Pendidikan I(I)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Miarso, Y. dkk. 1984. *Teknologi komunikasi pendidikan, pengertian dan penerapannya di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Miarso, Y. 1987. *Penerapan teknologi insruksional di Indonesia*. Makalah tidak dipublikasikan.
- Papay, J. P., Pigawahi, M., Sinwari, N., & Suhedi. 1982. *Case study of the communications technology project for elementary education (Tekkom)*. Jakarta: Departement of Education and Culture, Center for Communication Technology for Education

and Culture.

- Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan. 1973. *Sebuah penelitian tentang pengaruh siaran pendidikan di daerah Semarang dan Yogyakarta*. Jakarta: PT. Inscore Indonesia.
- Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan. 1981. *Teknologi komunikasi menunjang penatara guru sekolah dasar*. Jakarta: Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan. 1983. *Pola dasar pembinaan teknologi komunikasi pendidikan dasar*. Jakarta: Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan. Tanpa tahun. *Study of the specifications and design of receivers for use in educational broadcasting*. Bandung: Bagian Elektronik ITB.
- Simanjuntak, J. dan Dakir. 1979. *Laporan evaluasi belajar guru sekolah dasar dalam rangka pemanfaatan siaran radio pendidikan*. Jakarta: Pustekkom.

DIKLAT GURU SEKOLAH DASAR MELALUI SIARAN RADIO PENDIDIKAN

Hardjito

Globalisasi menjadikan dunia suatu kesatuan yang tidak lagi mengenal batas negara dan teritori. Akibat adanya revolusi informasi, pendidikan dan pelatihan (diklat) yang pada hakikatnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan oleh setiap negara untuk menghadapi tantangan masa depan. Era globalisasi, yang tidak lagi mampu memberikan perlindungan kepada semua jenjang dan sektor pekerjaan dari serbuan pencari kerja dari negara-negara lain, menuntut tersedianya sumberdaya manusia Indonesia yang berkemampuan tinggi, handal, luwes, berkepribadian, melek teknologi, dan yang memiliki daya saing tinggi.

Oleh karena itu kebijakan pendidikan nasional diarahkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang mampu menghadapi tantangan masa depan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, termasuk teknologi informasi dan komunikasi. Agar mencapai hasil yang optimal, pengembangan sumberdaya manusia di Indonesia harus dipersiapkan sejak dini, yaitu mulai dari jenjang pendidikan dasar.

Sementara itu fakta menunjukkan bahwa masalah guru Sekolah Dasar (SD) masih belum terpecahkan. Penyebaran guru yang tidak merata yang mengakibatkan menumpuknya guru di suatu daerah dan terjadinya kekurangan guru di daerah lain, terutama di daerah pedalaman dan daerah terpencil, banyaknya guru yang kurang layak berkenaan dengan latar belakang pendidikannya, serta tidak meratanya kesempatan memperoleh pendidikan untuk meningkatkan profesionalisme maupun kualifikasi guru, masih perlu dipikirkan pemecahannya.

Berbagai masalah tersebut menyebabkan rendahnya mutu guru SD yang pada gilirannya akan berakibat pada rendahnya mutu

pendidikan dasar. Kondisi ini pada akhirnya dikhawatirkan akan berpengaruh pada penyiapan sumberdaya manusia yang akan mampu menjawab tantangan masa depan secara nasional.

Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar, salah satunya ialah dengan meningkatkan profesionalisme dan kualitas pendidikan guru. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0854/O/1989 tentang Pengadaan dan Penyetaraan Guru Sekolah Dasar (PGSD) yang menetapkan bahwa kualifikasi guru harus ditingkatkan menjadi setara Diploma II (D-II) sehingga guru SD akan memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang mampu menjawab tantangan zaman.

Namun mengingat besarnya jumlah guru SD dan adanya keterbatasan pembiayaan oleh pemerintah, Program Penyetaraan D-II Guru SD mengalami berbagai kendala, antara lain terlalu sedikitnya jumlah guru yang terlayani oleh Program tersebut setiap tahunnya. Akibatnya guru yang belum memiliki kesempatan untuk mengikuti Program Penyetaraan D-II terpaksa menunggu sangat lama untuk mendapat beasiswa dan menjadi mahasiswa Program Penyetaraan D-II. Sementara itu pemecahan lain dengan memberikan kesempatan membiayai diri sendiri (swadana) tidak mampu mengatasi masalah ini karena ketidakmampuan guru dalam bidang ekonomi.

Tentu saja para guru yang dalam posisi sedemikian itu tidak dapat dibiarkan begitu saja sehingga kepada mereka perlu dilakukan upaya berupa diklat untuk meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme. Diklat diadakan agar guru tidak terlalu tertinggal oleh teman sejawatnya yang lebih awal memiliki kesempatan meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui Program Penyetaraan D-II. Namun mengingat kondisi geografis negara kita, sulit menyelenggarakan sistem diklat konvensional, diperlukan suatu sistem diklat yang mampu menjangkau guru di seluruh pelosok tanah air.

Dari berbagai alternatif yang mungkin dilakukan, penggunaan media radio merupakan cara yang paling efektif dan efisien. Pemilihan media radio didasarkan pada kemampuan media ini menjangkau populasi pendengar yang lebih banyak dengan jarak jauh dan waktu yang lebih cepat serta biaya yang relatif lebih murah dibanding media massa yang lain (Cantrill & Allport, 1971).

Efektivitas media radio untuk pendidikan juga telah diteliti banyak pakar pendidikan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan yang berarti antara peserta didik yang belajar melalui media radio dengan cara konvensional. Ini berarti bahwa belajar melalui radio relatif sama dengan belajar konvensional. Apabila dilihat dari isi sajian dan tujuan programnya maka dimungkinkan untuk menyelenggarakan pendidikan lewat radio yang isinya bisa menyangkut pelajaran yang ada dalam kurikulum atau pengetahuan umum di luar kurikulum (Sadiman, 1994).

Ada dua hal yang mendukung dipilihnya pemanfaatan media radio sebagai upaya diklat bagi guru SD yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti Program Penyetaraan D-II. Pertama ialah adanya pengalaman Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom Dikbud) yang sejak 1977 telah melakukan siaran radio pendidikan di 12 propinsi, walaupun belum bisa mencapai hasil seperti yang diharapkan. Salah satu penyebabnya ialah kondisi ekonomi guru SD, terutama yang tinggal di daerah terpencil, memprihatinkan. Kondisi ini tentu saja mempengaruhi minat mereka untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya. Mereka akan lebih mengutamakan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok terlebih dahulu. Ini tercermin dari berbagai kendala yang ditemukan dalam penyelenggaraan siaran radio pendidikan yang diselenggarakan Pustekkom tersebut.

Beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Diklat Siaran Radio Pemerintah (SRP) yang diselenggarakan dari 16 Februari 1977 semakin berkurang peminatnya. Penelitian yang dilakukan Papay dkk. (1981) menunjukkan kecenderungan penurunan peserta Diklat SRP terutama di daerah terpencil.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan beberapa tahun kemudian oleh Singodimejo dkk. (1989) memperkuat hasil penelitian terdahulu dengan hasil bahwa guru yang mendengarkan SRP secara rutin sudah sangat jarang dan jumlahnya terbatas.

Namun terlepas dari adanya berbagai kekurangan tersebut, yang secara bertahap akan dapat diperbaiki, pengalaman menyelenggarakan dan mengelola SRP telah melahirkan adanya jaringan kerja yang luas, terjalinnya kerjasama dengan berbagai pihak, dan tersedianya sejumlah tenaga pengelola yang cukup handal. Hal tersebut merupakan modal dasar yang sangat luar biasa.

Alasan kedua dipilihnya radio sebagai media ialah adanya kerja sama antara Departemen Penerangan dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dituangkan dalam Keputusan Bersama antara Direktur Jenderal Radio, Televisi, dan Film Nomor 08/KEP/DIRJEN/RTF/1977 dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Dikbud) Nomor 0199/K/1977 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Siaran Pendidikan/Siaran Sekolah. Kerjasama itu kemudian diikuti dengan Instruksi bersama antara Direktur Radio Departemen Penerangan Nomor 12/Kep/DIKRAD/1998 dengan Kepala Pustekkom Dikbud Nomor 0491/G6/LL/1998 tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Siaran Radio Pendidikan dan Kebudayaan Program Nasional.

Dengan adanya naskah kerjasama tersebut maka penyiaran program siaran radio pendidikan sepenuhnya mendapat dukungan dari Direktorat Radio yang membawahi Radio Republik Indonesia (RRI) seluruh Indonesia.

Berdasarkan alasan tersebut, Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis (Dikguten) dan Pustekkom Dikbud sepakat untuk menyelenggarakan diklat bagi guru SD dengan menggunakan siaran pendidikan, tentu saja dengan melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan.

Pengalaman dari tahun 1977 sampai dengan tahun 1990 dalam menyelenggarakan siaran pendidikan banyak mengajarkan bahwa kegiatan ini dapat berhasil apabila sasaran merasa mendapat manfaat dari program yang diberikan. Hal lain yang cukup mendasar yang

perlu dijadikan bahan pertimbangan perbaikan yaitu lemahnya organisasi penyelenggaraan pemanfaatan program karena adanya anggapan bahwa apabila telah ada sarana, kegiatan akan dapat berjalan sendiri. Hal lain yang harus diperbaiki adalah anggapan bahwa tugas menyampaikan materi pendidikan melalui siaran telah selesai bila penyiaran telah dilakukan (Miarso, 1984a). Tujuan penyelenggaraan Program Diklat Guru SD melalui Siaran Radio Pendidikan (Diklat SRP) adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan profesional guru SD, serta memperluas kesempatan meningkatkan mutu profesional guru SD yang belum mengikuti Program Penyetaraan D-II Guru SD.

SASARAN

Sasaran utama Program Diklat SRP adalah guru-guru SD dan Madrasah Ibtidaiyah yang tinggal dan bertugas di daerah terpencil yang secara geografis sulit transportasi dan komunikasinya. Dengan kesediaan tinggal dan mengabdikan hidup di daerah terpencil, guru itu telah teruji dan terbukti memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi dalam menjalankan tugasnya. Namun mengingat manfaat Program Diklat SRP ini maka guru yang tinggal di daerah pinggiran yang relatif mudah sarana transportasi dan komunikasinya juga dimungkinkan untuk menjadi peserta.

Sebagai tahap awal, pada tahun 1992/1993, Program Diklat SRP ini dikembangkan di 14 propinsi yang telah memiliki Sanggar Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Sanggar Tekkom), yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Riau, dan Timor Timur. Kemudian pada tahun 1993/1994, sasaran wilayah ditambah dengan tiga propinsi lagi yaitu Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Jawa Timur sehingga total jumlahnya menjadi 17 propinsi.

Seiring dengan bertambahnya jumlah Sanggar Tekkom maka pada tahun 1994/1995, sasaran wilayah diperluas menjadi 21

propinsi (tambahan empat daerah penyelenggara Program Diklat SRP adalah propinsi DI Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah).

MATERI PEMBELAJARAN

Mengingat bahwa tujuan program Diklat SRP adalah untuk mendukung upaya peningkatan kualifikasi guru SD menjadi setara D-II maka materi Diklat SRP dikembangkan dan mengacu pada kurikulum Program Penyetaraan D-II PGSD. Dengan demikian diharapkan para peserta Diklat SRP telah terbiasa belajar mandiri dan telah mengenal materi Program Penyetaraan D-II PGSD sehingga apabila nantinya mereka mendapat kesempatan mengikuti Program Penyetaraan D-II PGSD, mereka tidak akan mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan belajar-mengajar sehingga dapat menyelesaikan studinya tepat waktu.

Materi Diklat SRP dikemas dalam enam paket yang terdiri dari 960 program siaran (PS). Masing-masing paket terdiri dari 320 PS yang disampaikan dalam waktu enam bulan sehingga keseluruhan materi pembelajaran bisa diselesaikan oleh peserta Diklat SRP dalam waktu tiga tahun.

Komposisi program siaran untuk setiap mata tataran per paket adalah sebagai berikut.

1. Paket satu terdiri dari:
 - a. Pengembangan dan Inovasi kurikulum 20 PS
 - b. Pendidikan IPS 1 56 PS
 - c. Pendidikan Matematika 1 42 PS
 - d. Pendidikan IPA 1 42 PS
2. Paket dua terdiri dari:
 - a. Agama 20 PS
 - b. Pendidikan Pancasila 40 PS
 - c. Pendidikan Bahasa Indonesia 1 50 PS
 - d. Pendidikan IPA 2 50 PS
3. Paket tiga terdiri dari:
 - a. Bahasa Indonesia 20 PS
 - b. Dasar-dasar Kependidikan 20 PS

c.	Pendidikan Bahasa Indonesia 2	45	PS
d.	Pendidikan Matematika 3	45	PS
e.	Pendidikan IPS 2	30	PS
4.	Paket empat terdiri dari:		
a.	Psikologi Pendidikan	20	PS
b.	Pendidikan Bahasa Indonesia 3	40	PS
c.	Pendidikan Matematika 3	40	PS
d.	Pendidikan IPS 2	60	PS
5.	Paket lima terdiri dari:		
a.	Pancasila	20	PS
b.	Bimbingan dan Penyuluhan	20	PS
c.	Pendidikan Pancasila 2	40	PS
d.	Pendidikan IPA 3	55	PS
e.	Kapita Selekta	25	PS
6.	Paket enam terdiri dari:		
a.	Kewiraan	20	PS
b.	Pendidikan Bahasa Indonesia 4	45	PS
c.	Pendidikan Matematika 4	50	PS
d.	Pendidikan IPA 4	45	PS

BAHAN AJAR

Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan bahan ajar, yaitu pengembangan, distribusi, dan sarana pemanfaatan.

1. Pengembangan

Bahan ajar yang dipergunakan dalam proses belajar-mengajar Program Diklat SRP ini terdiri dari siaran radio dan bahan penyerta siaran. Proses pengembangan bahan ajar dimulai dengan penyusunan Garis-garis Besar Isi Program Media (GBIPM) berdasarkan kurikulum dan modul Program Penyetaraan D-II PGSD yang dikeluarkan oleh Universitas Terbuka (UT). GBIPM disusun oleh suatu tim pengembang yang terdiri dari unsur UT, IKIP, Pustekkom Dikbud, Dikgutenis, dan Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan (Pusbangkurandik) Balitbang

Dikbud.

Berdasarkan GBIPM tersebut disusunlah Bahan Penyerta Siaran (BP) oleh tim penulis yang terdiri dari dosen bidang studi bersangkutan dari IKIP yang kemudian dikaji oleh tim pengkaji yang terdiri dari unsur UT, Pustekkom Dikbud, dan Dikgutenis. BP siaran ini memiliki kaitan erat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari siaran radio karena berisi antara lain Tujuan Instruksional Umum (TIU), Tujuan Instruksional Khusus (TIK), petunjuk belajar, materi/bahan ajar dari setiap topik program yang disiarkan, disertai dengan penjelasan, contoh dan ilustrasi yang tidak mungkin disampaikan dalam bentuk siaran, latihan, tugas, dan daftar istilah sulit.

Dari GBIPM dan BP tersebut kemudian ditulis naskah program radio oleh tim penulis, yang didampingi oleh pengkaji media dan pengkaji materi. Naskah yang sudah final dan dinilai layak produksi ini kemudian diproduksi di Balai Produksi Media Radio (BPMR) Semarang dan DI Yogyakarta, menjadi bentuk master program siaran radio.

2. Distribusi

Master program siaran kemudian digandakan di Pustekkom Dikbud dan didistribusikan ke RRI Stasiun Nasional untuk disiarkan secara nasional. Agar jam siaran dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan di tiap-tiap propinsi maka *master copy* program siaran juga dikirimkan ke 21 Sanggar Tekkom Dikbud, untuk bisa disiarkan melalui RRI, Radio Pemerintah Daerah (RPD), ataupun Radio Swasta Niaga (RSN) setempat. Sedangkan bahan penyerta dicetak dan didistribusikan langsung melalui jasa pos kepada kelompok-kelompok belajar. Diharapkan bahan penyerta tersebut sudah dapat diterima peserta sebelum siaran dimulai agar peserta mempunyai waktu mempelajarinya sebelum mereka mendengarkan siaran radio.

3. Sarana Pemanfaatan

Agar peserta bisa memanfaatkan atau mengikuti siaran radio

pendidikan dengan baik maka kepada setiap kelompok belajar diberikan satu buah pesawat radio. Namun mengingat keterbatasan dana pemerintah maka pengadaan dan pendistribusian pesawat radio ini dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan kelompok-kelompok belajar di daerah yang lebih terpencil.

PROSES BELAJAR MENGAJAR

Setelah terdaftar sebagai anggota kelompok belajar Diklat SRP, guru wajib melakukan kegiatan belajar mandiri secara teratur. Kegiatan belajar mandiri dilakukan baik dalam kelompok-kelompok di sekolah masing-masing maupun dalam kegiatan yang bersifat individual di rumah masing-masing.

Kegiatan belajar tersebut diawali dengan mempelajari topik tertentu dari bahan penyerta sesuai jadwal yang telah mereka terima dari Sanggar Tekkom. Kemudian mereka mendengarkan siaran radio sambil membuat catatan, dilanjutkan dengan diskusi kelompok belajarnya yang biasanya terdiri dari dua sampai lima orang di sekolah tempat mereka mengajar.

Kesulitan yang tidak dapat dipecahkan dalam diskusi, dapat dicarikan pemecahannya melalui bantuan nara sumber yang ada di sekitar tempat tinggal mereka atau mengirimkan masalah tersebut ke Sanggar Tekkom untuk mendapatkan jawaban, baik melalui surat maupun siaran radio. Jawaban melalui siaran radio ini dikelola oleh Sanggar Tekkom dan disiarkan satu kali dalam seminggu.

Untuk mencapai waktu belajar Diklat SRP yang telah ditetapkan, setiap peserta wajib mengikuti siaran, dilanjutkan dengan berdiskusi selama 10 menit. Untuk menunjang terselenggaranya kegiatan belajar tersebut, siaran radio dirancang untuk bisa disiarkan pada saat jam istirahat sekolah. Dengan mengambil waktu istirahat itu, guru yang tergabung dalam kelompok belajar di setiap sekolah mempunyai kesempatan untuk mendiskusikan materi yang disampaikan lewat siaran radio.

Agar penyampaian materi pembelajaran bisa lebih dimengerti sesuai dengan prinsip penyampaian pesan melalui media radio yang bersifat satu arah diperlukan pengulangan siaran. Pengulangan

siaran ini bermanfaat untuk peserta yang telah mengikuti siaran pada pagi hari juga sekaligus untuk memberi kesempatan kepada peserta yang tidak sempat mengikuti siaran pada pagi itu. Dengan demikian, mereka tidak tertinggal dari teman-teman kelompok belajarnya karena mempunyai kesempatan mengikuti siaran radio di rumah masing-masing pada sore hari.

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Penilaian hasil belajar, yang selanjutnya disebut penilaian, dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan selama satu paket. Dengan demikian, penilaian dilakukan setiap akhir paket atau enam bulan sekali sehingga untuk keseluruhan paket setiap peserta harus mengikuti enam kali penilaian.

Peserta yang lulus dalam penilaian berhak mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) yang ditandatangani oleh Koordinator Administrasi (Kormin) Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selaku Ketua Panitia Penilaian Daerah.

Untuk menghasilkan soal yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, soal penilaian dikembangkan oleh suatu tim yang terdiri dari Pusat Pengembangan Sistem Ujian (Pusjian) Balitbang Dikbud, Dikgutenis, dan Pustekkom Dikbud. Sebagai bahan acuan untuk pengembangan soal, digunakan Bahan Penyerta dan Bahan siaran radio pendidikan.

Kepada peserta Diklat SRP yang telah menyelesaikan tiap paket dan dinyatakan lulus dalam penilaian Diklat SRP akan diberikan STTPL, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. STTPL diberikan kepada peserta yang memenuhi syarat minimal lulus apabila mendapat nilai minimum 56 untuk setiap mata tataran dalam penilaian yang diselenggarakan setiap akhir paket.
2. STTPL program Diklat SRP setiap paket memiliki bobot dua angka kredit dan masuk unsur penilaian satu sub unsur dua (1.2 dan 1.2.0) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 143/MPK/1990 tanggal 5 Juli 1990.

3. Satuan jam kegiatan Diklat SRP adalah 45 menit, dengan jumlah jam rata-rata kegiatan belajar per paket 80 jam.

HASIL YANG DICAPAI

Pada periode tahun 1992/93 sampai dengan tahun 1996/97, peserta Diklat SRP yang terdaftar dan aktif adalah 108.136 orang dengan penyebaran wilayah terlihat di Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Peserta Diklat SRP menurut Propinsi

No.	Propinsi	Peserta
1.	DI. Aceh	486
2.	Riau	902
3.	Sumatera Barat	1.177
4.	Jambi	2.156
5.	Sumatera Selatan	486
6.	Jawa Barat	3.039
7.	Jawa Tengah	62.006
8.	DI. Yogyakarta	2.810
9.	Jawa Timur	19.675
10.	Kalimantan Barat	940
11.	Kalimantan Tengah	683
12.	Kalimantan Timur	388
13.	Kalimantan Selatan	1.842
14.	Sulawesi Selatan	597
15.	Sulawesi Tenggara	2.353
16.	Sulawesi Tengah	2.031
17.	Nusa Tenggara Barat	2.500
18.	Nusa Tenggara Timur	1.418
19.	Maluku	1.500
20.	Irian Jaya	186
21.	Timor Timur	961
Jumlah		108.136

Sumber data: Bagian Proyek TKPD Pustekkom Dikbud.

Penyelenggaraan Diklat SRP putaran satu ini tidak bisa berlangsung tepat tiga tahun mengingat penyelenggaraan awalnya tidak bisa dilakukan secara serentak di 21 propinsi. Dari jumlah

tersebut yang mengikuti secara penuh dan telah mendapatkan sertifikat (STTPL) dari Paket 1 sampai dengan Paket 6 adalah 78.925 orang.

Tabel 2. Rincian Paket yang Telah Diselesaikan

Paket yang diselesaikan			Mata Kuliah D-II PGSD yang dibebaskan		
Paket	Ekuivalen	SKS yang diakui	No. Kode	Mata Kuliah	SKS
I	12 SKS	4 SKS	PGSD 2405	Pengembangan Program Muatan Lokal (PPML)	2 SKS
II	13 SKS	4 SKS	PGSD 2502	Prespektif Global	2 SKS
III	12 SKS	4 SKS	MKDU 420X	Agama	4 SKS
IV	13 SKS	4 SKS	PGSD 2104	Pendidikan Keterampilan Berbahasa	4 SKS
V	13 SKS	7 SKS	PGSD 2101	Kapita Selekt Kependidikan SD	4 SKS
			MKDU 4104	Pancasila	2 SKS
			PGSD 2404	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	3 SKS
			PGSD 2402	Pendidikan Seni Musik/Tari/Drama	2 SKS
VI	14SKS	6 SKS	MKDU 4105	Kewiraan	2 SKS
			PGSD 2204	Matematika	4 SKS
Juml.	77SKS	29 SKS		10 Mata Kuliah	29 SKS

Catatan : Bahasa Inggris tidak dihitung.

Sumber: FKIP, Universitas Terbuka.

Jumlah Peserta yang menerima STTPL setiap paketnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah peserta yang terdaftar pertama kali, karena adanya beberapa faktor sebagai berikut.

1. Adanya peserta yang tidak lulus penilaian tiap paketnya.
2. Adanya peserta yang setelah menyelesaikan paket awal tetapi tidak mengikuti paket-paket berikutnya dengan berbagai alasan. Secara rinci dari jumlah 108.136 orang, peserta yang telah lulus penilaian dan telah mendapatkan sertifikat setiap paketnya dapat dilihat pada Tabel 2.

PENILAIAN PENYELENGGARAAN PROGRAM

Penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Program Diklat SRP dilakukan untuk mengetahui sampai di mana

setiap komponen dan mekanisme penyelenggaraan dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Penilaian ini dilakukan secara bersama-sama antara Dikgutentis dan Pustekkom Dikbud.

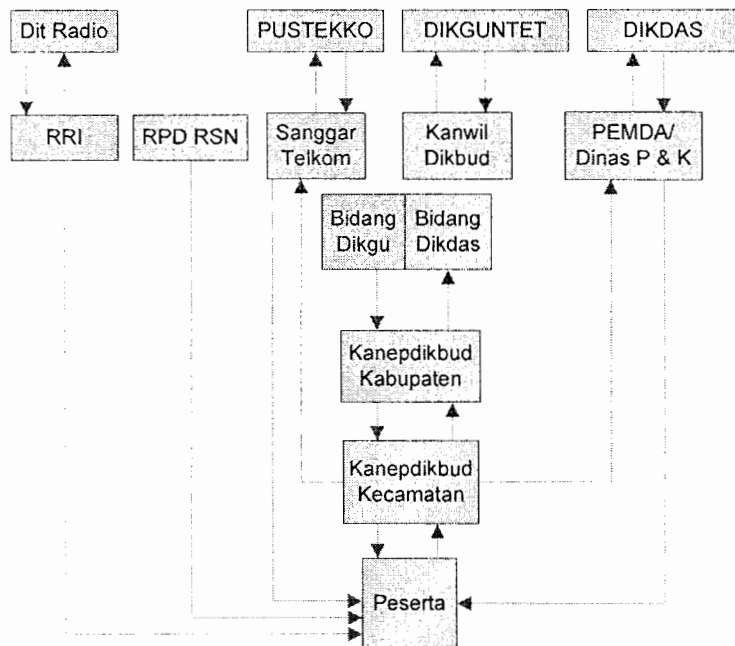
Kegiatan penilaian dilakukan terhadap seluruh komponen organisasi penyelenggara program Diklat SRP di daerah, dari tingkat propinsi, kabupaten, sampai kecamatan yang diambil secara acak karena tidak memungkinkan penilaian secara menyeluruh. Penilaian terhadap penyelenggaraan program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan pembinaan yang dilakukan setahun sekali. Hasil dari penilaian ini digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan penyempurnaan sistem penyelenggaraan program Diklat SRP, baik bagi pihak Dit. Dikgutentis maupun Pustekkom Dikbud.

ORGANISASI

Untuk menjamin terselenggaranya dan tercapainya tujuan Diklat SRP sebagaimana yang direncanakan, disusun suatu organisasi dan mekanisme kerja sebagai berikut.

1. Forum Koordinasi tingkat Pusat yang anggotanya terdiri dari unsur Pustekkom Dikbud, Dit. Radio Deppen, Dit. Dikgutentis, dan Dit. Dikdas yang bertugas antara lain untuk menyusun dan mengusulkan kebijakan diklat, menyiapkan dan menyediakan bahan dan sarana belajar, mengkoordinasikan pelaksanaan diklat, merencanakan dan mengembangkan penilaian, melaksanakan pemantauan dan pembinaan, dan menyusun serta melakukan penyempurnaan penyelenggaraan program diklat.
2. Forum Koordinasi tingkat daerah yang terdiri dari unsur Kanwil Dikbud, Sanggar Tekkom, Pemda/Dinas P dan K serta RRI/RPD/RSN, yang mempunyai tugas antara lain melaksanakan penyelenggaraan Diklat SRP, mengadakan pemantauan dan pembinaan terhadap kelompok belajar, serta melaksanakan penilaian dan melaporkan kegiatan secara berkala.

Secara lebih jelas struktur organisasi tersebut bisa dilihat pada bagan berikut.



DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, O. M. 1998. Siaran radio pendidikan (Analisis model peningkatan kualifikasi guru SD), *Buletin Teknodik*, 5/IV/Teknodik/November 1998.
- Cantrill, H. & Allport, G. W. 1971. *The psychology of radio* (Edisi Revisi). New York: Arno Press and The New York Times.
- Simanjuntak, D. 1979. *Evaluasi prestasi belajar guru sekolah dasar dalam rangka pemanfaatan radio pendidikan*. Jakarta: Pustekkom Dikbud.
- Habib, Z. 1984. *Siaran radio pendidikan untuk penataran guru-guru sekolah dasar*. Jakarta: Pustekkom Dikbud.
- Habib, Z. 1999. *Pendidikan dan pelatihan guru sekolah dasar melalui siaran radio pendidikan, sebuah alternatif pendidikan*

- dan pelatihan*. Jakarta: Pustekkom Dikbud.
- Papay, J. P., Natakusumah, S., Pigawali, M., & Suhedi. 1981. *In depth study of in service education through radio broadcast for primary school teachers. A case study report*. Jakarta: Pustekkom Dikbud.
- Miarso, Y. 1984a. *Pendidikan melalui radio. Apa yang dapat disampaikan*. Jakarta: Pustekkom Dikbud.
- Miarso, Y. 1984. *Berbagai pertimbangan pokok dalam penggunaan media pendidikan*. Jakarta: Pustekkom Dikbud.
- Sadiman, A. S. 1994. Siaran radio pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat pantai dan kepulauan. Makalah disajikan dalam *Seminar Pendidikan Melalui Radio Bagi Masyarakat Pantai dan Kepulauan di Sulawesi Selatan, Ujung Pandang*.
- Singowidjojo, S., Sumitro. M., Sukiman, & Rasyid. H. 1989. *Evaluasi SRP di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, DI. Yogyakarta dan Kalimantan Tengah*. Jakarta: Pustekkom Dikbud.
- Pustekkom Dikbud. 1992. *Masterplan penataran jarak jauh melalui siaran radio pendidikan*. Jakarta: Pustekkom Dikbud.
- Pustekkom Dikbud. 1992. *Disain, penataran guru SD melalui siaran radio pendidikan (SRP) sebagai diklat kedinasan*. Jakarta: Pustekkom Dikbud.
- Pustekkom Dikbud. 1994. *Diklat SRP, Pendidikan dan pelatihan bagi guru SD melalui siaran radio pendidikan*. Jakarta: Pustekkom Dikbud.
- Summer, R. E. 1980. *Broadcasting and the public*. California: Wodswort Publishing Company.

PEMANFAATAN SIARAN TV PENDIDIKAN

Benny A. Pribadi & Bambang Sutjiatmo

Dominasi televisi (TV) dalam aktivitas kehidupan manusia tidak dapat dibendung lagi. Kondisi seperti ini bukan merupakan rekaan tetapi sudah menjadi fenomena sosial dan nyata. Beberapa tayangan program dari berbagai stasiun TV terus mengalir dan saling berlomba untuk mendapat tempat di hati pemirsa. Tayangan TV yang memperoleh *rating* pemirsa yang tinggi cenderung menjadi incaran bagi para pengelola stasiun siaran. *Rating* dalam penyiaran program TV memberi jaminan *income* atau pemasukan dari iklan yang menyertai program. Pada umumnya tayangan hiburan yang menarik memperoleh *rating* tinggi sementara tayangan yang bersifat informasi dan pendidikan memperoleh *rating* yang rendah.

Kondisi seperti ini memicu para pengelola stasiun TV untuk lebih banyak menayangkan program hiburan. Sebaliknya, situasi ini menimbulkan kekhawatiran bagi mereka yang peduli terhadap perkembangan intelektual dan sikap pemirsa. Sangat disayangkan jika kemampuan yang luar biasa dari media TV yang mampu hadir dekat dengan pemirsa hanya didominasi tayangan yang kurang mendidik. Sejumlah pakar media pendidikan berpendapat bahwa TV adalah sumber yang kaya untuk pendidikan seperti yang dinyatakan oleh Remich (1986: 224) "*...clearly TV now represents many things and is a rich resource for instruction and training*".

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan yang jawabannya menuntut pemikiran yang tajam, seperti: Apakah TV hanya merupakan medium hiburan atau dapatkah TV berperan dalam mendidik masyarakat? Artikel ini akan mencoba mengetengahkan potensi medium TV sebagai sarana pendidikan di Indonesia dan upaya yang diperlukan dalam meningkatkan pemanfaatan TV dalam pendidikan.

KARAKTERISTIK MEDIUM TV

Medium TV tergolong sebagai medium pandang-dengar (*audio-visual*). Medium ini mampu menyajikan beragam informasi dan ilmu pengetahuan dalam bentuk tayangan kombinasi antara gambar dan suara. Karakteristik ini sekaligus merupakan keunggulan medium TV. Medium TV dianggap sebagai kotak ajaib - *magic box* - yang mampu memaku penonton untuk menerima berbagai pesan dan informasi yang ditayangkan, baik yang bersifat lokal maupun global.

Sesuai dengan asal katanya "tele" (jauh) dan "visi" (lihat), mampu melihat jarak jauh, medium ini mampu mengatasi hambatan ruang/jarak. Artinya, dalam berkomunikasi melalui siaran TV, pemirsa (*audience*) akan dapat menerima informasi pada waktu yang bersamaan dari orang atau objek yang berada pada lokasi yang berbeda. Medium TV, sama seperti halnya medium surat kabar dan radio, dapat digolongkan sebagai *mass medium*. Hal ini disebabkan medium ini mampu menjangkau sejumlah besar pemirsa dalam jumlah besar yang berada dalam wilayah geografis yang luas. Namun, berbeda dengan surat kabar dan media massa lain, medium TV dapat menyajikan *motion pictures* yang dapat menggugah perasaan dan mempercepat terjadinya pemahaman pemirsa terhadap informasi dan pengetahuan yang ditayangkan.

PEMANFAATAN MEDIUM TV

Keunggulan Siaran TV

Dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran ada tiga aspek penting yang harus dicapai, yaitu aspek kognitif (pengetahuan); aspek afektif (perasaan dan penghayatan); dan aspek psikomotor (gerakan). Medium TV dapat dirancang dan digunakan secara maksimum untuk mengkomunikasikan pesan dan informasi yang berada dalam lingkup ketiga aspek tersebut. Sebagai sebuah *mass medium*, TV mempunyai tiga fungsi pokok yaitu memberi informasi, memasyarakatkan gagasan, dan memotivasi pemirsa untuk melakukan suatu tindakan. Televisi telah terbukti mampu

mengkomunikasikan beragam informasi. Disamping itu, medium ini dapat digunakan untuk mendorong munculnya inspirasi yang pada akhirnya dapat memotivasi terjadinya tindakan yang positif.

Program TV dapat dirancang semaksimal mungkin untuk mengajarkan aspek kognitif, dengan potensi yang dimiliki seperti paduan gambar, gerak, dan suara, TV, mampu mengkomunikasikan informasi dan pengetahuan secara riil dalam urutan penyajian yang sistematis. Program TV mampu menayangkan objek riil dan peristiwa aktual melalui gabungan antara unsur gambar dan unsur suara. Sebagai contoh, proses kimia, proses perubahan fisika, dan proses daur kehidupan dalam mata pelajaran biologi dapat diperlihatkan secara nyata melalui medium TV. Perubahan fisika dan berlangsungnya daur biologis dalam gerak dan warna akan menarik perhatian pemirsa dan membantu mereka memahami fenomena alam yang ditayangkan.

Dalam program tertentu, medium TV mampu mengkomunikasikan pesan dan pengetahuan afektif secara efektif. Tayangan seni atau drama melalui program TV dapat menggugah penghayatan (apresiasi) pemirsa terhadap suatu bentuk seni dan kebudayaan. Dengan potensi yang dimiliki, medium TV juga mampu menayangkan pesan-pesan pendidikan yang bersifat universal.

Medium TV sangat efektif untuk menayangkan pengetahuan tentang berlangsungnya suatu gerakan motorik. Dalam mata pelajaran yang menekankan gerakan sebagai unsur utama, seperti dalam pendidikan olah raga dan keterampilan, pemirsa dapat mempelajari beragam gerakan yang harus dikuasai melalui medium TV. Pemirsa akan mudah melakukan observasi dan mempelajari beragam gerakan tertentu yang ingin dipelajari melalui fasilitas *slow motion* yang terdapat pada medium ini.

Dengan potensinya yang sangat besar dalam menayangkan gambar, suara, lambang, tulisan, dan gerakan secara bersama, medium TV dapat didesain sedemikian rupa sehingga mampu menampilkan bermacam pesan pendidikan atau *educational messages* yang efektif kepada khalayak. Produser program siaran

TV pendidikan harus bersifat kreatif dalam merancang dan memproduksi beragam program yang akan disiarkan. Masyarakat berpandangan bahwa medium TV adalah medium hiburan. Produser program siaran TV pendidikan harus dapat mengintegrasikan bermacam unsur hiburan (*entertainment*) untuk meningkatkan daya tarik program. Pengintegrasian unsur hiburan ke dalam program siaran TV pendidikan akan menghasilkan program *edutainment*, yaitu program TV yang mendidik sekaligus menghibur.

Miarso (2004) memberikan lima pedoman yang perlu diperhatikan oleh produser dalam merancang dan memproduksi program siaran TV pendidikan sehingga dapat dengan efektif diterima oleh khalayak sebagai berikut.

- Program perlu disesuaikan dengan kebutuhan pengetahuan dan sasaran.
- Isi program harus memiliki nilai pendidikan yang dianut masyarakat.
- Program siaran harus dirancang sesuai dengan aspirasi yang ada di masyarakat.
- Program sebaiknya dibuat secara berkesinambungan.
- Tujuan program harus jelas dan spesifik.

Keterbatasan Siaran TV

Selain memiliki sejumlah potensi, siaran TV juga memiliki keterbatasan. Siaran TV seringkali dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan *one way communication*. Artinya, pemirsa hanya bersikap pasif dan tidak dapat memperoleh umpan balik secara langsung terhadap informasi dan pengetahuan yang ditayangkan. Pemanfaatan siaran TV dengan sistem *one way communication* merupakan keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam merancang tayangan siaran TV pendidikan. Bates (1984: 30) mengemukakan kelemahan siaran TV yang bersifat searah sebagai "... *broadcasts are ephemeral, can not be reviewed, are uninterruptable, and are presented at the same pace for all students.*"

Tayangan program melalui TV biasanya dilakukan dalam kecepatan penyajian yang sama (*fixed rate*). Siswa atau pemirsa

tidak dapat mencermati informasi tertentu yang ingin dipelajari. Jika diaplikasikan untuk keperluan pendidikan, tayangan yang bersifat *one way communication* agak menyulitkan mahasiswa dalam mempelajari informasi dan ilmu pengetahuan (Bates, 1983).

Kondisi seperti ini dapat diatasi dengan menyediakan tayangan interaktif bagi pemirsa. Interaksi antara penyaji (*presenter*) dalam program TV dengan pemirsa dapat dilakukan dengan menggunakan saluran telepon. Dengan fasilitas interaktif ini siswa dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang lebih rinci yang disampaikan oleh penyaji. Jonassen (1996) berpendapat bahwa siaran TV *open broadcast* dapat dibuat menjadi interaktif jika dilengkapi dengan fasilitas berupa sistem *audio- video return circuit*.

KATEGORI DAN MODEL SIARAN TV PENDIDIKAN

Penyiaran program TV pendidikan dapat digolongkan menjadi siaran yang bersifat umum dan khusus. Siaran yang bersifat umum adalah program pendidikan yang dapat diikuti oleh semua golongan pemirsa. Contoh siaran yang bersifat umum misalnya adalah program *discovery*, *features* tentang seni dan budaya, dan sejumlah program *talk show* dengan topik yang sangat bervariasi. Program berbentuk *talkshow* dan *features* yang belakangan ini banyak ditayangkan pada sejumlah stasiun TV swasta diharapkan dapat memperluas wawasan pemirsa tentang bidang ilmu dan pengetahuan tertentu.

Siaran TV pendidikan yang bersifat khusus yang sering disebut sebagai TV pembelajaran (*instructional TV*) adalah siaran TV yang sengaja dirancang untuk pemirsa atau khalayak tertentu. Contoh siaran pendidikan adalah pelajaran sekolah dan siaran perkuliahan Universitas Terbuka (UT) yang pernah ditayangkan oleh Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). Siaran ini dirancang secara khusus untuk mengkomunikasikan materi ajar kepada siswa sekolah menengah dan mahasiswa yang mengikuti program pendidikan jarak jauh.

Penyiaran program TV dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu *terrestrial*, *kabel*, dan *satelit*. Penyiaran program secara

terrestrial dimaksudkan agar program yang disiarkan dapat diterima oleh sejumlah besar pemirsa yang berada dalam wilayah geografis yang luas. Penyiaran dengan cara terrestrial dikenal juga dengan istilah siaran terbuka (*open broadcast*). Penyiaran program melalui kabel dan satelit biasanya diarahkan pada pemirsa tertentu dalam jumlah yang terbatas. Untuk dapat menikmati program dan acara TV kabel, pemirsa harus berlangganan atau membayar uang iuran secara reguler. Di samping itu, pemirsa terlebih dahulu harus memiliki peralatan tertentu berupa alat penerima siaran atau *decoder*. Penayangan program dapat dilakukan secara langsung (*live*) atau melalui siaran tunda (*delayed*). Dalam siaran langsung tidak diperlukan adanya aktivitas rekaman terlebih dahulu. Objek dan peristiwa diliput secara langsung dan dipancarkan ke seluruh wilayah.

SIARAN TV PENDIDIKAN DI INDONESIA: SIARAN TERBUKA

Siaran TV di Indonesia dimulai pada tahun 1962 pada saat TVRI didirikan. Penyiaran program melalui saluran TVRI lebih ditekankan pada berita, penyuluhan dan penyebaran informasi dari pemerintah, acara berbentuk hiburan, serta peristiwa olah raga. Semenara itu, program pendidikan sampai saat ini masih memperoleh porsi siaran yang relatif sangat kecil. Program-program pendidikan yang ditayangkan melalui TVRI pada umumnya berisi informasi tentang keterampilan dan pengetahuan yang bersifat umum. Hasta karya, cepat tepat dan pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika adalah contoh program TVRI yang pernah digemari oleh pemirsa. Pada saat itu, TVRI masih merupakan satu-satunya stasiun TV di Indonesia. Berdasarkan data TVRI tahun 1994, program pendidikan yang ditayangkan oleh TVRI mencapai 12,10% (TVRI, 1994).

Pada pertengahan tahun 1980, dunia siaran TV diramaikan dengan hadirnya sejumlah stasiun TV Swasta. Rajawali Citra Televisi (RCTI); Surya Citra Televisi (SCTV); Indosiar; ANTV dan TPI saling berlomba menayangkan program unggulan mereka.

Namun disayangkan mayoritas stasiun TV swasta tersebut lebih banyak menayangkan program yang bersifat hiburan. Program pendidikan masih tetap memperoleh porsi siaran yang relatif sangat kecil. Stasiun TV swasta tersebut berlomba mengejar pendapatan yang berasal dari tayangan komersial atau iklan.

Program hiburan yang menarik, tentunya akan menyedot produsen untuk menaruh iklan di stasiun TV mereka. Faktor ini merupakan salah satu penyebab utama mengapa program TV pendidikan hanya diberi jatah siaran yang sangat kecil. Dengan kata lain, penayangan TV pendidikan tidak mampu mendatangkan pendapatan bagi stasiun TV swasta. TV pendidikan tidak dapat bersaing dengan program-program TV yang bersifat hiburan (*entertainment*).

Namun demikian, pada awal berdirinya tahun 1991, TPI menyediakan sebagian besar waktunya untuk menayangkan program pendidikan dan pembelajaran. Sejumlah institusi pendidikan melakukan kerjasama dengan TPI untuk menayangkan program yang mereka hasilkan. Untuk menayangkan program pendidikan dasar dan menengah, TPI melakukan kerjasama produksi dengan Pusat Teknologi Komunikasi dan Pendidikan (Pustekkom), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud). Sedangkan untuk penayangan program pendidikan tinggi, TPI melakukan kerjasama dengan UT. Program TV yang dihasilkan oleh UT selain diikuti oleh mahasiswa UT diharapkan juga dapat diikuti oleh mahasiswa perguruan tinggi lain dan juga masyarakat umum. Program TV perkuliahan UT selain bertujuan untuk memperkaya pengetahuan mahasiswa juga ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat. Namun sejak September 1997, TPI mengurangi siaran program TV pendidikan, karena penayangan program pendidikan ternyata tidak mampu menghasilkan pendapatan untuk menunjang kegiatan operasional TPI. Saat ini TPI mengubah citra dari TV pendidikan menjadi TV keluarga. Perubahan citra ini diikuti dengan perubahan yang signifikan dalam pola siaran. TPI memperbesar porsi acara atau program yang bersifat hiburan.

SIARAN TV PENDIDIKAN DI INDONESIA: POLA PENYIARAN MELALUI SATELIT SIARAN LANGSUNG

Cara lain yang dapat dilakukan untuk menyiarkan program TV pendidikan selain dengan siaran terbuka (*open broadcast*) adalah melalui satelit siaran langsung (*direct broadcast satellite*) atau dikenal dengan sebutan TV-SSL. Dalam sistem ini, program dipancarkan melalui satelit dan dapat diterima hanya pada lokasi tertentu yang memiliki *decoder* sebagai pesawat penerima. Sejak tahun 1998, UT dan Pustekkom telah mengembangkan dan memproduksi sejumlah program untuk TV-SSL ini. Pada tahap awal, rencana penyiaran program dilakukan secara terbatas. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa untuk penerimaan siaran di perguruan tinggi memerlukan biaya yang relatif cukup tinggi untuk pembelian peralatan penerima.

Tujuan utama TV-SSL adalah untuk meratakan dan meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan program TV-SSL dalam mencapai tujuan tersebut dapat ditempuh cara lain, misalnya dengan menggandakan kaset master program dan mendistribusikannya ke seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Dengan cara itu, perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang berlangsung sangat pesat diharapkan dapat didiseminasikan keseluruh wilayah Indonesia.

Agar tujuan penyelenggaraan program TV-SSL dapat mencapai sasaran dan tujuannya maka akses untuk mengikuti program tersebut perlu diperluas. Sosialisasi program perlu dilakukan sehingga masyarakat dalam hal ini sekolah dan perguruan tinggi dapat menyadari akan arti penting siaran program TV untuk pendidikan

PENUTUP

Pemanfaatan media TV untuk pendidikan di Indonesia hingga saat ini masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan program pendidikan tidak mampu menarik dana masyarakat (terutama dari iklan) sehingga program ini menjadi beban bagi stasiun TV yang

menyiarkan. Oleh karena itu, selain TVRI, tidak ada stasiun TV swasta yang secara intensif dan ekstensif mampu menyiarkan program pendidikan, terutama yang bersifat instruksional.

Mengingat TV merupakan medium yang berpotensi sebagai media pendidikan maka sewajarnya media ini mendapat perhatian dari berbagai pihak yang terkait yang tidak hanya dari pihak pemerintah tetapi juga seluruh masyarakat, pihak TV swasta khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bates, A. W. 1983. Dalam M. J. A. Howced (Ed.). *Learning from television psychological and educational reseach*. London: Academic.
- Bates, A. W. 1984. *Broadcast television in distance education: A world wide perspective*. London: Crom Helm.
- Heinich, R. dkk 1986. *Instructional media and the new technologies of instruction*. New York: Macmillan Publiching Company.
- Jonassen, DH. (Ed.). 1996. *Educational communications and technology*. New York: Simon & Schuster.
- TVRI. 1994. *Empat Windu TVRI*. Jakarta: TVRI.
- Miarso, Y. 2004. *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Kencana.

PENDIDIKAN TINGGI (MODUS TUNGGAL, GANDA, DAN KONSORSIUM)

Siti Julaeha & Atwi Suparman

Salah satu masalah utama pendidikan tinggi adalah pemerataan pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan terbatasnya kapasitas perguruan tinggi dalam memberikan kesempatan kepada kelompok penduduk yang berusia 19-24 tahun untuk memperoleh pendidikan. Setiap tahun ajaran baru, hanya sebagian kecil dari lulusan SLTA yang tertampung di perguruan tinggi. Tentu saja, jumlah lulusan SLTA yang tidak tertampung ini akan terus bertambah, jika tidak ditangani lebih lanjut. Hal ini terbukti dengan masih rendahnya angka partisipasi kasar untuk pendidikan tinggi di Indonesia pada tahun 1995, yaitu kurang lebih 10% (Soehendro, 1996).

Selain itu, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut orang untuk terus belajar. Baik karena tuntutan pekerjaan maupun untuk perluasan wawasan, orang mencari lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk melanjutkan studi tanpa harus meninggalkan tempat kerjanya. Sistem pendidikan yang cocok untuk mereka adalah sistem pendidikan jarak jauh (*distance education*).

Penerapan sistem PJJ menuntut sebagian besar pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Pembelajaran berlangsung melalui perantaraan media, baik dalam bentuk media cetak, audio, video, siaran radio dan televisi, maupun media berbasis jaringan. Bahan belajar dirancang sedemikian rupa sehingga mahasiswa dapat belajar secara mandiri. Kebiasaan belajar mandiri yang dilandasi dengan disiplin belajar yang tinggi memungkinkan tumbuhnya masyarakat belajar (*learning society*), yaitu masyarakat yang memiliki budaya belajar secara terus menerus (Achir, 1997).

Dua ciri penting PJJ adalah pertama, bahwa PJJ dirancang untuk melayani kebutuhan orang dewasa yang tidak mampu atau

tidak memiliki pilihan untuk mengikuti pendidikan di kampus, dan bagi mereka yang karena kondisi pribadi seperti pekerja, yang hanya dapat mengikuti pendidikan paruh waktu. Yang kedua, sebagai konsekuensi dari peserta didik yang tidak dapat datang ke kampus untuk mengikuti pembelajaran, materi pembelajaran harus tersedia bagi mereka di mana pun mereka berada atau paling tidak dekat dengan mereka (Rumble, 1981 dalam Tau, 2006). Untuk alasan ini lembaga PJJ merancang, mengembangkan, memproduksi, dan mendistribusikan bahan belajar kepada peserta didik.

Dalam sistem pendidikan Indonesia, PJJ sudah bukan menjadi pendidikan alternatif lagi, tetapi telah menjadi sub-sistem pendidikan nasional di Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 13 Ayat (2) bahwa pendidikan diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau jarak jauh. Lebih lanjut Pasal 31 Ayat (2) menyatakan bahwa PJJ berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.

Mengingat betapa pentingnya PJJ dalam upaya mengatasi masalah pemerataan pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengajukan program PJJ sebagai salah satu strategi implementasi pada bidang pemerataan dan tanggung jawab sosial untuk menekankan peranan pendidikan tinggi dalam peningkatan daya saing bangsa dalam Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi (*Higer Education Long Term Strategy*) 2003 - 2010. Dalam penyelenggaraannya, PJJ dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan yang sesuai dengan standar nasional.

Dalam pelaksanaannya PJJ mengalami perkembangan yang sangat pesat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Taylor (2001) menyatakan bahwa pelaksanaan PJJ telah memasuki generasi kelima, yaitu *The Correspondence Model* (generasi pertama), *The Multi-Media Model* (generasi kedua), *The Telelearning Model* (generasi ketiga), *The Flexible Learning Model*

(generasi keempat), dan *The Intelligent Flexible Learning Model* (generasi kelima). Sementara itu, Connolly & Stansfield (2006) menyatakan bahwa penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan (tidak hanya PJJ) telah memasuki generasi keenam, yang merupakan generasi ketiga dari *e-learning*.

Selain itu, model-model organisasi lembaga pendidikan tinggi jarak jauh (PTJJ) juga terus berkembang. Secara umum, ada tiga kategori lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan PJJ, yaitu PTJJ modus tunggal (*single mode*), modus ganda (*dual mode*), dan konsorsium. Dalam artikel ini akan dikaji tentang ketiga jenis organisasi PJJ tersebut.

PENDIDIKAN TINGGI JARAK JAUH MODUS TUNGGAL

Moore & Kearsley (1996) mengemukakan bahwa PJJ adalah pendidikan yang hanya bertujuan menyelenggarakan PJJ; segala kegiatan diarahkan atau ditujukan pada PJJ. Pengertian ini sesuai dengan pendapat Abrioux (2006) yang menyatakan bahwa lembaga PJJ dengan modus tunggal adalah lembaga pendidikan di mana sistem pembelajaran dan administratifnya dirancang dan diarahkan pada penyediaan PJJ.

Keegan (1991) menyebut PJJ modus tunggal dengan istilah *autonomous distance-teaching institutions*. Lebih lanjut Keegan (1991) dan Garrison (1990) membagi lembaga jenis ini ke dalam dua kategori yaitu *public and private correspondence schools and colleges* dan *distance teaching universities* atau *open universities*. Perbedaan kedua jenis ini terletak pada kompleksitas struktur dan ketentuan belajar.

Public and private correspondence schools and colleges menyelenggarakan pendidikan dengan bahan belajar dan proses pembelajaran yang cenderung tidak begitu kompleks, khususnya dalam penggunaan *big media* dan pertemuan tatap muka. Selain itu, lembaga ini biasanya menawarkan program kepada anak-anak atau orang dewasa pada tingkat yang lebih rendah dari tingkat pendidikan tinggi. *The National Extension College*, Cambridge; *Leidse Onderwijsinstellingen*, Leiden; *the New South Wales College of*

External Studies, Sidney; dan *the Alberta Correspondence School*, Kanada merupakan contoh dari *public and private correspondence schools and colleges*.

Distance teaching universities atau *open universities* bertujuan memberikan layanan dukungan sebanyak mungkin bagi peserta PJJ. *Distance teaching universities* lebih memusatkan perhatiannya pada penyediaan program untuk tingkat pendidikan tinggi, meskipun ada beberapa lembaga pendidikan jenis ini yang menawarkan program di luar tingkat pendidikan tinggi. Selain itu, jenis lembaga pendidikan ini menggunakan media secara lebih komprehensif dalam kegiatan pembelajarannya. Contoh PTJJ dengan modus tunggal adalah Universitas Terbuka di Indonesia, the British Open University atau The United Kingdom Open University (UKOU) di Inggris, the FernUniversitat di Jerman, Sukhothai Thammathirat Open University di Thailand, dan UNED di Spanyol. Semula Kanada memiliki tiga universitas jarak jauh dengan modus tunggal, yaitu the British Columbia Open University (BCOU), Tele-universite de l'Universite du Quebec (TELUQ), dan Athabasca University. Setelah 30 tahun Kanada hanya memiliki Athabasca University sebagai satu-satunya PTJJ dengan modus tunggal (Abrioux, 2006).

Universitas Terbuka (UT) merupakan contoh PTJJ dengan modus tunggal di Indonesia. Pada saat berdirinya, UT merupakan satu-satunya lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan PJJ secara utuh (*single mode*). UT didirikan pada tanggal 4 September 1984. UT didirikan Pemerintah Indonesia dengan tujuan: (1) memberikan kesempatan yang luas bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing, di mana pun tempat tinggalnya untuk memperoleh pendidikan tinggi; (2) memberikan layanan pendidikan tinggi bagi mereka, yang karena bekerja atau karena alasan lain, tidak dapat melanjutkan belajar di perguruan tinggi tatap muka; dan (3) mengembangkan program pendidikan akademik dan profesional yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata pembangunan, yang belum banyak dikembangkan oleh perguruan tinggi lain (UT, 2004).

UT, sebagai lembaga pendidikan tinggi yang hanya menyelenggarakan PJJ, tidak menuntut mahasiswa untuk datang ke

kampus. Untuk menjadi mahasiswa UT, calon mahasiswa dapat membeli berkas registrasi di kantor perwakilan UT di daerah yang disebut Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ), yang merupakan unit pelaksana di daerah, di samping sebagai pusat sumber belajar. UPBJJ tersebar di 37 kota di Indonesia, yang memiliki perguruan tinggi negeri (PTN). Bahan belajar utama yang digunakan di UT adalah berbentuk media cetak. Namun demikian, secara bertahap UT mengembangkan bahan belajar non-cetak yang mengarah pada paket bahan belajar multimedia. Untuk membantu mahasiswa dalam belajar, UT menyediakan berbagai bentuk layanan bantuan belajar di antaranya tutorial dengan berbagai modus (tutorial tatap muka, elektronik, radio, dan tertulis), konseling, dan bimbingan akademik.

The British Open University (BOU) atau The United Kingdom Open University (UKOU) adalah PTJJ dengan modus tunggal di Inggris dengan misi utama membuka akses terhadap pendidikan tinggi dan membuat pendidikan tinggi tersedia bagi semua orang tidak hanya melalui penawaran program melalui PJJ tetapi juga menghapus berbagai rintangan atau hambatan (Moore & Kearsley, 1996). UKOU digagas pada tahun 1966 dan mulai beroperasi pada tahun 1969 dengan menerapkan enam konsep berikut: (1) memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk mengikuti pendidikan tinggi dengan menggunakan media komunikasi massa; (2) menerima mahasiswa tanpa batas umur dan latar belakang pendidikan; (3) biaya yang dapat dijangkau banyak orang; (4) tidak banyak pertemuan tatap muka; (5) membuat pendidikan tinggi lebih relevan; serta (6) tidak rumit dan fleksibel untuk dipilih mahasiswa (Suparman & Zuhairi, 2004: 96).

Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) merupakan PTJJ dengan modus tunggal di Thailand yang didirikan pada tahun 1978, tetapi baru menerima mahasiswa baru pada tahun 1980. STOU tidak hanya menawarkan program-program gelar, tetapi juga program pendidikan berkelanjutan.

Athabasca University (AU) didirikan oleh Pemerintah Alberta pada tahun 1970. AU memungkinkan semua orang memperoleh pendidikan pada tingkat perguruan tinggi tanpa memperhatikan

tempat tinggal atau tempat kerja dan komitmen karir atau keluarga. AU berusaha menghilangkan kendala waktu, ruang, pengalaman pendidikan sebelumnya, dan tingkat penghasilan atau pendapatan (Athabasca University, 2005).

Dengan memperhatikan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa PTJJ modus tunggal adalah pendidikan tinggi yang hanya menyelenggarakan PJJ. Sebagian besar kegiatan pembelajaran dan administratif pada PTJJ modus tunggal dilaksanakan dengan bantuan media.

Bates (2000) mengemukakan bahwa jumlah target kelompok merupakan salah satu faktor yang menyebabkan PTJJ menerapkan modus tunggal. Seperti yang dikemukakan oleh Daniel (1998 dalam Bates, 2000) bahwa hampir semua *the mega universities* dengan jumlah mahasiswa lebih dari 100.000 merupakan PTJJ dengan modus tunggal. Hal ini terjadi karena PTJJ dengan modus tunggal tergantung pada skala ekonomi. Pendidikan tinggi dengan jumlah mahasiswa yang banyak, antara 9.000 sampai 22.000, lebih efektif dan efisien apabila menerapkan modus tunggal daripada modus ganda (Keegan & Rumble, 1982 dalam Abrioux, 2006).

Berkenaan dengan kelebihan PTJJ modus tunggal, Abrioux (2006) mengemukakan bahwa lembaga pendidikan memiliki komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan PJJ dengan sistem belajar terbuka dan jarak jauh serta untuk mencapai standar kualitas dan profesional. Selain itu, PTJJ dengan modus tunggal memiliki kemampuan untuk menyediakan registrasi terbuka, pendaftaran terbuka dan fleksibel, serta menyelenggarakan pendidikan dengan sistem belajar individualisasi. Namun demikian, PTJJ dengan modus tunggal menuntut infrastruktur yang mahal. Efektivitas biaya pendidikan hanya dapat dipenuhi melalui jumlah mahasiswa yang tinggi. Di samping itu, untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, lembaga PTJJ modus tunggal hendaknya tetap memelihara dan meningkatkan kualitas yang telah dilakukannya, mengembangkan jaringan dukungan lokal, merekrut mahasiswa dalam lingkup internasional, memperluas pengembangan produk, serta meningkatkan kerja sama.

PENDIDIKAN TINGGI JARAK JAUH MODUS GANDA

Sejalan dengan banyaknya permintaan dari masyarakat terhadap PTJJ serta perkembangan teknologi komunikasi dalam dunia pendidikan, bermunculanlah perguruan tinggi lain yang menyelenggarakan PTJJ, di samping mereka masih tetap melayani masyarakat untuk mengikuti pendidikan konvensional. Banyak lembaga pendidikan tinggi menyelenggarakan program pendidikan tatap muka dan jarak jauh sekaligus dengan memanfaatkan berbagai teknologi baru untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa yang beragam. Pendidikan tinggi seperti ini disebut pendidikan tinggi modus ganda (*dual mode*). Secara umum, Abrioux (2006) mengemukakan bahwa lembaga pendidikan dengan modus ganda adalah lembaga yang sistem pembelajaran dan administratifnya mendukung PTJJ dan berbasis kampus (*campus-based*).

Keegan (1991) menggunakan istilah *mixed institutions* untuk lembaga pendidikan biasa yang menyelenggarakan PJJ. Ada tiga jenis lembaga pendidikan yang termasuk pada kategori ini.

Pertama adalah "*independent study divisions of conventional colleges and universities*". Pengembangan program pada lembaga jenis ini tergantung pada fakultas dari universitas induknya. Pada lembaga jenis ini, mahasiswa PJJ mempelajari materi dan mengikuti ujian yang sama dengan mahasiswa pendidikan biasa sehingga sertifikat atau ijazah yang diterima oleh mahasiswa PJJ sama dengan sertifikat atau ijazah yang diberikan kepada mahasiswa pendidikan tinggi biasa. Salah satu jenis program pendidikan yang merupakan contoh jenis ini adalah program *Extension* pada beberapa universitas atau institut, misalnya *Independent Study Divisions of the University of Nebraska* dan *University of Wisconsin Extension* di Amerika serta *Ramkhamhaeng University* dan *Chulalongkorn University* di Thailand.

Kedua adalah *consultation model*. Kegiatan belajar pada lembaga pendidikan jenis ini dimulai dengan seminar yang harus diikuti oleh mahasiswa PJJ di kampus setelah mahasiswa mempelajari bahan belajar yang disediakan di rumah. Setelah

mengikuti seminar, mahasiswa melakukan kegiatan belajar mandiri di rumah masing-masing. Kegiatan belajar mandiri ini diselengi dengan kegiatan konsultasi yang seringkali merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh mahasiswa. Kegiatan konsultasi ini berlangsung di kampus selama satu hari kerja. Dalam kegiatan ini mahasiswa memperoleh bimbingan langsung dari dosen masing-masing mata kuliah atau mata pelajaran yang diikutinya. Lembaga pendidikan tinggi jenis ini banyak dijumpai di universitas dan institut di Rusia dan Jerman.

Ketiga adalah *the Australian integrated mode*. Menurut jenis ini, pengajar mempunyai tugas ganda, yaitu merancang dan melaksanakan pertemuan tatap muka wajib bagi mahasiswa yang mengikuti PJJ dan mahasiswa yang mengikuti pendidikan biasa. Baik mahasiswa pendidikan tinggi biasa di kampus maupun mahasiswa jarak jauh memperoleh pembinaan dan bimbingan akademik dari staf pengajar yang sama dan diuji dengan instrumen evaluasi yang sama pula. Pada lembaga yang menerapkan jenis pendidikan ini, mahasiswa yang mengikuti PJJ mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan mahasiswa yang mengikuti pendidikan biasa. Perbedaan di antara kedua kelompok mahasiswa tersebut terletak pada modus atau metode pembelajaran. Mereka meregistrasi mata kuliah dan mengikuti ujian yang sama serta memperoleh ijazah atau diploma yang sama dengan mahasiswa yang mengikuti pendidikan biasa pada lembaga pendidikan tersebut. Di samping di Australia, jenis ini juga diterapkan di Zambia, Fiji, Papua Nugini, dan Jamaika.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa PTJJ modus ganda adalah PJJ yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi biasa. Namun demikian, suatu lembaga pendidikan tinggi biasa yang menyelenggarakan PTJJ tidak disebut sebagai lembaga pendidikan tinggi jarak jauh tetapi tetap sebagai lembaga pendidikan tinggi biasa (Suparman & Zuhairi, 2004).

Hal utama yang menyebabkan berkembangnya PJJ adalah pentingnya belajar sepanjang hayat, perkembangan ekonomi yang berbasis pengetahuan yang global, serta kompetisi yang tergantung

pada perbaikan dan perubahan terus-menerus. Keadaan ini menuntut lembaga pendidikan, khususnya pendidikan tinggi untuk merespons terhadap tuntutan tersebut dengan menyediakan program-program, kualifikasi, dan cara penyampaian baru. Lebih lanjut, Bates (2000) mengemukakan bahwa sistem pendidikan tinggi perlu merespons tuntutan yang berkenaan dengan asesmen kemampuan awal (*prior learning*), penyampaian pembelajaran secara luwes, tuntutan meningkatkan atau memperbaharui profesionalisme, sertifikasi non-kredit dan resertifikasi, serta pengukuran hasil belajar.

Faktor lain yang mendorong tumbuhnya PTJJ adalah teknologi. Teknologi berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan. Teknologi juga memiliki potensi untuk memperbaiki efektivitas pembelajaran. Akses terhadap sumber belajar melalui Internet memberikan kesempatan kepada peserta didik yang semula di luar jangkauan untuk memperoleh informasi lebih luas. Teknologi yang dimanfaatkan secara bijaksana dapat memfasilitasi penguasaan tingkat tinggi dari belajar sesuai dengan karakteristik masyarakat berbasis pengetahuan. Hal ini menunjukkan tekanan ideologis dan komersial pada sistem pendidikan untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran.

Selain itu, kecenderungan yang berpengaruh terhadap pendidikan adalah bisnis. Para pebisnis melihat pasar belajar sepanjang hayat sebagai sesuatu yang menunjukkan bahwa setiap orang siap dan berkeinginan untuk membayar.

Dengan memperhatikan uraian tersebut, tampak bahwa pendidikan tinggi biasa menawarkan berbagai program PJJ dapat disebabkan oleh keinginan program yang ada untuk berubah menjadi program PJJ atau karena permintaan dari salah satu *stakeholders*. Dengan modus ganda ini, pendidikan tinggi dapat meningkatkan akses masyarakat untuk mengikuti pendidikan di tingkat perguruan tinggi.

Croft (Tau, 2006) mengidentifikasi empat kondisi yang menjamin keberhasilan implementasi PJJ yang menerapkan modus ganda, yaitu: adanya unit administratif dengan beberapa tingkat

otoritas, memiliki kerja sama dengan unit yang lain, memiliki staf yang terlatih, dan dana yang memadai. Sehubungan dengan itu, diperlukan pandangan dan pendekatan sistem yang akan mencakup keempat kondisi tersebut. Pelaksanaan pendidikan tinggi modus ganda menuntut pemahaman sistem (sistem universitas) dan penataan hubungan subsistem termasuk peran masing-masing dalam menginformasikan rancangan sistem PJJ yang sesuai dengan konteks.

Struktur dasar pendidikan tinggi modus ganda menuntut adanya unit atau bagian yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyediaan atau pengembangan program-program PJJ (Tau, 2006). Fungsi unit atau bagian tersebut memfasilitasi proses PJJ yang mencakup pengembangan bahan belajar, pendistribusian bahan belajar, tutorial dan konseling, laporan peserta didik, serta penilaian atau akreditasi.

Powar (Tau, 2006) mengemukakan bahwa pengaturan yang berhasil dalam lembaga akademik pada tingkat tertentu tergantung pada struktur organisasinya. Lebih jauh Nnazor (1994 dalam Tau, 2006) mengemukakan bahwa struktur organisasi dari unit PJJ menyediakan atau mengembangkan kerangka kerja bagi semua orang yang terlibat bekerja dan juga membentuk sikap anggota organisasi melalui proses sosialisasi organisasi. Penelitian yang dilakukan The Tau (2002 dalam Tau, 2006) menemukan bahwa kekurangan strategi implementasi untuk mengarahkan pekerjaan PJJ sebagai salah satu kekurangan utama yang berpengaruh negatif terhadap kualitas pekerjaan. Masalah pengintegrasian struktur PJJ ke dalam pendidikan biasa ini dihadapi oleh beberapa PTJJ modus ganda, seperti *University of Zambia* dan *the Correspondence and Open Studies Institute di University of Lagos*.

Berkenaan dengan berbedanya struktur organisasi PJJ dari pendidikan biasa, Ntloedibe-Kuswani & Tau (2006 dalam Tau, 2006) mengemukakan pentingnya institusi memikirkan pengenalan PJJ secara pelan-pelan (*mid-stream*) kepada seluruh unit atau staf pendidikan tinggi. Untuk itu, perlu dilakukan analisis *front-end* sebelum program PJJ dirancang, dikembangkan, dan

diimplementasikan. Analisis *front-end* ini mempersiapkan institusi untuk mengarahkan tantangan potensial yang mungkin berpengaruh negatif terhadap kualitas PJJ.

Selain perbedaan struktur organisasi, proses pengembangan bahan belajar pada PTJJ juga berbeda dengan pengembangan bahan belajar pada pendidikan tinggi biasa. Pada PTJJ, proses pengembangan bahan belajar bersifat industri semu (*quasi industrial*) (Tau, 2006). Proses industri semu tersebut membawa suatu dimensi yang hampir asing dalam pengaturan dan pengelolaan pendidikan tinggi biasa. Perbedaan proses pengembangan bahan belajar ini menimbulkan situasi konflik antara kebebasan akademik dan kepentingan mempertahankan efektivitas mekanisme produksi. Hal ini menuntut perhatian PTJJ untuk menjamin kualitas penyediaan atau pengembangan bahan belajar.

Banyak universitas biasa di Indonesia dan dunia yang telah memperkenalkan PJJ untuk berjalan bersama-sama dengan pendidikan biasa dalam satu lembaga yang memuculkan pendidikan tinggi dengan modus ganda. *University of Wisconsin* dan *University of Houston* di Amerika, *University of New England* di Australia, *Universiti Sains Malaysia* di Malaysia, *The Universite du Quebec a Montreal* (UQAM) dan *Thompson Rivers University* (TRU) di Kanada, *Indira Gandhi National Open University* (IGNOU) di India, *Ramkhamhaeng University* di Thailand, *The University of Mindanao On-the Air* (UM Air) di Filipina, serta Universitas Gajah Mada (UGM) dan Institut Bank Indonesia (IBI) di Indonesia.

The Universiti Sains Malaysia (USM) merupakan pendidikan tinggi yang menerapkan modus ganda. USM telah berhasil mengintegrasikan penyampaian program *on-and-off campus* yang sama dalam hal kurikulum dan silabus. Strategi unik yang dilakukan adalah dengan membawa mahasiswa PJJ ke dalam pendidikan *on-campus* untuk menjadi mahasiswa penuh pada tahun terakhir studi. Strategi ini tidak hanya memperkaya pengalaman mahasiswa dewasa tetapi juga menguntungkan lingkungan kelas perkuliahan di mana debat yang sehat dan perluasan perspektif dapat digunakan sebagai sarana berbagi dengan mahasiswa lain yang lebih muda. Selain itu,

memasukkan mahasiswa program jarak jauh senior dapat meningkatkan pendaftaran mata kuliah spesialis pada tingkat yang lebih tinggi yang membuat mereka lebih efektif dalam belajar dan efisiensi dalam dana (Dhanarajan, 1992).

The Universite du Quebec a Montreal (UQAM) dan Thompson Rivers University (TRU) merupakan pendidikan tinggi modus ganda di Kanada. UQAM merupakan universitas tempat bergabungnya *the Tele-universite de l'Universite du Quebec* (TELUQ) yang semula sebagai PTJJ modus tunggal. Sementara itu, *Thompson Rivers University* (TRU) merupakan tempat bergabungnya *the British Columbia Open University* (BCOU) yang semula merupakan PTJJ dengan modus tunggal.

Indira Gandhi National Open University yang didirikan tahun 1985 memiliki dua tugas, yaitu sebagai universitas biasa serta mengkoordinasikan dan menentukan standar untuk lembaga PJJ lain di India. IGNOU didirikan dengan tujuan menyediakan pendidikan tinggi yang efektif dari segi biaya dan berkualitas bagi sebagian besar warga masyarakat. Dalam penyelenggaraan pendidikannya, IGNOU menerapkan prinsip kualitas dan pemerataan kesempatan dalam pendidikan tinggi.

Ramkhamhaeng University di Thailand didirikan pada tahun 1971. Universitas ini diselenggarakan dengan tujuan: (1) untuk memperluas daya jangkauan pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang mengarah pada kualitas kehidupan yang tinggi dan perhatian/kepedulian terhadap lingkungan; (2) mengembangkan lulusan yang berkualitas tinggi dengan pengetahuan profesional yang signifikan; (3) menghasilkan lulusan dengan etika tinggi, ide-ide kreatif, kepemimpinan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membantu pengembangan masyarakat dan negara; (4) mengembangkan sistem manajemen universitas yang lebih efektif, dengan penekanan pada efisiensi dan kualitas, serta hubungan staf yang efektif dengan universitas lain, lembaga pendidikan, dan masyarakat; (5) memajukan perkembangan budaya, adat-istiadat, dan seni Thailand; serta (6) mengembangkan dan mentransfer teknologi, mendukung dan menerapkan teknologi baru melalui cara

yang sesuai dengan pengetahuan asli (Ramkamhaeng University, 1998).

The University of Mindanao on-the Air (UM Air) adalah bagian dari *University of Mindanao* (universitas biasa) yang menawarkan program untuk para guru. Program ini diselenggarakan dengan menggunakan radio dan forum pertemuan sehingga guru-guru yang berada di pelosok dapat melanjutkan studi mereka untuk mencapai gelar magister (Suparman & Zuhairi, 2004).

Salah satu lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan tinggi modus ganda adalah Universitas Gajah Mada (UGM) di Yogyakarta. Program PJJ yang ditawarkan oleh UGM adalah Program Magister Manajemen Rumah Sakit dan Program Magister Manajemen Pelayanan Kesehatan pada Fakultas Kedokteran. Kedua program tersebut mulai dibuka pada tahun 1996. Salah satu persyaratan untuk mengikuti program ini adalah bahwa calon mahasiswa harus memiliki komputer atau *laptop/notebook*. Komputer ini akan digunakan pada waktu orientasi dan ujian di kampus serta pada saat kegiatan belajar mandiri berlangsung.

Dalam mengikuti program ini, kegiatan pembelajaran dimulai dengan kegiatan *on-campus* selama dua minggu. Kegiatan ini merupakan kegiatan orientasi, yang dilakukan pada setiap awal semester. Dalam kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh informasi tentang materi yang berkaitan dengan program pendidikan tetapi juga teknik pengoperasian Internet. Setelah kegiatan orientasi berakhir, mahasiswa melakukan kegiatan belajar mandiri dengan menggunakan modul sebagai bahan belajarnya. Belajar mandiri ini berlangsung selama lima bulan. Dalam kurun waktu lima bulan ini, mahasiswa tidak hanya melakukan belajar mandiri, tetapi juga mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen yang dikirim melalui *electronic mail*. Hasil tugas yang dikerjakan mahasiswa berpengaruh terhadap keikutsertaannya dalam ujian akhir semester. Di samping mengerjakan tugas yang diberikan dosen, selama belajar mandiri mahasiswa juga dapat berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya. Kegiatan konsultasi ini dilakukan melalui surat

elektronik. Pada akhir kegiatan pembelajaran, mahasiswa mengikuti ujian akhir semester di kampus.

Di samping UGM, Institut Bankir Indonesia di Jakarta juga menyelenggarakan program PJJ. Adapaun program yang ditawarkan adalah Program Pejabat Pemberian Kredit dan Program Manajemen Bank Perkreditan Rakyat (Suparman & Zuhairi, 2004).

Dari uraian tersebut tampak bahwa karakteristik umum jenis pendidikan tinggi modus ganda adalah mahasiswa yang mengikuti PJJ tidak hanya melakukan belajar mandiri tetapi juga ada pertemuan terstruktur di kampus. Pertemuan tersebut wajib diikuti oleh mahasiswa. Selain itu, bahan belajar yang digunakan dan soal ujian dikembangkan oleh staf pengajar pada lembaga pendidikan itu sendiri. Hak dan kewajiban mahasiswa PJJ sama dengan hak dan kewajiban mahasiswa pendidikan biasa. Mata kuliah yang harus diambil dan ujian yang harus diikuti, serta ijazah atau sertifikat yang diperoleh mahasiswa PJJ sama dengan yang diperoleh mahasiswa pendidikan biasa.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa pendidikan tinggi modus ganda memiliki beberapa keunggulan. Pertama, kombinasi antara bahan belajar yang dikembangkan dalam bentuk bahan belajar tercetak dengan kegiatan tatap muka lebih memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh bahan belajar yang terstruktur dan *up to date*. Kedua, dengan adanya pertemuan tatap muka yang terjadwal, dosen dapat mengontrol atau mengawasi penguasaan mahasiswa terhadap materi yang bersifat aplikasi dan keterampilan.

Penemuan *the World Wide Web* di awal tahun 1990-an telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai perguruan tinggi, khususnya bagi lembaga yang sebelumnya belum memiliki program PJJ. Pengembangan perangkat lunak telah mempermudah para dosen dalam mengembangkan sendiri komponen-komponen mengajar melalui *online*. Penelitian yang dilakukan oleh Dziuban, dkk. (1999 dalam Bates, 2000) menunjukkan bahwa nilai tinggi diperoleh ketika pembelajaran tatap muka dikombinasikan dengan belajar *online* daripada pembelajaran yang hanya dilakukan melalui tatap muka atau hanya melalui *online*.

Namun demikian, karena mahasiswa harus mengikuti kegiatan tatap muka di kampus, pendidikan tinggi dengan modus ganda tidak mungkin menjangkau mahasiswa dalam wilayah yang cukup luas. Selain itu, Abrioux (2006) mengemukakan bahwa pengajar pada PJJ dengan modus ganda menghadapi hambatan yang berat, khususnya pengajar yang tidak tertarik dengan PJJ serta yang menilai lebih rendah dan kurang efektif bentuk PJJ dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Bates (2000) menambahkan bahwa pendidikan tinggi modus ganda tidak dapat memenuhi biaya pengembangan mata kuliah yang banyak secara terpusat.

Lebih jauh, Bates (2000) mengemukakan beberapa tantangan yang PJJ modus ganda, yaitu perubahan pangsa pasar, perkembangan dalam bidang teknologi, penurunan dana dari pemerintah, privatisasi pendidikan tinggi, globalisasi, dan kompetisi yang meningkat. Berkenaan dengan tingkat kompetisi yang meningkat, Bates (2000) mengemukakan bahwa pendidikan biasa yang beralih pada PJJ harus meyakinkan atau menjamin kualitas yang tinggi pembelajaran jarak jauh untuk mahasiswa *off-campus* (jarak jauh). Hal ini tidak berarti bahwa tugas pengajar hanya memasukkan materi ke dalam jaringan tetapi lebih dari itu. Pengajar juga harus mengembangkan pembelajaran dan dukungan terhadap mahasiswa secara *online* untuk penawaran mata kuliah secara utuh. Lebih jauh Jones (2005) mengemukakan bahwa dari hasil penelitian tentang penambahan tugas dari lembaga pendidikan biasa (tatap muka) menjadi PJJ menuntut adanya asesmen ulang atau restrukturisasi peran pengajar. Hal ini berkenaan dengan peran akademis yang berkaitan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh pengajar jarak jauh, layanan lembaga, dan pengembangan profesional.

Dalam beberapa lembaga pendidikan modus ganda, PJJ didesentralisasi pada setiap fakultas. Ketika PJJ didesentralisasi di fakultas, kegiatan cenderung menurun dibandingkan dengan sistem sentralisasi, kecuali dalam bidang kegiatan yang memungkinkan fakultas akan memperoleh dana atau masukan.

PENDIDIKAN TINGGI JARAK JAUH DENGAN KONSORSIUM

Model organisasi PJJ yang ketiga adalah konsorsium. Model ini diterapkan oleh beberapa lembaga pendidikan tinggi yang bergabung untuk menyelenggarakan PTJJ. Moore & Kearsley (1996) mengemukakan bahwa PTJJ konsorsium beranggotakan dua atau lebih lembaga atau unit PJJ yang berbagi tugas dalam perancangan dan/atau penyampaian program. Lebih khusus Feasley (2003) menyatakan bahwa PTJJ model konsorsium adalah asosiasi atau perkumpulan yang bekerja sama dalam penyediaan PJJ serta memiliki minimal persetujuan untuk menyusun informasi program dan mata kuliah yang disajikan melalui jarak jauh pada *web site* yang umum. PJJ dengan modus konsorsium dianggap model yang paling bermanfaat dalam prinsip, tetapi jarang dapat dilaksanakan (*seldom workable*).

Alasan dibentuknya konsorsium adalah keterbatasan sumber baik dana maupun manusia, menurunnya pendaftaran, ledakan informasi, dan perubahan fundamental dalam komunikasi masyarakat, serta pengembangan program yang dibagi ke dalam kelompok selain menurunkan biaya juga melayani banyak orang.

Keuntungan utama yang diperoleh melalui model pendidikan tinggi konsorsium adalah adanya jaringan yang memungkinkan untuk merekrut mahasiswa lebih luas. Keberhasilan konsorsium juga disebabkan oleh fleksibilitas dan otonomi lokal yang disediakan. Lebih luas, Lewis (1983, dalam Feasley, 2003) mengemukakan bahwa setiap anggota konsorsium akan memperoleh beberapa keuntungan dalam berbagai aspek sebagai berikut.

- Penyewaan atau pembelian materi pembelajaran cetak dan elektronik.
- Pembuatan materi pembelajaran cetak dan elektronik.
- Penggunaan fasilitas telekomunikasi dan *air time*.
- Promosi dan pemasaran program pendidikan.
- Pengumpulan dana dan berbagi sumber.
- Pengembangan persiapan registrasi timbal balik anggota konsorsium.

- Pelaksanaan kegiatan pengembangan staf dan pengajar.

Beberapa lembaga pendidikan yang menerapkan model konsorsium di antaranya adalah *The National University Teleconference Network* (NUTN) dan *The University of Mid-America* (UMA) di Amerika, *The Deutsches Institut für Fernstudien* (DIFF) di Jerman, *The Federation Interuniversitaire de L'Enseignement a Distance* (FIED) di Perancis, *Italy's Consorzio Per L'Universita a Distanza* (CUD) di Italia, *The Irish National Distance Education Center* di Dublin, dan *The Northern Ontario Education Access Network* di Kanada (Moore & Kearsley, 1996). Baru-baru ini sepuluh perguruan tinggi di Indonesia bergabung dalam konsorsium untuk menyelenggarakan PJJ bagi guru SD.

NUTN didirikan tahun 1982 dalam pertemuan *National University Continuing Education Association* (NUCEA) di Washington DC. NUTN beranggotakan 66 universitas dan *The Smithsonian Institute*, dengan basis di *Oklahoma State University*, yang kemudian pindah ke *Old Dominion University* pada tahun 1994. Model NUTN berhasil di Amerika karena cara kerja NUTN sesuai dengan perusahaan bebas dan filsafat perusahaan di banyak universitas di Amerika.

The University of Mid-America (UMA) merupakan konsorsium yang didirikan pada tahun 1975. UMA beranggotakan sembilan *medwestern universities* yang didasarkan pada program berbasis video yang berhasil pada *University of Nebraska*. Idennya bahwa setiap universitas menghasilkan mata kuliah yang disediakan bagi semua mahasiswa pada universitas anggota konsorsium. UMA berhenti pada tahun 1982 karena rendahnya pendaftaran, tingginya biaya produksi video, dan hilangnya dukungan biaya. Namun demikian, mata kuliah untuk belajar mandiri yang menekankan pada penggunaan video masih tetap digunakan oleh sebagian besar perguruan tinggi yang membentuk konsorsium.

The Deutsches Institut für Fernstudien (DIFF) adalah lembaga penelitian dan pengembangan yang tidak memiliki mahasiswa sendiri, tetapi mengembangkan bahan belajar dan model-model pembelajaran untuk digunakan oleh universitas yang bekerja sama.

Lembaga ini memiliki tujuan: menguji dan mengembangkan kemungkinan kajian akademik di mana kehadiran terus-menerus dari mahasiswa pada suatu lembaga tidak penting.

Di Perancis, PJJ tersedia pada tingkat regional yang terbentuk dari 22 universitas yang tergabung dalam *the Federation Interuniversitaire de L'Enseignement a Distance* (FIED). Lembaga ini dikembangkan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pusat PJJ serta pengajar yang mempersiapkan PJJ dan juga mengajar pada kelas tatap muka.

Italy's Consorzio Per L'Universita a Distanza (CUD) didirikan pada tahun 1984. Lembaga ini merupakan konsorsium yang merancang bahan belajar dan layanan dukungan mahasiswa untuk digunakan oleh mahasiswa yang mendaftar kepada perguruan tinggi yang merupakan anggota konsorsium.

The Irish National Distance Education Center didirikan tahun 1982. Lembaga ini merupakan salah satu fakultas di *The National Institute for Higher Education* di Dublin dan bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dalam pengembangan dan penyediaan program PJJ secara nasional.

Di Kanada, *the Northern Ontario Education Access Network* melayani 27 komunitas melalui pusat-pusat koordinasi pada beberapa perguruan tinggi. Berbagai kelompok dapat menggunakan jaringan ini untuk menyelenggarakan program-program PJJ.

Di Indonesia sedang dikembangkan konsorsium dari sepuluh perguruan tinggi dalam menyelenggarakan program pendidikan guru SD melalui sistem PJJ. Kesepuluh perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Sriwijaya, Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Nusa Cendana, Universitas Tanjung Pura, Universitas Cendrawasih, dan Universitas Negeri Makassar. Program yang ditawarkan ini menggunakan kurikulum yang sama untuk semua anggota konsorsium. Bahan belajar yang digunakan dalam program PJJ ini dikembangkan oleh kesepuluh perguruan tinggi tersebut. Masing-masing perguruan tinggi mengembangkan bahan belajar

secara utuh (cetak, audio/video, *web-based*, dan naskah tutorial *online*) untuk dua atau tiga mata kuliah (Departemen Pendidikan Nasional, 2006).

KESIMPULAN

Ketiga model organisasi PTJJ (modus tunggal, ganda, dan konsorsium) dapat diterapkan untuk mengatasi masalah pemerataan pendidikan tinggi. Setiap jenis memiliki keunggulan dan kelemahan. Kita tidak perlu mempertentangkan mana yang lebih baik di antara ketiganya. Yang lebih penting dan yang merupakan tantangan bagi kita adalah bagaimana memanfaatkan ketiga model organisasi pendidikan tinggi tersebut tidak hanya dalam upaya meningkatkan akses penduduk usia 19-24 tahun ke dalam pendidikan tinggi tetapi juga dalam memberikan jaminan dan bukti bahwa kualitas lulusan PTJJ sama dengan lulusan pendidikan tinggi biasa. Ukurannya bukan sekedar nilai yang dicapai mahasiswa selama perkuliahan tetapi juga kemampuan lulusan dalam bekerja di bidang yang relevan dengan program studi yang diambilnya. Dengan demikian, kita tidak hanya mengatasi masalah pemerataan pendidikan tetapi juga meningkatkan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrioux, D. A.M.X. 2006. *Strategic issues in single and dual mode distance education: The organizational blending of two Canadian distance universities*. [Online]. Tersedia: http://www.col.org/colweb/webdav/site/myjahiasite/shared/docs/06singleDualDE_Canada.pdf [8 Maret 2007].
- Achir, Y.C.A. 1997. Reformasi pendidikan sebagai upaya memaksimalkan hasil pendidikan. Dalam M. Dawan Rahardjo (Ed.), *Keluar dari kemelut pendidikan nasional: Menjawab tantangan kualitas sumberdaya manusia abad 21*. Jakarta: Internusa.
- Athabasca University. 2005. *About Athabasca University*. [Online].

- Tersedia: <http://www.athabasca.ca/aboutAU.php> [1 April 2007].
- Bates, A. W. 2000. *Distance education in dual mode higher education institutions: Challenges and changes*. [Online]. Tersedia: <http://bates.cstudies.ubc.ca> [19 Maret 2007].
- Connolly, T. & Stansfield, M. 2006. Using games-based e-learning technologies in overcoming difficulties in teaching information systems. *Journal of Information Technology Education*, 5, 459-476. [Online]. Tersedia: <http://www.jite.orgdocument/vol5/v5p459-476.Connolly170.pdf> [5 Desember 2006].
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Pedoman operasional penyelenggaraan konsorsium Program PJJ SI PGSD*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Dhanarajan, G. 1992. *Dual mode institutions: The off-campus centre of Universities Sains Malaysia*. [Online]. Tersedia: <http://www.worldbankorg/disted/Policy/Program/uni-02.html> [19 Maret 2007].
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. *Higher education long term strategy 2003-2010*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Feasley, C. E. 2003. Evolution of national and regional organization. Dalam Moore & Anderson (Eds.), *Handbook of Distance Education*. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, hal. 37 – 48.
- Garrison, D. R. 1990. *Understanding distance education: A framework for the future*. London: Routledge.
- Jones, T. 2005. Dual mode academics: A comparison of conventional and distance education experiences. *Turkish Online Journal of Distance Education*, 6 (2). [Online]. Tersedia: <http://tojde.anadolu.ed.tr/tojde18/articles/article7.htm> [19 Maret 2007].
- Keegan, D. 1991. *Foundations of distance education (2nd ed.)*. London: Routledge.
- Moore, M. G. & Kearsley, G. 1996. *Distance education: A system*

- view. Belmont: Wadsworth.
- Ramkhamhaeng University. 1998. *The university: Objectives, Vision, and Mission*. [Online]. Tersedia: <http://www.ru.ac.th/english/english2005/university/about.htm> [1 April 2007]
- Soehendro. B. 1996. *Kerangka pengembangan pendidikan tinggi jangka panjang 1996-2005*. Jakarta: Proyek Pengembangan Staf dan Sarana Perguruan Tinggi.
- Suparman, A. & Zuhairi, A. 2004. *Pendidikan jarak jauh: Teori dan praktek*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Tau, O. 2006. *Structure and process in dual model institution: Implication for development*. [Online]. Tersedia: <http://pcf4.dec.uwi.edu/viewpaper.htm> [19 Maret 2007].
- Taylor, J. C. 2001. Fifth generation distance education. Makalah dalam *20th ICDE World Conference on Open Learning and Distance Education: The Future of Learning -- Learning for the Future, Shaping the Transition*. Jerman: 01-05 April 2001.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Universitas Terbuka. 2004. *Mengenal Universitas Terbuka*. [Online]. Tersedia: http://public.ut.ac.id/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=41&MMN_position+4:2 [1 April 2007].

LAYANAN BANTUAN BELAJAR & PEMANFAATAN SUMBER BELAJAR DALAM SISTEM PENDIDIKAN TERBUKA & JARAK JAUH

**Durri Andriani
Nurmala
Afriani**

Sistem pendidikan jarak jauh (PJJ), menurut Schuemer (1993), memungkinkan proses pembelajaran mahasiswa yang lebih kompleks karena umumnya mahasiswa sudah lanjut usia, bekerja, dan berkeluarga. Kekhasan kondisi mahasiswa ini dapat menimbulkan masalah karena mereka dituntut untuk dapat mengkoordinasikan berbagai aspek seperti keluarga, pekerjaan, dan waktu luang dengan waktu belajar. Di sisi lain, keragaman karakteristik ini juga menyebabkan mahasiswa memiliki beragam motivasi dalam mengikuti PJJ. Sementara itu, dilihat dari inisiatif untuk bergabung di institusi pendidikan yang menerapkan sistem PJJ, mahasiswa dapat bergabung atas inisiatif sendiri atau atas dorongan/penugasan dari institusi tempatnya bekerja.

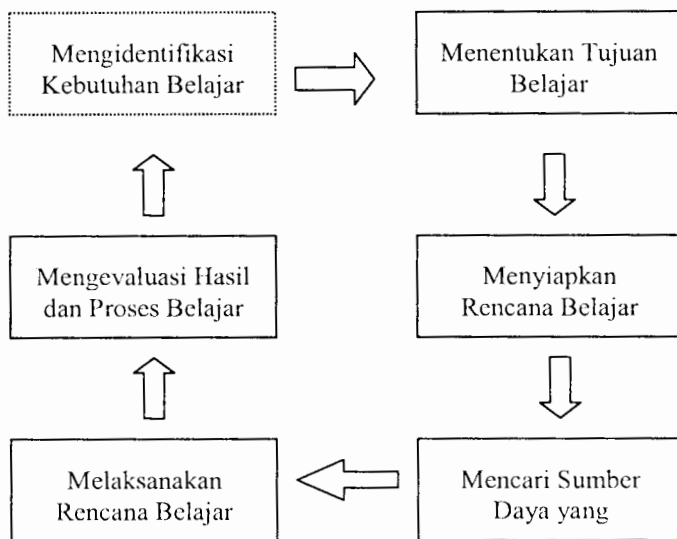
Apapun alasan bergabung di PJJ, pada umumnya mahasiswa terisolasi karena hampir tidak ada kontak atau pertemuan langsung dengan sesama mahasiswa dan sumber belajar. Mahasiswa PJJ tidak memiliki kesamaan pengalaman keseharian sehingga keceratan hubungan antara mahasiswa dan sumber belajar dalam proses belajar tidak dapat dikembangkan dengan cepat. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kontak antar peserta didik dan sumber belajar pada sistem PJJ ditiadakan sama sekali. Kontak tetap ada meskipun frekuensinya terbatas.

Mahasiswa pada sistem PJJ dituntut dapat berdisiplin mengikuti dan melaksanakan jadwal belajar yang mereka tetapkan sendiri, merencanakan waktu untuk membaca bahan ajar, mengatur waktu pertemuan dengan sumber belajar, dan mengunjungi fasilitas

PJJ seperti perpustakaan. Dengan kata lain, mahasiswa PJJ harus dapat belajar dimana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Untuk dapat berhasil, mahasiswa memerlukan strategi belajar. Strategi belajar juga mengacu pada kebiasaan belajar, waktu belajar, serta bantuan belajar (kelompok belajar, tutorial, media). Kegiatan belajar yang dilakukan dalam lembaga pendidikan yang menerapkan sistem PJJ pada dasarnya adalah belajar mandiri. Proses belajar mandiri dapat berlangsung secara berkelanjutan (lihat Gambar 1). Walaupun demikian proses belajar mandiri tidak selalu berlangsung seperti urutan yang ada pada Gambar 1. Dalam setiap kegiatan belajar mandiri dapat ditemukan kendala belajar, seperti kurangnya sumber daya atau kurangnya waktu untuk belajar yang dapat menyebabkan terganggunya proses belajar mandiri (Guglielmino & Guglielmino, 1991).

Strategi belajar yang tepat dapat mendorong keberhasilan belajar mahasiswa. Meskipun demikian, keberhasilan mahasiswa juga ditentukan oleh berbagai faktor seperti keturunan, keluarga, lingkungan, status sosial, ekonomi, dan pengalaman di samping motivasi pembelajar dan pemahaman terhadap materi belajar itu sendiri.

Untuk layanan akademik diperlukan untuk mengoptimalkan komunikasi yang diperlukan dalam sistem PJJ karena adanya keterbatasan interaksi langsung antar dosen sebagai sumber belajar dengan mahasiswa. Meskipun demikian, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan peningkatan intensitas komunikasi antara sumber belajar dengan mahasiswa. Internet, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi langsung (sinkronus) maupun tidak langsung (a-sinkronus). Melalui Internet dapat dimanfaatkan fasilitas *mailing list*, *discussion group*, *newsgroup*, dan *bulletin board*. Disamping itu, Internet dan media komputer lainnya dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran yang interaktif. Dengan demikian, interaksi sumber belajar dengan mahasiswa dapat dilakukan meskipun tidak 100% seperti yang diterapkan pada kelas tatap muka.



Gambar 1. Proses Belajar Mandiri (Guglielmino & Guglielmino, 1991)

Universitas Terbuka (UT) merupakan Pendidikan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ) mempunyai karakteristik yang unik, yang membedakannya dari perguruan tinggi biasa (konvensional). Perbedaan tersebut menyangkut berbagai aspek, satu di antaranya adalah dalam sistem pembelajaran. Jika perguruan tinggi konvensional lebih menekankan pembelajaran dalam bentuk tatap muka, sedangkan PTJJ melakukan pembelajaran dengan terbuka dan jarak jauh. Istilah jarak jauh berarti pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan menggunakan media, baik media cetak (modul) maupun non-cetak (audio/video, komputer/Internet, siaran radio dan televisi). Makna terbuka adalah tidak ada pembatasan usia, tahun ijazah, masa belajar, waktu registrasi, frekuensi mengikuti ujian, dan sebagainya (Katalog Universitas Terbuka, 2006). UT sebagai institusi pendidikan juga menerapkan sistem PJJ

secara penuh dituntut untuk memberikan layanan pendidikan yang secara optimal memfasilitasi proses pembelajaran mahasiswanya. Salah satunya dengan memberikan layanan bantuan belajar kepada mahasiswa, termasuk penggunaan beragam media dan pemanfaatan beragam sumber belajar yang dapat dimanfaatkan mahasiswa.

Layanan bantuan belajar merupakan salah satu aspek penting dalam sistem PJJ. Dalam hal ini, UT sebagai penyelenggara PTJJ berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar siswa dengan menyediakan beragam pilihan (bentuk, jenis, ruang lingkup, isi) bahan ajar, beragam media pembelajaran, beragam layanan bantuan belajar (*learning support system*), dan beragam pilihan penilaian hasil belajar (Belawati, 2002). Layanan bantuan belajar sendiri dapat dibedakan menjadi tiga jenis layanan, yakni (1) layanan penyediaan informasi dan konsultasi akademik, (2) layanan administrasi akademik, dan (3) layanan akademik.

Layanan Penyediaan Informasi Dan Konsultasi Akademik. Layanan penyediaan informasi dan konsultasi merupakan layanan yang sangat penting di UT, mengingat mahasiswa terpisah secara fisik dari universitas, dari dosen, maupun dari sesama mahasiswa. Layanan ini diberikan dengan tujuan untuk memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya kepada mahasiswa maupun calon mahasiswa. Semakin mudah informasi yang diperoleh mahasiswa dan semakin lengkap informasi yang diterima mahasiswa ataupun calon mahasiswa, diharapkan akan meningkatkan motivasi belajar dan memudahkan mereka dalam mengatasi kendala-kendala selama perkuliahan di UT (Puspitasari, 2002). Salah satu layanan yang diberikan misalnya, konsultasi pada waktu melakukan registrasi mata kuliah.

Layanan Administrasi Akademik. Layanan administrasi akademik diberikan dengan tujuan untuk membantu mengatasi atau menyelesaikan masalah mahasiswa yang berkaitan dengan registrasi, penyediaan bahan ajar, ujian, dan akses terhadap data akademik. Layanan ini menitikberatkan untuk mengidentifikasi masalah mahasiswa dan menyelesaikan kasus secara tuntas sesuai peraturan akademik yang berlaku. Masalah yang tidak dapat diselesaikan

karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku diinformasikan kepada mahasiswa secara lisan maupun tulisan. Layanan ini diharapkan dapat mengurangi kendala non akademis yang dapat menghambat proses belajar dan kelangsungan belajar mahasiswa UT (Puspitasari, 2002). Layanan yang diberikan misalnya, kelengkapan registrasi, ketersediaan bahan ajar, alih kredit, hasil ujian, dan kelulusan mahasiswa.

Layanan Akademik. Mahasiswa UT diharapkan dapat belajar secara mandiri, baik dengan cara belajar sendiri, belajar kelompok, maupun dengan cara mengikuti tutorial (Puspitasari, 2002). Kegiatan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi bahan ajar, tetapi kegiatan ini tidak seperti kegiatan mengajar di perguruan tinggi konvensional. Mengingat mahasiswa UT terdiri dari beragam latar belakang seperti usia, bidang pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain, maka UT menyediakan bantuan belajar dalam bentuk tutorial yang beragam pula seperti tatap muka, tutorial tertulis, tutorial radio, tutorial online, dan tutorial telepon, serta bimbingan tugas akhir program (TAP).

Bentuk tutorial merupakan suatu cara menyampaikan bantuan dan bimbingan belajar kepada mahasiswa. Menurut Pedoman Umum Penyelenggaraan Tutorial (2004), ada beberapa bentuk tutorial yang telah dikembangkan dan disediakan oleh UT sebagai salah satu bentuk layanan bantuan belajar bagi mahasiswa sesuai dengan ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang melaksanakan tutorial tersebut. Secara umum, dikembangkannya beberapa bentuk tutorial tersebut mempunyai tujuan (1) membantu mahasiswa dalam memecahkan berbagai belajar melalui tambahan penjelasan, tambahan informasi, diskusi dan kegiatan lainnya, (2) meningkatkan motivasi mahasiswa untuk belajar dan menyelesaikan studinya, (3) menumbuhkembangkan kemampuan belajar mandiri mahasiswa, (4) memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti bentuk tutorial yang paling sesuai dengan kondisinya, (5) dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan soal-soal ujian.

Mahasiswa memiliki kebebasan untuk memanfaatkan bantuan belajar yang sesuai dengan keperluan mereka. Disamping tutorial, mahasiswa UT juga memanfaatkan kelompok belajar untuk membantu mereka menguasai materi belajar.

Berikut ini hasil penelitian di UT yang berkaitan dengan bantuan belajar dan pemanfaatan sumber belajar.

Beberapa kondisi yang ditemukan dalam penelitian yang dilakukan mengenai bantuan belajar seperti penelitian yang dilakukan Ruganda (2004) yang menemukan bahwa mayoritas respondennya menyatakan kepuasan terhadap layanan tutorial yang diberikan. Sementara itu, Noviyanti (2002), Sunarjo & Kamsir (2004) menemukan bahwa responden mahasiswa menyatakan tutorial tatap muka sebagai bentuk tutorial yang paling diminati. Ditambah lagi dengan hasil temuan dari (Jovanka, 2006), tutor sangat menguasai dan trampil dalam melaksanakan tutorial tatap muka. Hal ini diperkuat penelitian Meilani et al (1997) yang menemukan bahwa 65,8% mahasiswa menginginkan frekuensi tutorial ditingkatkan. Sementara penelitian Warsito (2006), 85% responden mahasiswa Matematika menyenangi tutorial tertulis, sedang untuk tutorial peminatnya sangat rendah bahkan untuk tuton nyaris tidak ada responden. Sementara itu hasil temuan Afriani (2006), 80% mahasiswa responden menyatakan penyajian Tutorial *On-line* (tuton) menarik tidak membosankan karena tampilan penuh warna atau *colourfull*, tampilan dengan ilustrasi, dan materi inisiasi disusun secara sistematis sehingga mempermudah mereka dalam mempelajari setiap materi, tugas dan latihan mudah dikerjakan, tetapi 75% dari responden tuton juga mengalami kesulitan dalam mengakses tuton. Kesulitan karena login lama, keterbatasan sarana internet (tidak semua memiliki komputer sendiri) dan tidak mengetahui cara mengakses tuton. Responden dalam penelitian Meilani et al (1997) juga mengeluhkan pelaksanaan tutorial tidak tepat waktu dan tutor kurang menguasai materi. Secara umum, mahasiswa menyatakan puas terhadap tutorial yang diberikan, baik itu tutorial tatap muka (Irawan, 1997; Ruganda, 2004; Jovanta,

2006), tutorial tertulis (Warsito, 2006), maupun tutorial elektronik (Zaidin, Firman & Sigit, 2003; Afriani, Susanti, 2006).

Temuan yang sama juga terjadi pada mahasiswa S2. Berhubung materi pada program S2 memerlukan interaksi yang lebih intensif antara mahasiswa dengan sumber belajar, mahasiswa S2 disyaratkan untuk memiliki akses ke Internet untuk memudahkan interaksi. Mengingat hal tersebut, tutorial elektronik dan tutorial tatap muka pada program S2 diwajibkan (www.ut.ac.id). Dengan kondisi dimana UT menyediakan fasilitas layanan belajar dalam bentuk tutorial tatap muka, mahasiswa menyatakan masih memerlukan tambahan frekuensi pertemuan tatap muka meskipun mereka menyatakan puas terhadap kualitas tutorial tatap muka dan tutorial elektronik yang dilaksanakan di UPBJJ Jakarta (Andriani, 2005). Temuan ini konsisten dengan temuan dengan sampel mahasiswa S2 yang lebih luas (Andriani & Supartomo, 2006). Kondisi yang sedikit berbeda untuk tutorial elektronik, dari temuan (Susanti, 2006) dengan sampel mahasiswa S2 Magister Administrasi Publik, frekuensi akses tuton sangat rendah (<40 hari/semester), hal ini disebabkan kemampuan penggunaan internet yang masih rendah (14%) dan tingkat kesibukan mahasiswa yang cukup tinggi (semua mahasiswa bekerja). Untuk membantu peningkatan kemampuan mahasiswa dalam meng akses tuton, maka harus dilakukan sosialisasi pentingnya teknologi pembelajaran dalam sistem pembelajaran PTJJ.

Secara relatif, mahasiswa UT memiliki cukup akses ke sumber belajar. Padmo & Anggoro (2002) menemukan bahwa 59,4% dari responden mereka memiliki akses ke perpustakaan (perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan kantor/tempat kerja, maupun perpustakaan pribadi). Sementara itu, 39% responden memiliki akses ke laboratorium dan 39% memiliki akses ke narasumber. Meskipun mahasiswa memiliki akses ke sumber belajar, mereka menyadari bahwa mereka belum memanfaatkan sumber belajar tersebut dengan optimal. Hal ini disebabkan karena mahasiswa tidak tahu bagaimana memanfaatkan sumber belajar secara optimal. Surtini & Murdjiyo (2004) juga menemukan situasi yang sama pada

penelitian yang mereka lakukan terhadap kelompok belajar mahasiswa UT. Mahasiswa, dengan bantuan UPBJJ-UT, telah berhasil mendirikan kelompok belajar tetapi kemudian kelompok belajar tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal yang tercermin dari, misalnya, kurangnya pertemuan untuk mendiskusikan materi dan kurangnya penyebaran informasi tentang keberadaan sumber belajar tersebut.

Zaidin, Firman, & Sigit (2003) menemukan bahwa fasilitas pembelajaran yang dapat diakses melalui Internet yang disediakan UT menarik perhatian 73.07% responden dalam penelitian mereka. Meskipun demikian, peneliti lain menemukan bahwa hanya 35% mahasiswa yang memanfaatkan kios Internet (Padmo & Anggoro, 2002). Bahkan pada penelitian Susanti (2006) hanya 14% mahasiswa program Magister mampu memanfaatkan teknologi pembelajaran dengan baik. Di samping itu, Kusmawan (2001) menemukan bahwa meskipun mahasiswa UT tertarik terhadap fasilitas belajar melalui beragam media yang disediakan UT tetapi pemanfaatan beragam fasilitas beragam media masih rendah. Rendahnya pemanfaatan juga terjadi pada pemanfaatan radio dan televisi (Padmo & Anggoro, 2002). Alasan yang sering dikemukakan berkaitan dengan rendahnya pemanfaatan media oleh mahasiswa adalah kurang terampilnya mahasiswa seperti yang dinyatakan oleh 65,5% dari responden dalam penelitian Zaidin, Firma, & Sigit (2003) demikian pula pada penelitian Afriani (2006) 75% responden mahasiswa kesulitan mengakses tutor karena tidak semua memiliki komputer dan kurang terampil mengakses tutor. Temuan yang sama juga diperoleh pada penelitian Mulyatno, 2006, responden mahasiswa memiliki keterbatasan kemampuan (11.1%), dana (17.8%) dan peralatan (20%), di samping itu juga responden memiliki keterbatasan waktu untuk akses (26.7%).

PENUTUP

Berkaitan dengan temuan yang terkait dengan bantuan belajar, berikut saran kebijakan yang dapat diambil institusi yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa.

1. Penyediaan layanan bantuan belajar sampai di tingkat daerah dalam bentuk pemberian informasi, bimbingan perencanaan belajar, layanan konsultasi, dan bantuan belajar secara umum.
2. Pembinaan aspek kognitif, berupa bantuan penyesuaian diri mahasiswa yang perlu mengubah cara belajar dengan bimbingan penuh guru/dosen pada sistem belajar tatap muka menjadi cara belajar mandiri. Pembinaan dapat difasilitasi oleh pembimbing/penasihat akademik.
3. Pengembangan modul strategi belajar mandiri. Strategi belajar mandiri diperlukan mengingat mahasiswa belum terekspos oleh belajar mandiri pada proses belajar sebelumnya.
4. Upaya yang tersistem dan terintegrasi dari kantor pusat, kantor daerah, dan tutor untuk memfasilitasi mahasiswa. Meskipun mahasiswa secara langsung berhadapan dengan kantor daerah dan tutor, peran kantor Pusat sebagai pembuat kebijakan sangat penting. Untuk menjaga agar kebijakan yang dikembangkan di kantor Pusat dapat diimplementasikan dengan baik oleh kantor daerah dan tutor, diperlukan satu sistem monitoring dan evaluasi yang dijalankan secara konsisten.
5. Bimbingan akademik kepada mahasiswa harus mempertimbangkan faktor internal mahasiswa seperti usia dan kegiatan lain. Mahasiswa PJJ yang relatif tidak lagi muda sebagaimana situasi pada institusi pendidikan tinggi tatap muka memerlukan penanganan yang berbeda dalam hal pilihan cara komunikasi, misalnya.
6. Bimbingan akademik perlu dilakukan secara periodik dan terus-menerus meskipun dalam bentuk masal melalui berbagai cara maupun secara individual. Bimbingan akademik diperlukan karena mahasiswa memerlukan umpan balik langsung terhadap proses belajarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, S.S. 2006. *Analisis pemanfaatan tutorial online matakuliah Writing I*. Jakarta: Pusat Keilmuan, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Universitas Terbuka
- Andriani, D. 2005. Mahasiswa S2 pada sistem PJJ: pemanfaatan Internet dan bantuan belajar. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, 6(2), 77-91.
- Andriani, D. & Supartomo, C.B. 2006. An ICT-based education to improve quality of teaching and learning in graduate program: lessons learnt from Universitas Terbuka. Paper presented in *The 20th AAOU Annual Conference, Reflections on and prospects for Choice and use of New Technologies in ODL*. Kunming: China.
- Belawati, T. 2002. Perkembangan pemikiran tentang pendidikan terbuka dan jarak jauh. Dalam T. Belawati et al (Eds.) *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, pp. 30-44. Jakarta: Universitas Terbuka
- Guiglielmino, L.M. & Guiglielmino, P.J. 1991. *Expanding your readiness for self directed learning*. Don Mills, Ontario: Oragnization Design and Development Inc.
- Irawan, P. 1997. *Studi tentang pengalaman lulusan UT: Persepsi tentang program dan efeknya terhadap pengembangan karir*. Jakarta: Pusat penelitian kelembagaan, Lembaga Penelitian, Universitas Terbuka.
- Jovanka, D.R. 2006. *Kesiapan tutor terhadap pelaksanaan tutorial tatap muka matakuliah PTK dan PKP SI PGSD UPBJJ-UT Serang*. Jakarta: Pusat keilmuan, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Terbuka.
- Katalog Universitas Terbuka. 2006.
- Kusmawan, U. 2001. *Studi eksploratif tentang bimbingan akademik mahasiswa Jurusan Pendidikan MIPA FKIP UT*. Jakarta: Pusat Studi Indonesia, Lembaga Penelitian, Universitas Terbuka.
- Meilani, A., Isfarudi., Kuswanti, E., Aslichati, A., & Harijati. 1997. *Studi tentang penurunan registrasi ulang mahasiswa reguler*

- Universitas Terbuka*. Jakarta: Pusat Penelitian Kelembagaan, lembaga Penelitian, Universitas Terbuka.
- Mulyatno, M. 2006. *Meneliti hambatan mahasiswa FMIPA UT dalam mengikuti program tutorial online*. Jakarta: Pusat Penelitian Kelembagaan dan Pengembangan Sistem, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Terbuka.
- Noviyanti, R. 2002. *Studi tentang kendala yang dihadapi oleh mahasiswa subsidi D-III Penyuluhan Pertanian dalam sistem belajar jarak jauh di UPBJJ-UT Bogor masa registrasi 20-01.1*. Jakarta: Pusat Penelitian Kelembagaan, Lembaga Penelitian, Universitas Terbuka.
- Padmo, D. & Anggoro, M.T. 2002. *Persepsi & kesediaan mahasiswa dan calon mahasiswa potensial PTJJ dalam pemanfaatan media dan sumber belajar*. Jakarta: Pusat Studi Indonesia, Lembaga Penelitian, Universitas Terbuka.
- Ruganda, 2004. *Kendala mahasiswa S1 PGSD UT dalam mempelajari matakuliah Keterampilan dasar Menulis (PGSD4303) di Kupaten Majalengka pada masa registrasi 2002.3*. Jakarta: Pusat Penelitian Kelembagaan, Lembaga Penelitian, Universitas Terbuka.
- Schuemer, R. 1993. *Some psychological aspects of distance education*. Hagen, germany: Institute for Research in Distance Education. (ED 357 266).
- Sunarjo, J. & Kamsir. 2004. *Motivasi mahasiswa masuk Program S1 PGSD UT di wilayah kerja UOPBJJ UT Purwokerto*. Jakarta: Pusat Penelitian Kelembagaan, Lembaga Penelitian, Universitas Terbuka.
- Surtini, S., & Murdjiyo. 2004. *Evaluasi tutorial tatap muka Program S1 PGSD di kabupaten Grobogan masa registrasi 2003.1*. Jakarta: Pusat Penelitian Kelembagaan, Lembaga Penelitian, Universitas Terbuka.
- Susanti., Budiwati, Y., & Frans, Y.A. 2006. *Pengaruh pengelolaan tutor dan faktor internal mahasiswa terhadap partisipasi mahasiswa dalam tutor*. Jakarta: Pusat Keilmuan, Lembaga

Peelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Terbuka.

Universitas Terbuka. 2006. *Katalog Universitas Terbuka*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Warsito. 2006. *Persistensi mahasiswa Jurusan Matematika FMIPA UT ditinjau dari motivasi memilih program studi dan jenis tutorial yang diminati*. Jakarta: Pusat Penelitian Kelembagaan dan Pengembangan Sistem, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Terbuka.

Zaidin, M,A., Firman, H., & Sigit, A. 2003. *Studi tentang persepsi mahasiswa UT terhadap pelayanan bahan ajar, tugas mandiri, dan Internet di UPBJJ UT Makssar*. Jakarta: Pusat Penelitian Kelembagaan. Lembaga Penelitian, Universitas Terbuka.

